



P E M E R I N T A H
P R O V I N S I K A L I M A N T A N T I M U R

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (P-RENSTRA)

**TAHUN
2019-2023**

**DINAS PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Jl. Bhayangkara No. 54. Telp:(0541)753921 / 7427745
Fax: (0541) 736228 - Samarinda, Indonesia
Email: dinaspeternakankaltim@gmail.com



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 188.34/K.88/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2021 PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Strategi (Renstra) SKPD ditetapkan dengan peraturan pimpinan SKPD setelah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) memuat arah kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang merupakan kepastian kebijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan, maka perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2021 pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur, dengan menetapkannya dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);

10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 73 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 103).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2021 pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :

- a. melakukan pengolahan data dan informasi;
- b. menganalisis gambaran pelayanan perangkat daerah;
- c. menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah;
- d. mereview Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur;
- e. menelaah rencana strategis rencana tata ruang wilayah;
- f. menganalisis dokumen hasil kajian lingkungan hidup strategis;
- g. merumuskan isu-isu strategis;
- h. merumuskan visi dan misi perangkat daerah;
- i. merumuskan tujuan pelayanan jangka menengah perangkat daerah;
- j. merumuskan sasaran pelayanan jangka menengah perangkat daerah;
- k. mengikuti seluruh tahapan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim tersebut harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur.

KEEMPAT

: Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021 melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 19 Februari 2021
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
5. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



ROZANI ERAWADI
NIP. 19710124 199703 1 007

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 188.34/K.88/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SUSUNAN PERSONIL TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Pengarah : 1. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur
2. Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur
- Penanggung jawab : Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur
- Ketua : Kepala Seksi Data dan Informasi Peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur
- Wakil Ketua : Kepala Sub Bagian Perencanaan Program Dinas Peternakan dan Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
- Sekretaris : Deasi Fitriani, S.Pt (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur)
- Anggota
1. Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
 2. Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur
 3. Kepala Seksi Perbibitan Ternak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur
 4. Kepala Seksi Kesmavet Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur
 5. Nurmiana Afriany, ST Pelaksana Bidang Ekonomi Bappeda Provinsi Kalimantan Timur
 6. Alif Muktalipun, A.Md Pelaksana Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur
 7. Rina Wardati, S.Pt Pelaksana Sub Bagian Perencanaan dan Program Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur
 8. Sahariminah Pelaksana Sub Bagian Perencanaan dan Program Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur
 9. Yogi Gunara Ryana, SE Pelaksana Sub Bagian Perencanaan dan Program Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kaltim
 10. Syamsul Bahri, S.Pt Pelaksana Sub Bagian Perencanaan dan Program Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

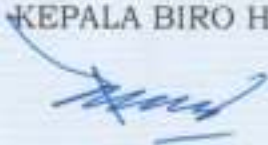
11. Hendi Darmawan, S.Pt Pelaksana Sub Bagian
Perencanaan dan Program Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur
- Narasumber : 1. Sony Yuwono, Ahli Perencana
2. Ketua TGUP3 Provinsi Kaltim
3. Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Perekonomian
Inspektorat Provinsi Kaltim
4. Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Provinsi Kaltim
5. Kepala Sub Bidang Pertanian dan Perikanan Bappeda
Provinsi Kaltim
6. Kepala Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi
Setda Provinsi Kaltim
7. Ketua Jurusan Peternakan Fakultas Pertanian
Universitas Mulawarman
- Moderator : Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi
Kalimantan Timur
- Pembawa Acara : Meliana, SE (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Provinsi Kalimantan Timur)
-

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



ROZANI ERAWADI
NIP. 19710124 199703 1 007

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka memfasilitasi Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023 disusun sebagai salah satu acuan dalam merumuskan lebih lanjut langkah-langkah operasional yang terkait dengan menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam pembangunan peternakan.

Secara singkat dijelaskan tentang tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program kegiatan pembangunan peternakan yang dilengkapi dengan matriks kegiatan Tahun 2019 – 2023 yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kontribusi sektor peternakan terhadap perekonomian daerah.

Perencanaan strategis ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang direncanakan tentunya dengan dukungan semua pihak baik Pemerintah (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota) maupun swasta, praktisi, akademisi dan kelompok masyarakat lainnya dalam membangun peternakan di wilayah Kalimantan Timur.

Kami menyadari bahwa Penyusunan Rancangan Perubahan Renstra ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu diperlukan perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut, tentunya melalui masukan semua pihak. Namun demikian diharapkan rancangan perubahan renstra ini dapat dijadikan sebagai acuan stakeholder, pemerintah, pelaku usaha dan lembaga lainnya. Semoga Bermanfaat.

Samarinda, Januari 2022
Kepala Dinas,



Munawwar, S.T., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP 196711291998031003

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	Ii
DAFTAR ISI	Iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.....	10
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur	10
2.2. Sumber Daya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur.....	16
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur.....	23
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur.....	33
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	40
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur.....	40
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur.....	48
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur.....	50
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Aspek Kinerja dari SDG's	60
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	65
BAB IV. TUJUAN, SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.....	70
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur.....	70

BAB V.	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	82
	5.1. Strategi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur.....	82
	5.2. Arah Kebijakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur.....	82
BAB VI.	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	87
BAB VII.	KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN BIDANG	109
BAB VIII.	PENUTUP	115

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 2.1	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Induk Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur	20
Tabel 2.2	Sarana dan Prasarana UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesmavet	21
Tabel 2.3	Sarana dan Prasarana UPTD Balai Pembibitan dan Inseminasi Buatan	22
Tabel 2.4	Kinerja Utama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2016-2020	23
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur	33
Tabel 2.6	Struktur Konsumsi Daging Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020 (dalam Ton)	36
Tabel 2.7	Struktur Konsumsi Telur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2020 (dalam Ton)	37
Tabel 2.8	Populasi Ternak di Kalimantan Timur Tahun 2016-2020	39
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	40
Tabel 3.2	Populasi Ternak di Kalimantan Timur Tahun 2016-2020	42
Tabel 3.3	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah	50
Tabel 3.4	Indikator Sasaran dan Target Renstra Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024	53
Tabel 3.5	Telaahan Renstra Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024	54
Tabel 3.6	Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Sasaran dan Target Renstra Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024	57
Tabel 3.7	Telaahan Renstra Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024	58

Tabel 3.8	Matriks TPB/SDGs yang Relevan dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	65
Tabel 3.9	Analisis SWOT Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur	68
Tabel 4.1	Perkembangan Populasi Ternak di Kalimantan Timur Tahun 2016-2020	72
Tabel 4.2	Pemotongan Ternak di Kalimantan Timur Tahun 2016-2020	73
Tabel 4.3	Perkembangan harga komoditas ternak dan produk ternak tahun 2016-2020	74
Tabel 4.4	PDRB Provinsi Kalimantan Timur atas dasar harga berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah)	75
Tabel 4.5	Kontribusi PDRB Peternakan terhadap Perekonomian Prov Kaltim atas dasar harga berlaku Tahun 2016-2020 (%)	76
Tabel 4.6	Kontribusi PDRB Subsektor peternakan terhadap PDRB Sektor Pertanian atas dasar harga berlaku Tahun 2016-2020 (%)	76
Tabel 4.7	Target PDRB Subsektor Peternakan di Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (dalam persen)	77
Tabel 4.8	Target Produksi Daging di Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023 (dalam ton)	78
Tabel 4.9	Target Produksi Telur di Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023 (dalam ton)	79
Tabel 4.10	NTP Peternakan dan NTP Gabungan di Kalimantan Timur Tahun 2016-2020	80
Tabel 4.11	Target NTP Peternakan di Kalimantan Timur Tahun 2019-2023	80
Tabel 4.12	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	81
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023	84
Tabel 6.1	Rencana Program Kegiatan Dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov Kaltim 2019-2020	93
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2019-2020	109

1.1. Latar Belakang

Wilayah Administratif Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas 10 Kabupaten/Kota, dengan luas wilayah daratan menjadi 129.066,64 km² (49.832,91mil²). Jumlah penduduk Kalimantan Timur tahun 2020 sebesar 3.766.039 jiwa dengan kepadatan 29,57 jiwa/km² rata-rata pertumbuhan penduduk 2,07%/tahun. Sebagaimana pertumbuhan penduduk, persebaran penduduk di Kaltim juga tidak merata, porsi terbesar berada di Samarinda (21,99%), selebihnya berada di Kabupaten Kutai Kartanegara (19,37%), Balikpapan (18,28%), Kutai Timur (11,54%) dan tersebar di Kabupaten/Kota lain berkisar ± 5%. Jumlah penduduk merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan kebutuhan akan komoditas ternak seperti daging, telur dan susu.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Kalimantan Timur dengan migas menunjukkan bahwa sektor ekonomi yang memiliki peran dalam pencapaian PDRB Kaltim adalah sektor pertambangan dan penggalian, namun kondisi ini tidak lagi semenjak terjadinya penurunan harga komoditas pertambangan diantaranya batubara dan minyak bumi. Data PBRD Kaltim tahun 2020 sektor pertambangan dan penggalian hanya berkontribusi sebesar 41,43%, sedangkan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya 0,86% menjadi 8,77%. Dari angka tersebut perolehan PDRB bidang pertanian didominasi oleh sub sektor perkebunan kemudian perikanan, kehutanan, peternakan serta tanaman pangan dan hortikultura. Sub sektor peternakan berada pada kisaran 0,36% namun jika dilihat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dengan kontribusi paling besar berasal dari daging ayam.

Indikator ekonomi lainnya seperti, laju inflasi mengalami penurunan pada tahun 2020 hingga mencapai 0,78%, dimana salah satu harga komoditas yang mempengaruhi inflasi adalah perkembangan **harga daging sapi dan harga daging ayam broiler**. Sedangkan angka indeks Nilai Tukar Petani (NTP) sebagai indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani setiap tahun bergerak fluktuatif namun cenderung naik yaitu sebesar 111,36 pada tahun 2020, akumulasi dari NTP Pertanian, Perkebunan, Kelautan Perikanan

dan Peternakan. Kondisi ini menunjukkan indeks yang diterima petani dari hasil penjualan produk pertaniannya lebih tinggi dibandingkan laju indeks yang dibayar petani baik untuk konsumsi rumah tangga maupun biaya sarana produksi pertanian. NTP untuk peternakan adalah **101,65 dan NTP yang tertinggi** di lingkup Pertanian berasal dari sektor perkebunan sebesar 124,57.

Penjabaran pembangunan nasional dalam RPJPN 2005-2025 dalam visi dan misi Presiden disederhanakan dengan 5 (lima) arahan Presiden yang akan dicapai dalam waktu lima tahun (2020-2024), yaitu :1) Pembangunan SDM; 2) Pembangunan Insfrastuktur; 3) Penyederhanaan Regulasi; 4) Penyederhanaan Birokrasi; 5) Transformasi Ekonomi.

Memperhatikan arah Kebijakan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 dan arahan Presiden, kebijakan pertanian dalam periode ini diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi termasuk memerhatikan kesejahteraan keluarga petani dan memerhatikan keberlanjutan sumber daya pertanian. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka Kementerian Pertanian menetapkan 5 (lima) arah kebijakan sebagai berikut :1) Terjaganya ketahanan pangan nasional; 2) Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian; 3) Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian; 4) Meningkatkan kualitas SDM pertanian, dan 5) Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima.

Fokus kegiatan yang dilakukan kementerian pertanian yaitu pada peningkatan produksi dan produktivitas dengan cara mekanisasi pertanian sehingga menghasilkan usaha tani dengan lebih efisien atau biaya yang rendah. Apabila dijabarkan lebih lanjut dalam setiap arah kebijakan maka strategi dari masing-masing kebijakan tersebut adalah sebagai berikut : 1) Strategi untuk Menjaga Ketahanan Pangan Nasional ; 2) Strategi dalam Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian ; 3) Strategi dalam Menjaga Keberlanjutan Sumber Daya Pertanian serta Tersedianya Prasarana dan Sarana Pertanian; 4) Strategi dalam Meningkatkan Kualitas SDM Pertanian; 5) Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah yang Berorientasi pada Layanan Prima

Sebagai bagian dari pembangunan wilayah, maka pembangunan peternakan juga mengacu dan menelaah Renstra kementerian pertanian. Disamping itu juga menjabarkan Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Timur 2018-2023 yaitu : Visi “ Berani untuk Kalimantan Timur yang Berdaulat” dan Misi kedua yaitu “ Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.

Untuk itu maka ditetapkanlah Moto Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai berikut:

“Mini Ranch Sapi Potong untuk Kesejahteraan Peternak yang Berdaulat”

Pembangunan Peternakan di Kalimantan Timur dengan penetapan target 2 (dua) juta ekor sapi menjadi landasan penetapan kebijakan strategis pembangunan peternakan selanjutnya, upaya peningkatan populasi dengan sistem “Mini Ranch” sehingga tingkat kepemilikan ternak sapi pada setiap Rumah Tangga Peternak (RTP) meningkat dan biaya produksi menurun.

Pembangunan peternakan Kalimantan Timur diharapkan dapat meningkatkan populasi, produksi pangan asal ternak dan meningkatkan kesejahteraan peternak, dengan strategi :

1. Pengembangan Kawasan Peternakan;
2. Peningkatan populasi dan produktivitas ternak;
3. Peningkatan produksi dan produktivitas ternak;
4. Peningkatan status kesehatan hewan dan pengawasan lalu lintas hewan/ternak;
5. Peningkatan Jaminan mutu dan keamanan pangan asal hewan
6. Peningkatan peran swasta dan penguatan usaha peternakan rakyat;
7. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Keterampilan Peternak

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur yang mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang peternakan, dalam menjalankan tugas dan fungsinya memerlukan tujuan, sasaran, Strategi dan arah kebijakan untuk dapat mencapai peningkatan kontribusi terhadap perekonomian daerah yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan operasional pelayanan yang ada dirancang secara berjenjang, melalui mekanisme forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan dilanjutkan dengan musyawarah pembangunan yang diformulasikan pada setiap tahunnya sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Peternakan. Peran pemerintah lebih banyak kepada peran-peran stimulasi, dinamisasi, regulasi dan fasilitasi bagi masyarakat dan pelaku usaha peternakan. Oleh karena itu partisipasi masyarakat terus akan didorong pada setiap tahapan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan. Peran masyarakat dalam pengawasan pembangunan saat ini telah berkembang dengan pesat sebagai dampak dari keterbukaan informasi publik sehingga perlu dilakukan pengelolaan dengan baik melalui media cetak, elektronik, website maupun bertatap muka.

Perencanaan strategis merupakan proses yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikannya secara sistematis segala usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis. Perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Pada dasarnya Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 telah dilaksanakan dalam Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019, Tahun 2020, dan Tahun 2021 (tahun berjalan). Sampai dengan pelaksanaan Renja Tahun 2020 terdapat rekomendasi agar dilakukan perubahan RPJMD Prov Kalimantan Timur sehingga membuat terjadi perubahan atas RENSTRA Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur. Perubahan RENSTRA Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur berpedoman pada perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, pelaksanaan perubahan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan

dan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya, terjadinya pandemi covid-19 serta Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Selanjutnya perubahan RENSTRA ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

1.2 Landasan Hukum

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur berpedoman kepada peraturan perundangan yang berlaku, antara lain:

- (1). Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- (2). Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59);
- (3). Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 Tentang RPJP Nasional Tahun 2005 - 2025
- (4). Undang-undang No. 18 tahun 2010 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84);
- (5). Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Timur;
- (6). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Daerah
- (7). Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
- (8). Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817); Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 tahun 2010 tentang Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 517);

- (9). Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);
- (10). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (11). Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- (12). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- (13). Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas-Dinas Daerah Propinsi Kalimantan Timur;
- (14). Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 2);
- (15). Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 73 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

Di samping peraturan-peraturan tersebut di atas, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur juga senantiasa memperhatikan peraturan perundangan lainnya sepanjang peraturan tersebut tidak bertentangan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat

daerah untuk 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan, disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 ditetapkan dengan maksud :

- a. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Untuk menentukan tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur.
- c. Untuk dasar penilaian kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

Adapun tujuan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

- (1). Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Dinas Peternakan Propinsi Kalimantan Timur dalam jangka waktu lima tahun dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 yang akan menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan peternakan di Kalimantan Timur
- (2). Tersusunnya tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur dan seluruh stakeholder serta masyarakat peternakan di Kalimantan Timur
- (3). Tersusunnya berbagai Kebijakan dan Program Pembangunan Kalimantan Timur khususnya pembangunan peternakan, yang akan dijadikan pedoman bagi penyusunan rencana pembangunan dalam kurun waktu satu sampai lima tahun.
- (4). Penyusunan Rencana Strategis sebagai pedoman dalam pengukuran keberhasilan atau kegagalan yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- (5). Renstra ini diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang baik. Sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

1.3. Sistematika Penulisan

Penyajian Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 – 2023 terdiri dari 7 (tujuh) Bab secara garis besar disusun dengan sistematika penulisan, yaitu sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan, serta sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur;

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

Bab ini menguraikan lingkungan intern yang berkaitan dengan tugas pokok, fungsi, struktur organisasi, sumber daya manusia yang dimiliki, kinerja pelayanan publik serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur;

Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Bab ini menguraikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan, telaahan Visi, Misi dan program Kepala daerah dan wakil Kepala daerah terpilih, telaahan Renstra Kementerian Pertanian dan Telaahan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten / Kota serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup strategis (KLHS), terakhir tentang penentuan isu-isu strategis;

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini menguraikan tujuan, sasaran jangka menengah dan indikator kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur

- Bab V Strategi dan Arah Kebijakan**
Bab ini menguraikan tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam waktu lima tahun mendatang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan.
- Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**
Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur lima tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
- Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Pertanian Urusan Peternakan**
Bab ini menyajikan indikator kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD
- Bab VIII Penutup**
Bab ini memuat ringkasan singkat serta maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun ke depan.

BAB II

**GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

A. Tugas

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur, maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

B. Fungsi

Dalam menjalankan tugas tersebut, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fungsi :

- (1). Perumusan kebijakan teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- (2). Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- (3). Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- (4). Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perbibitan dan budidaya peternakan;
- (5). Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengembangan kawasan dan usaha peternakan;
- (6). Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kesehatan hewan;

- (7). Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pasca panen dan kesehatan masyarakat veteriner;
- (8). Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- (9). Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- (10). Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- (11). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur melalui Sekretaris Daerah.

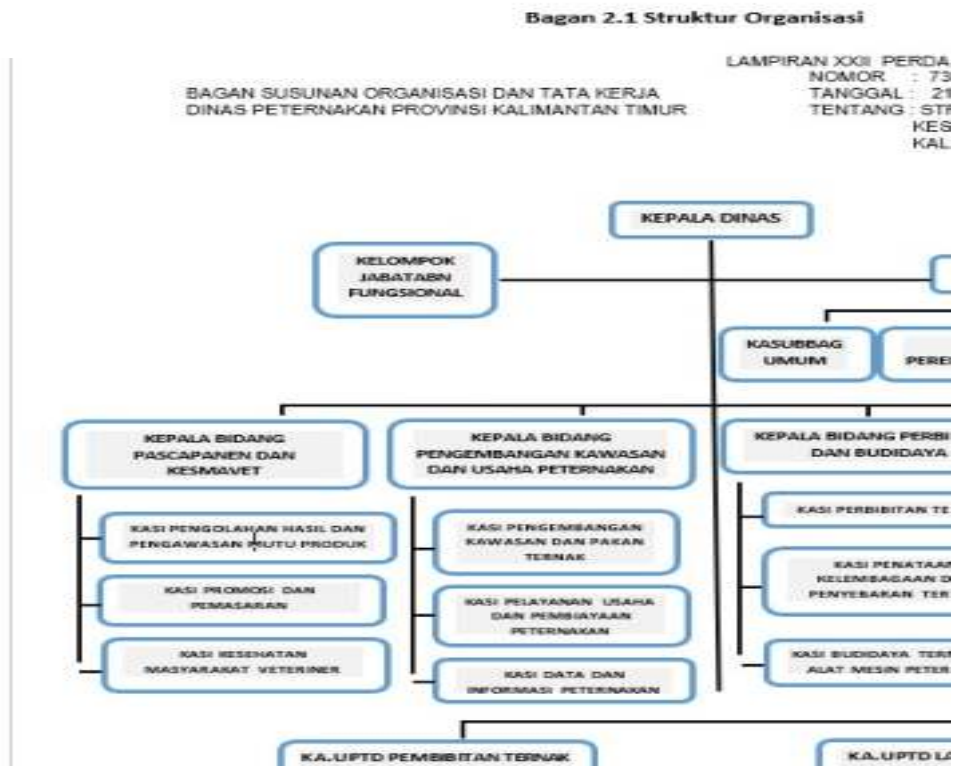
Susunan organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris, membawahkan:
 - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program,
 - b. Kepala Sub Bagian Umum,
 - c. Kepala Sub Bagian Keuangan,
3. Kepala Bidang Perbibitan dan Budidaya Peternakan, membawahkan:
 - a. Kepala Seksi Perbibitan Ternak
 - b. Kepala Seksi Budidaya Ternak dan Alat dan Mesin Peternakan
 - c. Kepala Seksi Penataan Kelembagaan dan Penyebaran Ternak
4. Kepala Bidang Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan, membawahkan:
 - a. Kepala Seksi Pengembangan Kawasan dan Pakan Ternak
 - b. Kepala Seksi Pelayanan Usaha dan Pembiayaan Peternakan
 - c. Kepala Seksi Data dan Informasi Peternakan
5. Kepala Bidang Kesehatan Hewan, membawahkan:
 - a. Kepala Seksi Perlindungan Hewan
 - b. Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan
 - c. Kepala Seksi Pengawasan Obat Hewan dan Pelayanan Kesehatan Hewan

6. Kepala Bidang Pasca Panen dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, membawahkan :
 - a. Kepala Seksi Pengolahan Hasil dan Pengawasan Mutu Produk
 - b. Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran
 - c. Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner
7. Kepala UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak, membawahkan:
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Kepala Seksi Produksi Bibit dan Benih Ternak
 - c. Kepala Seksi Pembibitan dan Produksi Hijauan Pakan Ternak
8. Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesmavet, membawahkan:
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Kepala Seksi Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan
 - c. Kepala Seksi Penyidikan dan Pengujian Kualitas Hasil Peternakan
9. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada **Bagan 2.1** berikut

Bagan 2.1 Struktur Organisasi



Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan, dan administrasi keuangan serta pengolahan aset. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan tanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat membawahkan subbagian-subbagian yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

1. Bidang Perbibitan dan Budidaya Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang perbibitan dan budidaya peternakan. Bidang Perbibitan dan Budidaya Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Perbibitan dan Budidaya Peternakan membawahkan

Seksi-Seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

2. Bidang Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang pengembangan kawasan dan usaha peternakan. Bidang Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan membawahkan Seksi-Seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.
3. Bidang Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang Kesehatan Hewan. Bidang Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Kesehatan Hewan membawahkan Seksi-Seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.
4. Bidang Pasca Panen dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang pasca panen dan kesehatan masyarakat veteriner. Bidang Pasca Panen dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pasca Panen dan Kesehatan Masyarakat Veteriner membawahkan Seksi-Seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.
5. UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak mempunyai tugas melaksanakan

sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknik Dinas di bidang Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak. Untuk melaksanakan tugas UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana teknis operasional Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan
- e. Pembinaan kelompok jabatan fungsional
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak terdiri dari ;

- a. Kepala UPTD
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Kepala Seksi Produksi Bibit dan Benih Ternak
 - d. Kepala Seksi Pembibitan dan Produksi Hijauan Pakan Ternak
 - e. Kelompok Jabatan fungsional
6. UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknik Dinas di bidang Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Untuk melaksanakan tugas UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan rencana teknis operasional Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan
- e. Pembinaan Kelompok jabatan fungsional
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dengan Tugas dan Fungsinya

Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner terdiri dari ;

- a. Kepala UPTD
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi penyidikan dan pengujian kualitas hasil peternakan'
 - d. Seksi penyidikan dan pengujian penyakit peternakan
 - e. Kelompok Jabatan fungsional
 - f. Sub bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bgaian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kapala UPTD Seksi-seksi di masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD. Kelompok Jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga senior sebagai Ketua ketua kelompok dan bertanggung Jawab kepada Kepala UPTD.
7. Jabatan Fungsional berkedudukan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur mempuntai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keterampilan dan keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keterampilan dan keahliannya. Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh gubernur atas usul Kepala Dinas.

2.2. Sumber Daya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

A. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Bentuk dan tujuan organisasi dibuat berdasarkan visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Kondisi institusi akan

sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Dalam menjalankan kegiatan organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur per Desember 2020 memiliki sumber daya manusia aparatur secara keseluruhan termasuk pada UPTD sebanyak 167 orang yang terdiri dari 27 orang pejabat struktural, 7 orang pejabat fungsional tertentu, 53 pejabat fungsional umum serta 80 orang tenaga non PNS. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan maupun wilayah kerja dapat dilihat pada grafik berikut.

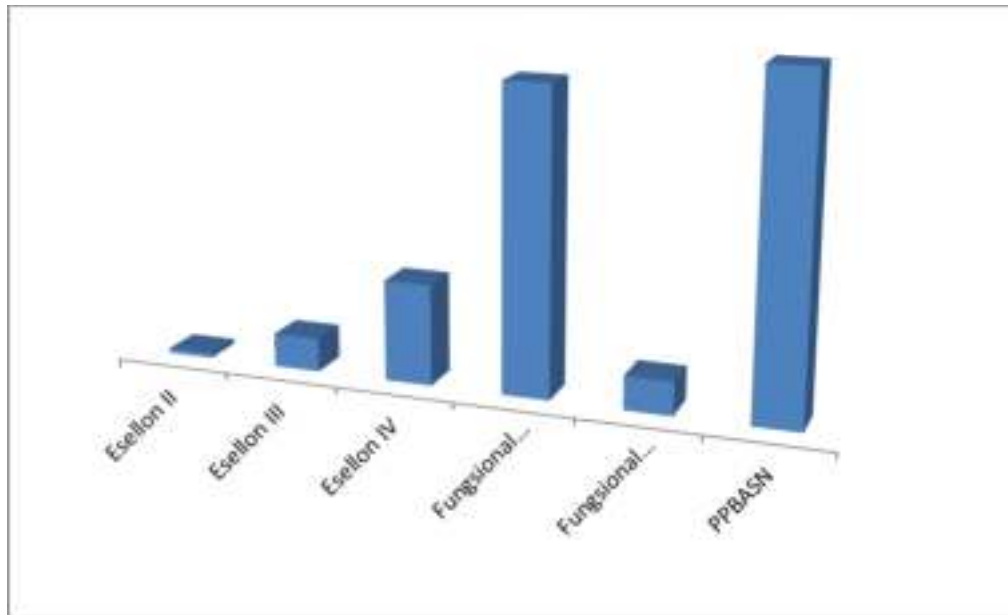
Berdasarkan pengelompokan umur Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah Bukan Aparatur Sipil Negara (PPBASN) dapat disampaikan data sebagai berikut:

1. Usia 50 tahun ke atas : 40 orang
2. Usia 40 – 49 tahun : 48 orang
3. Usia 30 - 39 tahun : 49 orang
4. Usia 20 – 29 tahun : 30 orang

Pegawai terbanyak pada kisaran usia 30 – 39 tahun sebanyak 49 orang. Jumlah tersebut diatas merupakan gabungan antara Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah Bukan Aparatur Sipil Negara (PPBASN).

Komposisi jabatan struktural Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas 1 (satu) eselon II yaitu Kepala Dinas; 7 (tujuh) eselon III yaitu 1 (satu) Sekretaris; 4 (empat) Kepala Bidang; 2 (dua) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah; 21 (dua puluh satu) eselon IV terdiri atas 5 (lima) sub bagian dan 16 (enam belas) Kepala Seksi; 53 (lima puluh tiga) Fungsional Umum; 7 (tujuh) Fungsional Tertentu; 80 (delapan puluh) Pegawai Pemerintah Bukan Aparatur Sipil Negara (PPBASN).

Grafik 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Tahun 2020



Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

Grafik 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin 2020



Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

Komposisi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 47 orang laki-laki dan 40 orang perempuan. Komposisi Pegawai Pemerintah Bukan Aparatur Sipil Negara (PPBASN) berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 56 orang laki-laki dan 24 orang perempuan.

Grafik 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan



Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

Komposisi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan tingkat pendidikan, meliputi 1 orang Strata III, 15 orang Strata II, 32 orang Strata I, 1 orang Diploma III, 34 orang SLTA, 4 orang SLTP. Komposisi Pegawai Pemerintah Bukan Aparatur Sipil Negara (PPBASN) berdasarkan tingkat pendidikan meliputi 1 orang Strata 2, 38 orang Strata I, 2 orang Diploma III, 32 orang SLTA, 5 orang SLTP, dan 2 Orang SD .

Grafik 2.4 Jumlah Pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Berdasarkan Golongan Tahun 2018



Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

Komposisi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan golongan yaitu di DPKH Prov. Kaltim terdapat 12 golongan IV, 35 golongan III, 10 golongan II, sedangkan di

UPT lab Keswan & Kesmavet terdapat 2 golongan IV, 4 golongan III, 2 golongan II, dan UPTD PTHPT terdapat 1 golongan IV, 6 golongan III, 15 golongan II.

B. Sumber Daya Aset atau Modal

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh sarana dan prasarana, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1 Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Induk Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

No	Uraian	Banyaknya	Satuan
1	2	3	4
1	Tanah	3.272	m ²
2	Gedung	3	Unit (2 Lantai) 2.410 m ²
3	Klinik Hewan	2	Ruang
4	Taman	800	m ²
5	Listrik	4	Jaringan
6	Air	2	Jaringan
7	Telepon	3	Line (1 Fax)
8	Area Parkir	2	Area
9	Ruang Rapat	2	Ruang
10	Ruang Arsip	3	Ruang
11	Koperasi	1	Buah
12	Perpustakaan	1	Ruang
13	Ruang CS	1	Ruang
14	Komputer	48	Unit
15	Laptop	69	Unit
16	Ruang Obat	1	Ruang
17	Ruang Persediaan	1	Ruang
18	Ruang Pengadaan	1	Ruang
19	Mobil Dinas	6	Unit
20	Mobil operasional	10	Unit
21	Motor Dinas	40	Unit
22	Kantin	1	Buah
23	Website	1	Buah
24	Papan Pengumuman	2	Buah
25	LED Display	1	Buah
26	Papan iklan	2	Buah

No	Uraian	Banyaknya	Satuan
27	Mushola	1	Unit
28	Beaner Arsip	3	Buah
29	Printer Multifungsi	1	Buah

Sumber: SIMDA BMD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2018

Tabel 2.2 Sarana dan Prasarana UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesmavet

No	Uraian	Banyaknya	Satuan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Tanah	686,4	m ²
2	Gedung	1	Unit (2 Lantai) 668 m ²
3	Laboratorium Kesehatan Hewan (Keswan)	5	1 Ruangan
4	Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)	5	1 Ruangan
5	Listrik	168.000	KWatt
6	Air	172	m ³
7	Telepon	120	MBPS Line (Fax)
8	Area Parkir	1	Area
9	Ruang Rapat	1	Ruang
10	Ruang Arsip	1	Ruang
11	Taman	47	m ²
12	Komputer	4	Unit
13	Laptop	12	Unit
14	Mobil Dinas	4	Unit
15	Motor Dinas	4	Unit
16	Mobil Operasional	3	Unit
17	Papan Pengumuman	1	Buah
18	Papan iklan	1	Buah
19	Incenerator	1	Unit
20	Ruang sampel	1	Ruang
21	Ruang Observasi	1	Ruang
22	Ruang Mutu	1	Ruang
23	Ruang Kepala UPTD	1	Ruang

No	Uraian	Banyaknya	Satuan
24	Mushola	1	Ruang
25	Ruang Penerima sampel	1	Ruang
26	Ruang Petugas Sampel	1	Ruang
27	Ruang Pos Satpam	1	Ruang
28	Ruang Biosecurity	1	Ruang
29	Toilet	2	Ruang

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2020

Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana UPTD Balai Pembibitan dan Inseminasi Buatan

No	Uraian	Banyaknya	Satuan
1	2	3	4
1	Tanah	500.000	m ²
2	Gedung	1	Unit (2 Lantai) m ²
3	Laboratorium Inseminasi Buatan (IB)	1	Unit
4	Mess	1	Unit
5	Listrik	15	Jaringan
6	Air	-	Jaringan
7	Telepon	-	Line (1 Fax)
8	Area Parkir	1	Area
9	Ruang Rapat	1	Ruang
10	Ruang Arsip	-	Ruang
11	Koperasi	1	Buah
12	Kantin	1	Buah
13	Lahan Hijauan Pakan Ternak (HPT)	38	Ha
14	Taman	1.000	m ²
15	Komputer	8	Unit
16	Laptop	4	Unit
17	Mobil Dinas	4	Unit
18	Motor Dinas	7	Unit

No	Uraian	Banyaknya	Satuan
19	Kendaraan operasional :		
	- Roda-6	1	Unit
	- Roda-4	2	Unit
	- Roda-3	1	Unit
	- Roda-3	-	Unit
	- Roda-2	7	Unit
	- Traktor	2	Unit
	- Hand Tractor	2	Unit
20	Kandang sapi	14	Buah
21	Kandang rusa	1	Buah
22	Kandang ayam	4	Buah

Sumber: SIMDA BMD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2018

2.3. Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

Pencapaian Kinerja Utama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2016-2020 dapat diuraikan berdasarkan tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4 Kinerja Utama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Kontribusi Lapangan Usaha Subsektor Peternakan terhadap Ekonomi Daerah	%	0,32	0,30	0,31	0,33	0,36
NTP	Nilai Konstantsa	104,78	103,88	109,16	110,94	101,65
Produksi Daging	Ton	71.908,48	77.786,59	77.847,88	79.262,43	71.837,98
Produksi Telur	Ton	10.812,72	11.260,05	12.734,00	11.083,30	14.008,57

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas, maka penjelasan pencapaian kinerja pelayanan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

1. Kontribusi Lapangan Usaha Subsektor Peternakan terhadap Ekonomi Daerah

PDRB merupakan indikator utama untuk pembentukan output dalam pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Subsektor peternakan merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari sektor pertanian, sehingga subsektor peternakan memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan ketahanan pangan, terutama dalam menjaga ketersediaan dan kecukupan protein hewani yang mayoritas terdapat pada komoditas peternakan, seperti daging, telur, dan susu yang tidak dapat digantikan dan ketersediaannya sebagian masih bergantung kepada impor.

Berdasarkan data BPS Kaltim kontribusi lapangan usaha subsector peternakan terhadap ekonomi daerah mencapai 0,36 pada tahun 2020 merupakan angka tertinggi jika dibandingkan 5 tahun sebelumnya, kontribusi lapangan usaha subsector peternakan terhadap ekonomi daerah paling rendah berada pada tahun 2017 dengan nilai 0,30. Struktur PDRB sektor pertanian luas mencapai 8,77% dari total PDRB. Pertumbuhan PDRB sub sektor peternakan dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, harga, dan biaya. Peningkatan populasi, produksi, dan produktivitas ternak bersinergi dengan peningkatan kontribusi PDRB sub sektor peternakan. Pada tahun 2020 terjadi rata-rata peningkatan populasi ternak sebesar 2,82%.

2. NTP

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani. NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, maka secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan daya beli petani.

Dari table diatas dapat dilihat bahwan NTP Peternakan Nilainya diatas 100, yang paling tinggi berada pada tahun 2019 dengan nilai 109,16 dan yang terendah berada di tahun 2020 yaitu 101,65. Jika NTP di atas 100, maka peternak masih untung karena nilai penjualannya lebih tinggi dibanding biaya rumah tangga. Sementara jika NTP-nya pas 100, maka peternak tidak untung dan tidak rugi. Jika NTP di bawah 100 peternak

mengalami kerugian karena penghasilan dari penjualan produksi peternakan masih lebih rendah dibanding biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan pokok rumah tangga.

3. Produksi Daging

Pangan asal ternak sangat dibutuhkan bagi pertumbuhan, kesehatan dan kecerdasan masyarakat Indonesia. Permintaan pangan asal ternak saat ini cenderung terus meningkat, seiring dengan pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi masyarakat, perbaikan tingkat pendidikan, peningkatan kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi protein hewani serta perubahan gaya hidup sebagai akibat arus globalisasi dan urbanisasi sehingga mengandalkan kepada pasokan impor, baik dalam bentuk sapi hidup atau daging.

Dari table diatas dapat dilihat trend produksi daging meningkat setiap tahunnya. Produksi terendah berada ditahun 2020 dengan jumlah produksi daging mencapai 71.837,98 ton dan yang paling tinggi tahun 2019 mencapai 79.259,87 ton. Hal ini menunjukkan bahwa adanya permintaan daging yang semakin meningkat setiap tahunnya sebagai akibat dari peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat yang berdampak pada peningkatan gizi disamping itu juga tumbuh dan berkembangnya perusahaan asing (perusahaan pertambangan) di Kalimantan Timur. Penurunan terjadi pada tahun 2020 dikarenakan adanya pandemic covid-19 yang menyebabkan pembatasan pertemuan dalam skala besar sehingga permintaan akan daging menurun.

4. Produksi Telur

Dari table diatas dapat dilihat trend produksi telur mengalami fluktuatif, produksi telur terendah mencapai 10.812,72 ton pada tahun 2016 dan produksi telur tertinggi mencapai 14.008,57 ton pada tahun 2020. Pandemi covid-19 menyebabkan pendapatan masyarakat menurun sehingga konsumsi kebutuhan protein beralih ke telur dengan harga yang lebih terjangkau.

Program-program yang menunjang keberhasilan dalam mencapai kinerja yang sudah dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur untuk mencapai Kinerja utama diatas dari tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Kawasan Usaha Peternakan

Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) Tahun 2016-2020 berturut-turut yaitu 114,68; 115,47; 122,44; 124,33; dan 102,19. NTUP mengalami penurunan karena perhitungan dasar tahun mengalami perubahan untuk tahun 2019 ke bawah menggunakan dasar tahun 2010=100, dan untuk tahun 2020 ke atas menggunakan dasar tahun 2018=100. Namun walaupun NTUP mengalami penurunan nilai NTUP masih di atas 100 artinya pendapatan yang diterima peternak lebih besar dari biaya usaha yang dikeluarkan untuk beternak. Indeks harga yang diterima petani sub sektor peternakan/peternak berasal dari empat komoditas, yaitu ternak besar, ternak kecil, unggas, dan hasil ternak.

Mini ranch yang teregister merupakan indikator baru mulai tahun 2019. Miniranch tahun 2019 yang difasilitasi sebanyak 5 unit mini ranch, dan tahun 2020 sebanyak 12 unit miniranch. Sistem Miniranch mini-ranch akan lebih efektif dan efisien sebab peternak tidak perlu menyiapkan makanan dan proses pengembangbiakan sapi akan berjalan secara kawin alam, sehingga peternak lebih hemat dalam hal biaya dan tenaga.

Program Pengembangan Kawasan Usaha Peternakan didukung oleh 3 Kegiatan yaitu: Pengembangan Kawasan dan Peningkatan Produksi Pakan Ternak. Indikator dari kegiatan ini adalah jumlah bibit hijauan pakan ternak tahun 2019 mencapai 90.000 stek/pols dan tahun 2020 sebanyak 70.000 stek/pols.

Pengembangan Agribisnis Peternakan. Indikator dari kegiatan ini adalah jumlah peternak debitor subsektor peternakan tahun 2016-2020 berturut-turut berjumlah 104;58;57;45;50 orang. Peningkatan ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain suku bunga yang cukup rendah yaitu sebesar 6-9%, peternak telah tereduksi akan manfaat asuransi ternak, dan peningkatan kesadaran peternak akan pentingnya asuransi ternak.

Kegiatan Pengembangan Informasi Peternakan. Indikator dari kegiatan ini adalah jumlah database, statistik peternakan, NBM dan data fungsi peternakan dari tahun 2016-2020 sebanyak 4 dokumen. Indikator ini mendukung informasi peternakan sebagai alat ukur untuk menentukan dalam pengambilan keputusan/kebijakan.

2. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan

Angka kelahiran sapi. Pada Tahun 2020 angka kelahiran sapi mencapai 20,10% dari target 20% atau terealisasi sebesar 100,50 %. Pada tahun 2019, angka kelahiran sapi sebesar 17,49%. Bila dibandingkan tahun 2019 terdapat peningkatan angka kelahiran sapi sebesar 2,61%. Kelahiran sapi dipengaruhi oleh jarak beranak/calving interval (CI). Semakin pendek CI maka jumlah kelahiran akan semakin tinggi. Conception Rate (CR) tahun 2017-2020 yaitu 68,3;50,51;53,76;57,14 %.

Calving Interval (CI)/jarak beranak. Pada tahun 2020, calving interval (CI) terealisasi 18,18 bulan dari target 18 bulan atau tercapai 99%. Pada tahun 2019, Calving Interval (CI) terealisasi 19 bulan. Bila dibandingkan tahun 2019, maka jarak beranak mengalami peningkatan menjadi lebih pendek 0,82 bulan.

Waktu CI menggambarkan kemampuan induk sapi menghasilkan pedet dalam suatu ukuran waktu. Faktor yang mempengaruhi jarak beranak adalah *post partum estrus (PPE)*, *post partum mating (PPM)*, dan S/C. Penyebab CI menjadi panjang karena terlambatnya kawin pasca melahirkan, kawin berulang dan kegagalan memelihara kebuntingan hingga lahir. Semakin lama PPE dan PPM serta tingginya nilai S/C maka jarak beranak akan semakin lama pula. Efisiensi reproduksi pada sapi dianggap baik apabila jarak antar kelahiran tidak melebihi 12 bulan atau 365 hari.

Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan didukung oleh 3 Kegiatan: Pengembangan Perbibitan Ternak. Terdapat 2 indikator untuk kegiatan pengembangan perbibitan ternak yaitu :

Jumlah ternak sapi bibit yang memiliki SKLB (Surat keterangan Layak Bibit) dari tahun 2016-2020 yaitu 77;50;50;100;120 yang tersebar di Kabupaten Paser, Kutai Kartanegara, Balikpapan, dan Kutai Timur.

Service per Conception tahun 2016-20120 yaitu 1,5; 1,8; 1,98; 1,86; 1,75. Nilai S/c mengalami penurunan setiap tahunnya. Idealnya Nilai S/C adalah 1. Artinya untuk membuntingkan 1 ekor induk sapi memerlukan 1 (satu) straw. Semakin kecil nilai S/C maka semakin mendekati nilai ideal, maka semakin meningkat jumlah populasi ternak.

Pengembangan Teknologi Peternakan Tepat Guna. Indikator kegiatan ini yaitu jumlah kelompok budidaya yang dilakukan pendampingan tahun 2019-2020 sebanyak 1 kelompok. Indikator tahun 2016-2020 yaitu instalasi biogas yang dihasilkan sebanyak 128;0;0;20;25 unit.

Peningkatan Kelembagaan Peternak. Indikator kegiatan ini yaitu jumlah proposal permohonan bantuan yang diverifikasi terealisasi sebanyak 14 proposal pada tahun 2020 dan pada tahun 2019 sebanyak 54 proposal. Proposal bantuan ini diajukan oleh peternak melalui dinas kabupaten/kota dan diverifikasi oleh dinas provinsi.

3. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Indikator program ini adalah Jumlah kompartemen yang berstatus bebas penyakit jembrana terealisasi 35 unit miniranch pada tahun 2020 dan 5 unit pada 2019. Kompartemen yang berstatus bebas penyakit jembrana terdapat di 1).Kutai Kartanegara (6 kelompok), 2).PPU (7 kelompok), 3).Paser (5 kelompok), 4).Kutai Timur (6 kelompok), 5). Kutai Barat (3 kelompok), 6). Berau (6 Kelompok), 7). Mahulu (2 Kelompok).

Indikator tahun 2016-2018 yaitu Persentase peningkatan status wilayah kesehatan hewan jembrana. Persentase peningkatan status wilayah kesehatan hewan Brucellosis pada tahun 2016 tercapai 100% tidak terjadi penyakit brucellosis. Pada tahun 2017 peningkatan status wilayah jembrana terealisasi sebesar 80% dari target 50% dan pada tahun 2018 peningkatan status wilayah jembrana terealisasi sebesar 90% dari target 50%. Persentase peningkatan status wilayah kesehatan hewan brucellosis pada tahun 2017 dan 2018 terealisasi 70% dan 100%. Pada tahun 2017 dan 2018 persentase peningkatan status wilayah penyakit hewan Avian Influenza terealisasi 80% dan 100%. Sedangkan untuk persentase peningkatan status wilayah kesehatan penyakit hewan rabies pada tahun 2017 dan 2018 terealisasi 100% di masing-masing tahunnya.

Berdasarkan data diatas maka Kalimantan Timur bebas penyakit Brucellosis, Anthrax, Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Hogcholera, Gumboro, SE, sedangkan penyakit hewan menular strategis yang masih endemis yaitu Jembrana, Rabies, AI, Surra, Hellmintiasis, Paratuberkulosis, IBR.

Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan. Pelaksanaan vaksinasi rabies dari tahun 2017-2020 sebanyak 7;6;5.000;15.000 ekor yang tersebar di 10 kab/kota di Prov. Kaltim. Pelaksanaan vaksin jembrana dari tahun 2017-2020 sebanyak 7;6;1.500; 17.441 ekor yang tersebar di di 9 kab/kota di Prov. Kaltim, yang belum mendapatkan pelayanan vaksin jembrana yaitu kabupaten Mahakam hulu. Jumlah kejadian penyakit jembrana dari tahun 2016-2020 sebanyak 5;3;67;7;16 kasus yang tersebar di 4 kab/kota yaitu Paser, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, dan Penajam Paser Utara. Jumlah kejadian penyakit Avian Influenza/AI dari tahun 2016-2020 sebanyak 10;3;1;0;10 yang tersebar di Paser, Mahulu, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Penajam Paser Utara, Samarinda, Bontang. Jumlah kejadian penyakit rabies dari tahun 2016-2020 sebanyak 2;0;0;1;1 yang tersebar di Samarinda. Tidak adanya kasus rabies kemungkinan karena tidak adanya laporan kejadian penyakit rabies.

Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Hewan. Indikator dari kegiatan ini adalah Jumlah kab/kota yang dilakukan pengawasan lalu lintas hewan pada 10 kabupaten/kota. Pengawasan lalu lintas hewan jalur darat dilakukan di pos pemeriksaan kesehatan hewan (checkpoint) dan antar kabupaten/kota.

Pengawasan lalu lintas hewan di 3 (tiga) perbatasan yaitu :

- Checkpoint Muara Komam di perbatasan Kabupaten Paser dengan Provinsi Kalimantan Selatan.
- Checkpoint Batu Engau di perbatasan Kabupaten Paser dengan Provinsi Kalimantan Utara.
- Checkpoint Gunung Tabur di Perbatasan Kabupaten Berau dengan Malaysia.

Saat ini checkpoint yang sudah difasilitasi adalah Checkpoint Muara Komam.

Penguatan Pelayanan Kesehatan Hewan. Indikator dari kegiatan ini adalah jumlah hewan yang dilakukan pelayanan kesehatan hewan tahun 2017-2020 sebanyak 4.935; 4.669; 8.288; 38.111 ekor yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota. Sedangkan pelayanan kesehatan hewan di klinik hewan tahun 2017-2020 30.366; 39.733; 25.264; 17.743 ekor yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota. Hewan yang dilakukan pelayanan kesehatan hewan di klinik DPKH Prov. Kaltim Tahun 2020 sebanyak 334 ekor. Pasien yang dilayani di Klinik hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

adalah hewan kesayangan seperti anjing, kucing, kelinci, hamster, monyet, burung, kura-kura dan ular.

4. Program Hilirisasi Produk Peternakan

Indicator program ini adalah Peningkatan usaha yang bersertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) pada tahun 2020 terealisasi sebesar 12,07% dari target 11%. Pada tahun 2020 terdapat 7 unit usaha yang memperoleh sertifikat NKV, sedangkan tahun 2019 terdapat 8 unit usaha yang memperoleh sertifikat NKV. Pada tahun 2018 terdapat 8 unit usaha yang memperoleh sertifikat NKV, tahun 2017 terdapat 10 unit usaha yang memperoleh sertifikat NKV, dan tahun 2016 terdapat 9 unit usaha yang memperoleh sertifikat NKV. Pada tahun 2020 terdapat 7 unit usaha yang memperoleh sertifikat NKV yaitu Gerai Elina Multi Frozen, PT Masuya Distra Sentosa, UD Maju Bersama (Cold Storage), UD Maju Bersama (Retail) dan CV. Vanda Sukses Pangan, Perum Bulog Kantor Cabang Samarinda dan Kelompok Sukses Mandiri

Peningkatan Mutu Produk Olahan Peternakan. Indikator dari kegiatan ini adalah jumlah usaha pengolahan hasil peternakan yang dilakukan pendampingan pada tahun 2018-2020 yaitu 1;2;2 unit usaha yang tersebar di Samarinda, Bontang, dan Paser. Tahun 2016-2017 indikator yang digunakan yaitu Jumlah peserta pelatihan pengolahan hasil peternakan (Orang) sebanyak 20;20 orang.

Peningkatan Pemasaran Hasil Peternakan. Indikator dari kegiatan ini adalah Jumlah omset pemasaran produk peternakan dalam pameran/bazaar tahun 2019-2020 menghasilkan omset yang sama yaitu Rp.125.000.000 Indikator pada tahun 2016-2018 yaitu Jumlah Promosi / Pameran Peternakan yang diikuti sebanyak 8;5;3 kali. Jumlah omset tahun 2020 belum mencapai target karena jumlah pameran yang diselenggarakan berkurang akibat pandemic Covid-19. Promosi atau pameran peternakan yang diikuti yaitu Kaltim Expo dan Pameran Pangan Nusantara.

Peningkatan Jaminan Keamanan Pangan Asal Ternak. Indikator dari kegiatan ini adalah Jumlah unit usaha yang dilakukan pengawasan dan pembinaan terealisasi pada tahun 2017-2020 sebanyak 20;16;34;54 unit usaha. Pada tahun 2020 Unit usaha yang dilakukan pembinaan dan pengawasan yaitu PT. Hero Supermarket Tbk. (Giant Supermarket Mall

Mesra Indah), PT. Matahari Putra Prima (Foodmart Komplek Mall Lembuswana), RPH Bontang, PT. Matahari Putra Prima (Hypermart Plaza Mulia), PT. Matahari Putra Prima (Hypermart Mall Samarinda Global City/ Big Mall), PT. Hero Supermarket (Giant Ekstra Bukit Alaya), CV. Rizky Berkah Abadi (Jl. Kebon Agung), Anisa D.N, UD. " Rezeky Anugrah Jaya", " Ayam Sakti ", UD. Sabar Mandiri, RPA. Mugi Mulyo, PT. Lotte Shopping Indonesia, RPU Hj. Karsiti, RPU Nur Iksan, CV. Elina Multi Frozen, RPU Sembada Ayam, PT. Supra Boga Lestari Tbk. (Farmers Market Samarinda), PT. Pangansari Utama (Jl.Jend. Sudirman No.880), PT. Matahari Putra Prima (Hypermart Balikpapan Trade Center),PT. Matahari Putra Prima (Hypermart Balikpapan Trade Center), PT. Hero Supermarket. Giant Ekstra MT Haryono (Jl. MT. Haryono No. 109), PT. Diamondfair Ritel Indonesia, PT. Saliman Riyanto Raharjo, CV. Balikpapan Boga Utama, Perum Bulog Kantor Cabang Samarinda, CV. Mahakam Kaltim, Boneless Frozen Food (BFF), Mina Satimpo, PT. Agro Boga Utama Cabang Balikpapan.

5. Program Penyidikan dan Pengujian Keswan dan Kesmavet

Indikator program ini adalah Peningkatan pemeriksaan sampel penyidikan penyakit hewan dan produk asal hewan (%) tahun 2019-2020 sebesar 11;12%. Dalam mendukung tujuan dan sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur, maka UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet sangat berperan dalam menunjang keberhasilan tujuan organisasi sehingga untuk meningkatkan produksi daging dan populasi di Kalimantan Timur diperlukan surveilans pemeriksaan penyakit hewan dan produk pangan asal hewan melalui pengambilan sampel penyakit hewan dan produk pangan asal ternak.

Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan. Indikator kegiatan ini yaitu Jumlah sampel penyakit asal hewan yang diuji dari tahun 2016-2020 yaitu 17.022;4.269;5.140;8.520;15.058 yang tersebar di 10 kabupaten/kota. Sampel penyakit hewan aktif adalah sampel penyakit hewan yang diambil berdasarkan ketersediaan anggaran sedangkan jumlah sampel penyakit hewan yang pasif adalah sampel penyakit hewan yang diambil sesuai permintaan konsumen. Sampel penyakit hewan terdiri dari serum darah sapi, darah sapi, serum darah ayam, feses sapi, ulas darah sapi, darah ayam, swab kloaka, cadaver anjing, dan serum darah anjing.

Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner. Indikator kegiatan ini yaitu Jumlah sampel produk asal hewan yang diuji dari tahun 2016-2020 yaitu 7.651;1202; 1.568;2.185;2.548 yang tersebar di 9 kabupaten/kota kecuali Mahakam hulu/. Sampel pangan asal hewan yaitu adonan, bakso, bintang laut, burger, daging ayam, daging bebek, daging kerbau, daging domba, daging sapi, daging babi, kikil, hati ayam, nuget, prime shank cut, sarang wallet, sosis, siomay, sempolan, dan usus ayam.

6. Program Peningkatan Mutu Genetik Ternak

Peningkatan produksi bibit ternak & HPT pada tahun 2019-2020 sebesar 9,8%;6,6%.

Peningkatan Produksi Bibit dan Benih Ternak. Indikator kegiatan ini adalah jumlah sapi kelahiran sapi bibit tahun 2016-2020 sebanyak 51;14;15;6;13 ekor dan rusa bibit sebanyak 38;24;16;;26;11 ekor. Jika dilihat angka jumlah kelahiran sapi dan rusa mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan karena jumlah bibit sapi dan rusa mengalami penurunan baik dari segi kualitasnya maupun kuantitas.

Peningkatan Produksi dan Bibit Hijauan Pakan Ternak. Indikator kegiatan adalah produksi HPT tahun 2016-2020 sebesar 779; 1.137;686;935;1005 ton . Sedangkan jumlah bibit HPT yang diproduksi dari tahun 2019-2020 sebesar 8.000; 6.000 stek/pols.

Tabel 2.5
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE (%)					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	ANGGARAN TAHUN	REALISASI
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur (Gabungan)	59.605.749.228	20.299.891.000	22.157.153.540	46.903.080.000	46.634.117.725	56.382.867.834	18.408.860.749	21.359.474.744	43.149.560.446	42.071.279.573	95	91	96	92	90	(5,95)	(7)
	Belanja Tidak Langsung	14.379.399.553	14.306.854.000	14.059.017.500	13.879.940.000	14.989.549.000	12.875.140.231	12.513.890.163	13.372.534.902	12.910.705.197	12.686.983.927	90	87	95	93	85	1,04	(0)
	Belanja Langsung	45.226.349.675	5.993.037.000	8.098.136.040	33.023.140.000	31.644.568.725	43.507.727.603	5.894.970.586	7.986.939.842	30.238.855.249	29.384.295.646	96	98	99	92	93	(8,54)	(9)
2	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur (Provinsi)	48.150.030.053	20.299.891.000	22.157.153.540	36.190.966.814	38.722.570.810	45.681.924.294	18.408.860.749	21.359.474.744	33.562.142.572	35.615.642.417	95	91	96	93	90	(4,70)	(6)
	Belanja Tidak Langsung	12.285.399.553	14.306.854.000	14.059.017.500	13.879.940.000	14.989.549.000	11.009.630.231	12.513.890.163	13.372.534.902	12.910.705.197	12.686.983.927	90	87	95	93	85	5,10	4
	Belanja Langsung	35.864.630.500	5.993.037.000	8.098.136.040	22.311.026.814	24.733.021.810	34.672.294.063	5.894.970.586	7.986.939.842	20.651.437.375,21	22.928.658.490,33	97	98	99	93	93	(8,87)	(10)
3	UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet	5.234.106.400	-	-	2.160.175.000	2.884.526.693	4.874.358.967	-	-	2.138.770.505	2.736.226.730	93	-	-	99	95	(13,84)	(13)
	Belanja Tidak Langsung	765.960.000	-	-	-	-	665.265.000	-	-	-	-	87	-	-	-	-	-	-
	Belanja Langsung	4.468.146.400	-	-	2.160.175.000	2.884.526.693,5	4.209.093.967	-	-	2.138.770.505,20	2.736.226.730	94	-	-	99	95	(10,36)	(10)
4	UPTD PTHPT	6.221.612.775	-	-	8.551.938.186	4.027.020.222	5.826.584.573	-	-	7.448.647.369	3.719.410.426	94	-	-	87	92	(10,30)	(11)
	Belanja Tidak Langsung	1.328.040.000	-	-	-	-	1.200.245.000	-	-	-	-	90	-	-	-	-	-	-
	Belanja Langsung	4.893.572.775	-	-	8.551.938.186	4.027.020.222	4.626.339.573	-	-	7.448.647.368,87	3.719.410.426	95	-	-	87	92	(4,76)	(5)

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2020

Dari tabel 2.5 diatas dapat diuraikan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur bahwa anggaran belanja langsung DPKH Prov Kaltim mengalami kenaikan dan penurunan anggaran. pada tahun 2017 sebesar Rp5.993.037.000 turun 86,75% terhadap anggaran tahun 2016 sebesar Rp45.226.349.675. Pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 35% menjadi Rp8.098.136.040,07. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan Kembali menjadi Rp33.023.140,000- dan tahun 2020 mengalami penurun kembali menjadi Rp.31.644.568.725,-. Kondisi ini menyebabkan beberapa indikator program tidak tercapai dan ada beberapa program/kegiatan yang tidak dilanjutkan atau perubahan dari tahun 2016 menuju 2018/2019.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

A. Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

Memperhatikan kondisi pembangunan peternakan baik secara nasional maupun wilayah Provinsi Kalimantan Timur saat ini dan hasil yang ingin dicapai hingga tahun 2023, maka banyak tantangan yang dihadapi dan akan berpengaruh pada kinerja pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam kurun waktu 2019 – 2023.

1. Tantangan Internal

Tantangan internal merupakan faktor potensial yang ada di dalam intern Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur yang belum secara optimal diberdayakan dalam pembangunan peternakan.

a. Sumber Daya manusia

Dalam kurun waktu 2011-2019 tidak ada pengangkatan PNS baik teknis maupun Non Teknis sehingga tugas-tugas yang seharusnya dikerjakan oleh PPBASN. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur merupakan dinas teknis yang mempunyai tanggung jawab bidang teknis peternakan dan kesehatan hewan maka memerlukan tenaga teknis yang lebih banyak dibandingkan dengan tenaga non teknis. Untuk itu, perlu pemberdayaan tenaga non teknis dengan melalui

bimbingan teknis, pelatihan/magang teknis peternakan dan kesehatan hewan, sehingga memiliki dasar pemahaman tentang pembangunan peternakan dan kesehatan hewan.

b. Prasarana dan sarana

Secara umum, prasarana dan sarana perkantoran sudah memadai namun untuk prasarana dan sarana pelayanan di lokasi khususnya padat ternak masih sangat minim seperti *check point*, pasar hewan, depo obat hewan dan alat mesin peternakan. Perkembangan informasi elektronik sangat pesat sehingga kecepatan, ketepatan dan keterbukaan semakin dituntut oleh masyarakat. Publikasi saat ini harus mengikuti perkembangan dan informasi yang transparan dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, koordinasi dan kerjasama dengan media elektronik serta prasarana dan sarana elektronik seperti website, baliho, leaflet, spanduk perlu ditingkatkan agar penyampaian informasi mengenai peternakan dan kesehatan hewan dengan masyarakat dapat terjalin dengan baik. Peran serta masyarakat akan semakin meningkat dengan adanya media publikasi tersebut di dalam penyelenggaraan pembangunan peternakan.

c. Koordinasi dengan instansi/lembaga terkait

Keterkaitan/keterpaduan dan sinergisitas antar instansi/lembaga terkait baik di Pusat, Provinsi maupun kabupaten/kota perlu ditingkatkan agar keterpaduan program dan kegiatan peternakan berjalan efektif dan efisien. Sebagai contoh dalam pengembangan kawasan peternakan yang berbasis komoditas ternak dapat terintegrasi dengan sektor lainnya seperti pertanian tanaman pangan, perkebunan, industri pengolahan hasil dan lahan eks tambang.

d. Konsistensi penganggaran

Renstra yang telah disusun sudah memuat rencana penganggaran dalam satu periode lima tahun namun dalam implementasinya tidak secara konsisten penggaran tersebut dipenuhi sehingga target kinerja tidak tercapai, hal ini sangat tergantung dengan kondisi keuangan daerah.

2. Tantangan Eksternal

- a. Sumber pembiayaan selain belanja APBD dan APBN seperti Kredit Program (KKPE, KUPS), CSR, Kredit Ternak Sejahtera (KTS) dan penjaminan usaha peternakan sapi melalui AUTS belum secara optimal dapat diakses oleh peternak. Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk memecahkan permasalahan permodalan khususnya agunan yang harus dimiliki oleh peternak maka telah dibentuk lembaga penjaminan. Namun belum semua peternak memahami adanya lembaga penjaminan sehingga ke depan perlu sosialisasi mengenai pola penjaminan, disamping itu sifat kehati-hatian pihak perbankan masih menjadi Persyaratan utama sehingga agunan tetap harus dipenuhi.
- b. Keterlibatan peran swasta terutama perusahaan sawit dan perusahaan tambang terhadap pengembangan usaha peternakan masih rendah, sehingga pelaksanaan Peraturan Gubernur tentang komitmen perusahaan terhadap pengembangan peternakan sapi potong belum optimal
- c. Pematangan betina produktif khususnya sapi/kerbau lokal masih cukup tinggi. Hal ini merupakan suatu kerugian bagi peternak karena yang seharusnya dapat memberikan keuntungan dengan bertambahnya populasi namun harus dipotong. Oleh karena itu pengawasan dan penindakan tentang larangan pematangan betina produktif perlu ditingkatkan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Pematangan Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif.
- d. Semakin meningkatnya lalu lintas ternak maupun produk peternakan akan semakin besar ancaman penyakit hewan strategis yang berdampak tinggi pada ekonomi. Kewaspadaan terhadap penyakit harus ditingkatkan karena Kaltim bebas Brucellosis, anthrax, Penyakit mulut dan kuku
- e. Pemanfaatan sumber daya pakan ternak yang tersedia belum optimal, maka perlu peningkatan dan pemahaman pengelolaan pakan secara baik dan benar dengan didukung teknologi tepat guna yang bisa meningkatkan efisiensi dan efektifitas usaha peternakan rakyat.

B. Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur

Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan bahan pangan asal ternak yang ASUH maka peluang usaha di bidang peternakan juga semakin meningkat.

1. Meningkatnya Konsumsi Daging dan Telur

Konsumsi daging berkembang dengan pesat yang disebabkan oleh penambahan penduduk, peningkatan pendapatan, kesadaran gizi serta pola hidup sehat. Struktur konsumsi daging jika dilihat atas jenis daging yang dikonsumsi maka dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6 Struktur Konsumsi Daging Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016 – 2020 (dalam ton)

No.	Kab / Kota	2016	2017	2018	2019	2020
1	S a p i	8.804,18	9.393,51	10.961,24	12.444,65	10.694,27
2	K e r b a u	122,83	295,16	1.360,47	1.667,58	2.391,48
3	Kuda	1,05	1,46	0,18	0,63	1,81
4	Kambing	529,22	637,88	745,89	693,59	826,10
5	Domba	19,26	12,10	8,32	11,07	36,25
6	Babi	888,00	883,23	1.400,94	1.803,70	1.830,40
7	Ayam Buras	5.008,03	5.690,21	4.798,66	4.592,02	4.657,96
8	Ayam Petelur	360,84	352,42	452,21	365,77	522,29
9	Ayam Pedaging	55.925,75	61.706,02	63.028,77	69.243,31	60.372,41
10	I t i k	199,48	263,21	392,71	499,28	644,86
11	Kelinci	5,82	6,68	6,32	3,95	4,82
12	Puyuh	6,59	4,39	6,76	6,19	7,48
13	Merpati	1,09	1,09	1,05	1,25	1,31
14	Itik Manila	15,81	22,53	26,87	26,89	33,12
	Jumlah	71.887,95	79.324,00	83.190,37	91.362,30	82.024,57

Sumber: Statistik Peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2021

Berdasarkan data konsumsi maka konsumsi daging hampir setiap tahunnya mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2020 konsumsi daging mencapai 82.024,57 ton. Struktur konsumsi daging terbesar pada 5 tahun terakhir mencapai 69.243,31 ton adalah ayam pedaging. Prestasi yang telah diraih bahwa seluruh kebutuhan konsumsi ayam pedaging broiler telah dipenuhi dari produksi lokal Kaltim. Saat ini perkembangan ternak ayam ras broiler sudah sepenuhnya ditangani swasta, pemerintah hanya sebagai regulator saja.

Konsumsi daging sapi mulai tahun 2016-2019 mengalami peningkatan disetiap tahunnya dan mengalami penurunan pada tahun 2020. Pada tahun 2018 konsumsi daging sapi di Provinsi Kalimantan Timur mencapai 10.961,24 ton dibandingkan dengan tahun 2017 konsumsi daging sapi di Provinsi Kalimantan Timur mencapai 9.393,51 ton. Apabila dibanding dengan tahun 2017 terdapat peningkatan sebesar 16,68% dan kembali meningkat di tahun 2019 menjadi 12.444,65 ton atau peningkatan sebesar 11,9%. Pada tahun 2020 terjadi penurunan konsumsi daging sapi menjadi 10.694,27 ton atau penurunan sebesar 14,1% hal ini dikarenakan pandemic covid-19 yang menyebabkan turunya permintaan akan daging sapi.

Tabel 2.7 Struktur Konsumsi Telur Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016– 2020 (dalam ton)

A	B	V	W	X	Y
No.	Jenis Telur	2016	2017	2018	2019
1	Ayam Buras	1.728,72	1.735,14	1.463,28	1.400
2	Ayam Petelur	15.163,50	19.028,65	20.565,12	18.715
3	Itik	966,95	1.072,28	1.216,53	1.244
4	Puyuh	43,01	31,78	40,75	40

Sumber: Statistik Peternakan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2021

Struktur konsumsi telur pada tahun 2016 sampai dengan 2018 mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 jumlah konsumsi telur mencapai 18.025,39 ton. Pada tahun 2017 konsumsi telur naik signifikan atau mencapai 22.043,43 ton. Pada tahun 2018 konsumsi telur juga mengalami kenaikan mencapai 23.495 ton dibandingkan tahun 2019. Pada tahun 2019 konsumsi telur mengalami penurunan menjadi 21.614,04 ton. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2016 sampai 2018 mengalami kenaikan adapun kenaikannya adalah 2016 ke 2017 sebesar 22% dan dari 2017 ke 2018 naik sebesar 6,5% dan turun pada tahun 2019 dan mengalami kenaikan Kembali pada tahun 2020 menjadi 23.667,39 ton.

2. Daya Tampung Ternak Masih Tinggi

Melalui Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) akan melakukan kajian untuk pengembangan sapi pada lahan bekas tambang sehingga Kaltim diharapkan menjadi salah satu lumbung sapi nasional. Populasi sapi potong yang dikembangkan pada lahan perkebunan sawit sampai sekarang diperkirakan sebanyak 31.955 ekor yang tersebar pada 8 Kabupaten/Kota sedangkan yang dipelihara/dikembangkan pada lahan bekas tambang sampai saat ini sekitar 6.839 ekor yang tersebar pada 7 Kabupaten/kota. Sehingga dari populasi sapi potong di lahan perkebunan sawit dan lahan ex tambang dapat dimanfaatkan sebagai lokasi mini ranch.

3. Data Perkembangan populasi ternak berdasarkan jenis

Data populasi ternak mulai tahun 2016-2020 tercatat naik dengan rasio 0,26% untuk Sapi, 4,88% untuk kambing, 18,69 Domba, 2,6% Babi, -1,52% Kuda, ayam 4,08 dan itik paling tinggi sebesar 8,56% dan itik manila 14,49%, disamping kenaikan beberapa jenis ternak juga mengalami penurunan seperti sapi perah -1,31%, kerbau -3,27%, ayam buras -1,8%, kelinci -4,58% dan puyuh 3,65% perkembangan populasi ternak bisa dilihat pada tabel dibawa ini.

Tabel 2.8 Populasi Ternak di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016-2020

No.	Jenis Ternak	2016	2017	2018	2019	2020	r (%)
1	S a p i	118.712	119.123	117.504	119.485	119.974	0,26
2	Sapi Perah	97	107	110	91	87	-2,68
3	Kerbau	7.144	7.055	6.157	6.194	6.552	-2,14
4	Kambing	57.794	61.526	66.378	67.892	69.929	4,88
5	Domba	320	281	439	590	635	18,69
6	Babi	75.475	85.749	78.968	82.546	83.652	2,60
7	Kuda	101	91	97	102	95	-1,52
8	Ayam Buras	4.768.534	5.418.086	4.569.169	4.372.415	4.435.205	-1,80
9	Ayam Petelur	842.176	822.533	1.055.432	853.693	1.218.994	9,69
10	Ayam Pedaging	60.747.455	66.268.201	66.672.445	67.886.566	59.402.832	-0,56
11	Itik	192.505	219.149	248.978	254.683	254.749	7,26
12	Kelinci	13.063	15.005	14.189	8.89	10.830	-4,58
13	Puyuh	68.643	46.693	66.593	65.808	79.222	3,65
14	Merpati	4.182	4.163	4.027	4.776	5.015	4,65
15	Itik Manila	25.215	35.934	42.851	42.890	52.823	20,31

Sumber: Statistik Peternakan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2021

4. Berkembangnya teknologi peternakan tepat guna

Perkembangan teknologi peternakan tepat guna di Provinsi Kalimantan Timur sangat baik. Teknologi peternakan tepat guna di Kalimantan Timur adalah Biogas. Pada tahun 2016-2020 jumlah instalasi biogas yang dibangun dan dimanfaatkan masyarakat yaitu 128;0;0;25;20 unit.

BAB III
**PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DINAS PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN**

Memperhatikan kondisi pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur saat ini dan sasaran yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, maka diperlukan suatu analisis baik terhadap permasalahan dan isu-isu strategis yang mempengaruhi kinerja pembangunan peternakan.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

Permasalahan utama dalam pelaksanaan pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah *“Percepatan Pertumbuhan Populasi Ternak Belum Sebanding Dengan Peningkatan Konsumsi”*, sehingga akar masalah dan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pembangunan peternakan ke depan dapat dilihat dalam Tabel 3.1. sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

MASALAH UTAMA	PERMASALAHAN	AKAR MASALAH
Percepatan peningkatan populasi ternak belum sebanding dengan peningkatan konsumsi	1. Populasi dan produktivitas ternak masih rendah	1 Ketersediaan bibit ternak lokal masih kurang 2 Manajemen perkawinan ternak belum optimal 3 Kemampuan Petugas belum optimal 4 Good Farming Practice belum diterapkan dengan baik 5 Perbaikan mutu genetik ternak masih kurang optimal 6 Pengawasan terhadap peredaran obat hewan dan pelayanan kesehatan hewan belum optimal.
	2. Produksi dan produktivitas Hijauan Pakan Ternak masih rendah	1 Luas lahan kebun HPT masih rendah 2 Ketersediaan pakan ternak berkualitas masih kurang
	3. Daya saing produk peternakan masih rendah	1 Hilirisasi dan industrialisasi produk peternakan masih rendah 2 Manajemen pemasaran produk peternakan belum optimal

MASALAH	PERMASALAHAN	AKAR MASALAH
	4. Pengembangan Kawasan Peternakan belum optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1 Skala usaha peternakan masih kecil dan tersebar 2 Penataan kawasan peternakan belum optimal 3 Keterbatasan lahan untuk usaha peternakan
	5. Pencegahan dan pemberantasan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) belum maksimal	<ol style="list-style-type: none"> 1 Kasus kejadian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) masih endemis dan resiko penyakit emerging. 2 Pengawasan Lalu lintas hewan di Kaltim belum tertib administrasi. 3 Surveilans dan pengujian penyakit hewan belum optimal
	6. Jaminan mutu dan keamanan pangan asal hewan belum optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1 Surveilans dan pengujian produk asal hewan belum optimal 2 Penerapan higienis dan sanitasi pangan belum optimal 3 Penyelamatan betina produktif belum optimal
	7. Peran swasta dan usaha peternakan rakyat belum optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1 Akses informasi permodalan usaha peternakan belum optimal 2 Informasi tentang perizinan usaha peternakan belum optimal
	8. Kapasitas Kelembagaan dan Keterampilan Peternak masih rendah	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pengambilan dan pengumpulan informasi data peternakan belum optimal 2 Manajemen kelembagaan peternak belum optimal

Secara rinci permasalahan pembangunan peternakan dapat diuraikan sebagai berikut;

a). Populasi dan Produktivitas ternak masih rendah ;

Peningkatan populasi di Kalimantan Timur pada dasarnya masih relatif rendah perkembangannya, terutama pada ternak sapi pada tahun 2016 populasi berjumlah 118.712 ekor pada tahun 2020 populasi berjumlah 119.974 ekor, berdasarkan data tersebut peningkatan yang terjadi pada populasi ternak sapi hanya sebesar 0,26% tiap tahunnya, dapat dilihat pada Tabel 3.2. Hal tersebut terjadi disebabkan berbagai macam faktor seperti ketersediaan bibit ternak lokal yang masih sangat kurang, manajemen perkawinan belum optimal, Kemampuan Petugas belum optimal, Good Farming Practice belum diterapkan dengan baik, Perbaikan mutu genetik ternak masih kurang optimal, Pengawasan terhadap peredaran obat hewan dan pelayanan kesehatan hewan belum optimal.

Tabel. 3.2. Populasi Ternak di Kalimantan Timur Tahun 2016 – 2020 (ekor).

No.	Jenis Ternak	2016	2017	2018	2019	2020	r (%)
1	S a p i	118.712	119.123	117.504	119.485	119.974	0,26
2	Sapi Perah	97	107	110	91	87	-2,68
3	Kerbau	7.144	7.055	6.157	6.194	6.552	-2,14
4	Kambing	57.794	61.526	66.378	67.892	69.929	4,88
5	Domba	320	281	439	590	635	18,69
6	Babi	75.475	85.749	78.968	82.546	83.652	2,60
7	Kuda	101	91	97	102	95	-1,52
8	Ayam Buras	4.768.534	5.418.086	4.569.169	4.372.415	4.435.205	-1,80
9	Ayam Petelur	842.176	822.533	1.055.432	853.693	1.218.994	9,69
10	Ayam Pedaging	60.747.455	66.268.201	66.672.445	67.886.566	59.402.832	-0,56
11	Itik	192.505	219.149	248.978	254.683	254.749	7,26
12	Kelinci	13.063	15.005	14.189	8.859	10.830	-4,58
13	Puyuh	68.643	46.693	66.593	65.808	79.222	3,65
14	Merpati	4.182	4.163	4.027	4.776	5.015	4,65
15	Itik Manila	25.215	35.934	42.851	42.890	52.823	20,31

Sumber data : Buku Statistik Peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

Untuk dapat memenuhi kebutuhan sapi potong diperlukan populasi dasar sebesar 431.028 ekor, dengan asumsi jumlah pemotongan per tahun 53.213 ekor, jika 90% dapat diambil dari populasi maka setiap tahun dapat dipotong 47.892 ekor. Sedangkan populasi saat ini 119.974 ekor sehingga masih perlu penambahan 311.054 ekor.

Produktivitas sapi di Kalimantan Timur dapat dilihat dengan indikator sebagai berikut :

- Bobot lahir rata-rata 20 kg untuk ternak sapi bali, bobot lahir rata-rata untuk sapi persilangan sebesar 30 kg
- Bobot potong sapi rata-rata 251 kg
- Calving interval rata-rata 18 bulan

Indikator tersebut masih perlu ditingkatkan untuk bobot lahir hingga mencapai 40 kg, untuk bobot potong sapi rata-rata 400 kg dan calving interval rata-rata 13 - 14 bulan.

b). Produksi dan produktivitas Hijauan Pakan Ternak masih rendah

Pakan merupakan komponen biaya terbesar dalam usaha peternakan baik pembibitan, pengembangbiakan maupun penggemukan. Untuk menghasilkan pakan yang berkelanjutan penggunaan bahan pakan lokal maupun biomassa ikutan dari hasil tanaman yang ada disekitar. Bahan pakan lokal yang tersedia baik berupa hijauan pakan unggul, biji-bijian dan produk ikutan dari industri belum dimanfaatkan secara optimal. Pengembangan dan penyediaan benih/bibit unggul pemanfaatan bahan lokal spesifik lokasi, dan pemanfaatan teknologi pakan merupakan faktor penentu dalam mencapai hasil dan efisiensi produksi. Produksi hijauan pakan ternak mencapai 33.877 ton dengan luas kebun HPT 1.355 Ha, dengan produksi hijauan mencapai 25 ton tahun. Produktivitas hijauan ini akan meningkat jika dilakukan pemeliharaan yang baik dan bibit yang berkualitas. Produktivitas rumput gajah dapat mencapai 200-300 ton/ha/tahun.

c). Daya saing produk peternakan masih rendah

Potensi basis komoditas dan produk peternakan harus dikelola menjadi keunggulan kompetitif untuk memenuhi pasar lokal. Daya saing produk peternakan, merupakan kemampuan dalam menghasilkan komoditas yang dapat memenuhi kebutuhan baik local maupun nasional. Provinsi Kalimantan Timur untuk usaha Hilirisasi dan industrialisasi produk peternakan masih rendah dan manajemen pemasaran produk peternakan masih kurang.

d). Pengembangan Kawasan Peternakan belum optimal

Pengembangan Kawasan peternakan bertujuan untuk mengoptimalkan potensi sumberdaya lahan, ternak, peternak, teknologi, sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan produktivitas peternakan, pendapatan dan kesejahteraan peternak, serta menciptakan pewayalahan komoditas. Pengembangan Kawasan peternakan di Provinsi Kalimantan Timur belum optimal padahal potensi sumber daya alam di Kalimantan Timur cukup mendukung diantaranya tersedianya lahan eks tambang, adanya perkebunan sawit yang dapat diintegrasikan dengan sapi, dan adanya kebijakan menggunakan perhutanan social untuk masyarakat.

e). Pencegahan dan pemberantasan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) belum maksimal

Kesehatan hewan merupakan komponen yang penting pada usaha peternakan dalam menghasilkan produk disamping juga mempengaruhi pada kesehatan masyarakat di sekitarnya. Penyelenggaraan kesehatan hewan dilaksanakan secara terpadu dengan aktivitas yang lain dalam pemeliharaan ternak sehingga mampu meningkatkan performa dan produktivitas ternak, melalui pengendalian, pencegahan dan pengobatan yang dilakukan secara terjadwal dan berkelanjutan. Disamping itu kewaspadaan terhadap masuknya penyakit dari luar yang bersifat emerging dan reemerging diseases melalui arus perdagangan ternak antar pulau dan antar wilayah.

Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) di Kaltim kejadiannya masih cukup tinggi seperti BVD, IBR, Pullorum, Anaplasmosis, Tripanosomiasis, Babesiolosis sedangkan penyakit hewan menular strategis yang sangat berpengaruh terhadap keuntungan peternak adalah AI, jembrana, bruceolosis. Penyakit hewan menular yang bersifat zoonosis yang masih banyak terjadi di Kaltim seperti Rabies, Salmonellosis, fasiolosis dan AI. Keterbatasan biaya, tenaga medis/ paramedic dan peralatan menjadi hambatan dalam penanggulangan penyakit hewan menular tersebut.

Lalu lintas hewan ke Kalimantan Timur melalui darat, laut dan udara dengan frekuensi yang sangat tinggi menyebabkan masuknya penyakit hewan dari luar sehingga kaltim menjadi daerah terancam kasus penyakit hewan menular. Jalur keluar masuknya hewan

melalui laut dan udara, pengawasannya menjadi tanggung jawab Karantina Pertanian, sedangkan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan prov. Kaltim hanya berwenang mengeluarkan surat pertimbangan teknis kesehatan hewan, namun masih banyak klien yang belum tertib administrasi untuk mendapatkan surat ijin pemasukan/pengeluaran hewan. Oleh karena itu perlu peningkatan koordinasi dengan Karantina Pertanian Balikpapan, Samarinda dan Karantina Daerah asal ternak.

Lalu lintas Hewan dan Produk ternak melalui darat menjadi tanggung jawab DPKH namun sarana prasarana untuk pengawasan peredaran hewan dan produk ternak masih sangat kurang, yaitu check point hanya ada 1 (satu) unit di Kec. Muara Komam sebagai unit pelaksana pengawasan untuk lalu lintas hewan dari Kalimantan Selatan sedangkan wilayah perbatasan dengan Kalimantan utara, Kalimantan tengah, belum tersedia check point.

Ancaman terhadap kejadian kasus penyakit hewan juga disebabkan karena kurangnya pengawasan terhadap peredaran obat hewan dan pelayanan kesehatan hewan belum optimal. Masih banyak terjadi kasus penolakan sampel obat hewan yang akan diperiksa disebabkan oleh komposisi dan klasifikasi obat hewan tidak sesuai yang didaftarkan, serta nomor registrasi sudah kadaluarsa.

Pelayanan kesehatan hewan masih kurang optimal hal ini disebabkan karena sumber daya, fasilitas, sarana dan prasarana sangat terbatas. Sumber daya meliputi tenaga medic dan paramedik, fasilitas seperti peralatan dan obat-obatan serta sarana dan prasarana klinik hewan milik pemerintah maupun swasta belum ada disetiap kecamatan.

Disamping pencegahan dan pemberantasan terhadap penyakit hewan menular, juga harus dilakukan penerapan dan replikasi program ISIKHNAS secara rutin dan berkala untuk menganalisis status kesehatan hewan.

UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet mempunyai fungsi pengawasan, pengamatan, pemantauan penyakit hewan yang bersifat zoonosis dan non zoonosis serta kualitas pangan asal hewan yang ada di 10 (sepuluh) wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.

Kemampuan diagnostik laboratorium dapat dilihat dari berbagai metode pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan di laboratorium, dengan tingkat ketelitian masing-masing pengujian dan sesuai dengan permintaan customer. Dalam menjalankan fungsinya, UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet melayani kegiatan laboratorium yaitu :

Penyidikan dan pengujian penyakit hewan (P2PH) meliputi Pengujian Serologi, Pengujian Virologi, Pengujian Parasitologi, Pengujianpatologi Anatomi.

Pelayanan Laboratorium Keswan dan Kesmavet memiliki keterbatasan jumlah sumber daya manusia (SDM) yang ada di UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet, maka perlu penambahan tenaga penguji dan peningkatan SDM melalui pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan laboratorium dan kemajuan teknologi yang ada. Prasarana dan sarana yang ada di UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet sebagai laboratorium type B telah memadai, namun adanya alat yang rusak maka diperlukan adanya perbaikan, perawatan dan pembelian alat yang baru. Seiring perkembangan teknologi diperlukan adanya upaya peningkatan kecanggihan peralatan yang ada guna efisiensi waktu, tenaga dan biaya untuk mempermudah pelayanan kepada konsumen sehingga konsumen puas terhadap pelayanan laboratorium dan hasil uji yang kredible, kepuasan konsumen adalah salah satu misi keberhasilan pelayanan dari UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet. Adanya peningkatan status penyakit hewan, merupakan cerminan keberhasilan upaya pengendalian dan pencegahan penyakit dalam mendukung kedaulatan kesehatan hewan dan daya saing produk peternakan.

f). Jaminan mutu dan keamanan pangan asal hewan belum optimal

Kesehatan Masyarakat Veteriner merupakan rantai penghubung antara Kesehatan hewan dan produk Hewan, kesehatan manusia, serta kesehatan lingkungan. Oleh karena itu penyelenggaraan kesehatan masyarakat veteriner menjadi bagian penting dari aktivitas masyarakat untuk melindungi kesehatan dan ketentraman batin masyarakat melalui penjaminan *higiene* dan sanitasi pada rantai produksi produk hewan, penjaminan produk hewan dalam hal kehalalan bagi yang dipersyaratkan, keamanan, kesehatan, dan keutuhan produk hewan, penerapan kesejahteraan hewan serta pengendalian dan penanggulangan zoonosis. Produk hewan yang aman yang berkualitas merupakan faktor

kunci untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk, sehingga produk hewan nasional dapat bersaing di pasar local maupun nasional. UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet melayani kegiatan laboratorium yaitu :

Penyidikan dan pengujian kualitas hasil peternakan (P2KHP) meliputi uji *Salmonella*, uji *E.coli*, uji *Staphylococcus*, uji *Colliform* , uji Total Plate Count (TPC).

Hasil uji penyakit hewan untuk penyakit zoonosis seperti brucellosis, pullorum dan avian influenza terdapat hasil positif, perlu adanya penyidikan dan penanganan lebih lanjut dari instansi terkait pada wilayah atau daerah yang terinfeksi penyakit-penyakit tersebut di Provinsi Kalimantan Timur.

Masih ditemukannya cemaran mikroba dengan jumlah mikroba diatas nilai ambang batas untuk uji kualitas hasil peternakan pada pengujian TPC, Salmonella, E. Coli, Colliform dan TPC dan masih ditemukannya pemalsuan daging sapi dengan daging babi. Perlu adanya upaya sosialisasi dan pembinaan tentang penanganan PAH pada produsen oleh instansi terkait di wilayah Kab./Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur.

- g). Peran swasta dan usaha peternakan rakyat belum optimal
Perusahaan swasta di Kalimantan Timur masih sedikit dan didominasi oleh perusahaan ayam pedaging. Perusahaan swasta yang menggeluti usaha ayam pedaging dalam jumlah besar baru 7 perusahaan, selebihnya yaitu perusahaan skala menengah dan kemitraan. Sedangkan untuk perusahaan penggemukan sapi dalam skala besar baru terdapat 1 di Kab. PPU. Peran swasta yang masih rendah ini dikarenakan tingginya biaya investasi peternakan di Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan untuk peternakan rakyat kesulitan mendapat modal untuk usaha dibidang peternakan. Perlu adanya sosialisasi/edukasi dan pembinaan terhadap peternakan rakyat terkait akses permodalan seperti KUR, AUTS, KTS, selain itu perlu peningkatan akses informasi tentang perizinan usaha peternakan agar investor mau berusaha di Kalimantan Timur.

- h). Kapasitas Kelembagaan dan Keterampilan Peternak masih rendah
Ada kecenderungan bahwa peternak tidak mempunyai kapasitas pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk dapat memahami permasalahan mereka, memikirkan permasalahannya, atau memilih pemecahan masalah yang paling tepat untuk mencapai

tujuan mereka. Kemungkinan yang terjadi selanjutnya adalah pengetahuan mereka berdasarkan kepada informasi yang keliru karena kurangnya pengalaman, pendidikan, atau faktor nilai budaya yang ada. Terbatasnya pengetahuan, sikap dan keterampilan petani, akan sangat berpengaruh terhadap kemampuan untuk berternak yang lebih baik. Sehingga kualitas, kuantitas produksi peternakan tidak optimal. Hal tersebut ditandai dengan populasi dan produktifitas komoditas peternakan yang belum mencukupi ketersediaan dan keamanan pangan. Oleh karena itu perlunya dilakukan pembinaan terhap peternak maupun petugas lapangan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan peternak maupun petugas agar dapat meningkatkan usaha dibidang peternakan. Selain itu memberikan informasi dan teknologi dalam budidaya peternakan secara continue.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur

Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023.

VISI :

Pasangan Dr. Ir. H. Israan Noor, M.Si dan H. Hadi Mulyadi, S.Si, M.Si selaku Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Periode 2018-2023 memiliki tekad, komitmen dan keberanian untuk mewujudkan Kalimantan Timur yang berdaulat, dengan merumuskan Visi yaitu:

“Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat”

Penjabaran dari visi dimaksud bahwa Pemerintahan Kalimantan Timur harus memiliki kemandirian, kemandirian dan daya saing untuk mengatur dan mengelola sumber daya daerahnya secara otonom untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan rakyat.

BERDAULAT memiliki arti berbahagia, bertuah menurut kamus besar Bahasa Indonesia. BERDAULAT dapat memiliki arti berhak, otonom, swapraja, berkuasa menurut thesaurus on-line. Selain makna/arti yang positif atas kata BERDAULAT, menyatakan kondisi/keadaan akhir pembangunan yang digambarkan oleh gabungan sifat tujuan pembangunan yang meliputi **Berdikari, SejahtERa, DAmai, unggUL, dan kuAT**.

MISI :

Untuk mewujudkan visi “Berani Untuk Kalimantan Timur Yang Berdaulat” maka dirumuskan misi sebagai berikut:

Misi Pertama:

Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.

Misi Kedua:

Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.

Misi Ketiga:

Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan

Misi Keempat:

Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkedaulatan

Misi Kelima:

Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, professional dan berorientasi pelayanan publik.

Untuk mendukung misi kedua maka ada beberapa faktor penghambat dan pendorong sebagai berikut :

Tabel 3.3. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Misi/Program	Penghambat	Pendorong
<p>Misi ke dua : Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.</p> <p>Program unggulan ke tujuh belas : Pengembangan lahan pertanian, perkebunan dan peternakan baru pada lahan kritis untuk rakyat.</p>	<p>a. Populasi dan produktivitas ternak masih rendah</p> <p>b. Produksi dan produktivitas Hijauan Pakan Ternak masih rendah</p> <p>c. Pengembangan Kawasan Peternakan belum optimal</p> <p>d. Pencegahan dan pemberantasan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) belum maksimal</p> <p>e. Jaminan mutu dan keamanan pangan asal hewan belum optimal</p> <p>f. Peran swasta dan usaha peternakan rakyat belum optimal</p>	<p>a. Organisasi Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berdiri sendiri berdasarkan PERDA Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016.</p> <p>b. Integrasi usaha perkebunan kelapa sawit dengan usaha budi daya sapi potong Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 105/Permentan/pd.300/8/2014</p> <p>c. Tersedianya lahan eks tambang yang telah direklamasi dan revegetasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tmur Nomor 06 Tahun 2018 tentang pengendalian pemotongan betina produktif.</p>

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kaltim

3.3 Telaah Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

A. Renstra Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI

Visi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan jangka panjang dirumuskan sebagai berikut :” *Terwujudnya peternakan indonesia yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam mewujudkan pertanian Indonesia maju, mandiri dan modern*”.

Untuk mewujudkan visi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketersediaan bibit/benih ternak yang berkualitas dan berkelanjutan.
Bibit dan benih ternak merupakan bagian yang sangat penting dalam pengembangan peternakan. Dari bibit/benih ternak yang berkualitas akan dihasilkan produk

peternakan yang efisien dan berdaya saing. Pengembangan benih dan bibit ternak yang berkualitas harus mampu dihasilkan secara berkelanjutan berdasarkan potensi sumberdaya lokal ternak yang dimiliki. Keragaman sumber daya lokal ternak yang merupakan kekuatan yang harus mampu dimanfaatkan sebagai penghasil bibit dan benih ternak yang berkualitas untuk menghasilkan produk peternakan yang efisien dan berdaya saing.

2. Meningkatkan ketersediaan pakan yang berkualitas secara berkelanjutan

Pakan merupakan komponen biaya terbesar dalam usaha peternakan baik pembibitan, pengembangbiakan maupun penggemukan. Untuk menghasilkan pakan yang berkelanjutan penggunaan bahan pakan lokal maupun biomassa ikutan dari hasil tanaman yang ada disekitar. Bahan pakan lokal yang tersedia baik berupa hijauan pakan unggul, biji-bijian dan produk ikutan dari industri belum dimanfaatkan secara optimal. Pengembangan dan penyediaan benih/bibit unggul, pemanfaatan bahan lokal spesifik lokasi, dan pemanfaatan teknologi pakan merupakan faktor penentu dalam mencapai hasil dan efisiensi produksi.

3. Mewujudkan kesehatan hewan dalam rangka meningkatkan produktivitas ternak dan mendukung kesehatan masyarakat.

Kesehatan hewan merupakan komponen yang penting pada usaha peternakan dalam menghasilkan produk disamping juga mempengaruhi pada kesehatan masyarakat di sekitarnya. Penyelenggaraan kesehatan hewan dilaksanakan secara terpadu dengan aktivitas yang lain dalam pemeliharaan ternak sehingga mampu meningkatkan performa dan produktivitas ternak, melalui pengendalian, pencegahan dan pengobatan yang dilakukan secara terjadwal dan berkelanjutan. Disamping itu kewaspadaan terhadap masuknya penyakit dari luar yang bersifat emerging dan reemerging diseases melalui arus perdagangan ternak antar pulau, antar wilayah maupun antar negara. Adanya peningkatan status penyakit hewan, merupakan cerminan keberhasilan upaya pengendalian dan pencegahan penyakit dalam mendukung kedaulatan kesehatan hewan dan daya saing produk peternakan.

4. Meningkatkan keamanan dan mutu produk hewan serta kesehatan masyarakat. Kesehatan Masyarakat Veteriner merupakan rantai penghubung antara kesehatan hewan dan produk Hewan, kesehatan manusia, serta kesehatan lingkungan. Oleh karena itu penyelenggaraan kesehatan masyarakat veteriner menjadi bagian penting dari aktivitas masyarakat untuk melindungi kesehatan dan ketentraman batin masyarakat melalui penjaminan higiene dan sanitasi padarantai produksi produk hewan, penjaminan produk hewan dalam hal kehalalan bagi yang dipersyaratkan, keamanan, kesehatan, dan keutuhan produk hewan, penerapan kesejahteraan hewan sertap engendalian dan penanggulangan zoonosis. Produk hewan yang aman yang berkualitas merupakan faktor kunci untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk, sehingga produk hewan nasional dapat bersaing di pasar internasional.

5. Meningkatkan usaha peternakan, pengolahan dan pemasaran produk peternakan berdaya saing
Potensi basis komoditas dan produk unggulan sub sektor peternakan harus dikelola menjadi keunggulan kompetitif untuk memenuhi pasar dalam negeri dan luar negeri. Daya saing sub sektor peternakan, merupakan kemampuan dalam menghasilkan komoditas yang dapat memenuhi kebutuhan baik nasional maupun internasional. Setidaknya ada beberapa langkah besar untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk peternakan Indonesia, antarlain melalui: peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan peternak, pengembangan sektor komplemen peternakan (agroindustri, penyediaan kredit, teknologi melalui penyuluhan, dan pasar); perbaikan sistem logistik, dan penyediaan informasi dan data, pengembangan inovasi dan teknologi, serta perluasan jaringan pada pasar untuk peternak.

6. Menerapkan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Peternakandan Kesehatan Hewan menuju birokrasi professional dan modern.
Reformasi birokrasi akan dilakukan secara terus menerus sesuai dengan dinamika perkembangan organisasi. Pengembangan reformasi birokrasi yang efektif dan profesional, baik dalam aspek sumber daya manusia, kelembagaan maupun tata kelola akan mendorong kinerja organisasi semakin lebih baik.

Pernyataan visi dan misi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI memberikan arahan bagi seluruh daerah (Provinsi/kabupaten/kota) di dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur, yaitu:

1. Menyelenggarakan dan menggerakkan pengembangan pengembangan perbibitan, pakan, budidaya ternak, kesehatan hewan, serta kesehatan masyarakat veteriner dan pascapanen dalam mencapai penyediaan dan keamanan pangan hewani dalam rangka meningkatkan kesejahteraan peternak
2. Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Tabel 3.4. Indikator Sasaran dan Target Renstra Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024

PKH... X

Tabel 2. 2 Sasaran Program dan Indikat

Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	Baseline 2019	2024
SP1. Meningkatnya ketersediaan pangan asal ternak		
Peningkatan Produksi daging (%)	4.480,8 ribu ton	0,4
Peningkatan Produksi susu (%)	994,54 ribu ton	2,5
Peningkatan Produksi telur (ribu ton)	5.355,62 ribu ton	2,8
SP2. Meningkatnya daya saing komoditas peternakan		
Pertumbuhan nilai ekspor untuk produk peternakan dan kesehatan hewan (%)	US\$ 744,3 ribu	15
SP3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan asal ternak		
Persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan (%)	80	81,5
SP4. Tersedianya sarana prasarana peternakan yang terpadu		
Tingkat pemanfaatan sarana prasarana peternakan (%)		85
SP5. Meningkatnya luas wilayah yang terbebas dari penyakit		
Persentase wilayah yang terkontrol dari penyakit hewan menular strategis (%)	80	80
SP6. Terkendalinya kasus zoonosis pada manusia		
Jumlah maksimal kasus zoonosis yang terjadi penularan kepada manusia (kasus)	122	122
SP7. Terwujudnya Birokrasi Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan		

Sumber: Renstra Ditjen PKH

Tabel 3. 5. Telaahan Renstra Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024

No	Sasaran Jangka Menengah	Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya ketersediaan pangan asal ternak.	a. Populasi dan Produktivitas ternak/pakan rendah	a. Ketersediaan lahan eks tambang, integrasi sapi sawit, dan lahan perhutanan social
2	Meningkatnya daya saing komoditas peternakan dan kesehatan hewan.	b. Daya saing produk peternakan masih rendah	b. Teknologi peternakan yang sudah cukup maju dan modern
3	Terjaminnya keamanan mutu pangan asal ternak	c. Kawasan Peternakan belum optimal	c. Sumber daya peternakan yang cukup tersedia (keragaman genetik ternak, dan ragam pangan olahan)
4	Tersedianya sarana peternakan yang sesuai kebutuhan	d. Kaltim belum bebas dari Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	d. Sinergi dan dukungan peternak, akademisi dan pemerintah yang tersedia
5	Meningkatnya luas wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis	e. Jaminan mutu dan keamanan pangan asal hewan belum optimal	e. Pangsa Pasar produk peternakan meningkat
6	Terkendalinya kasus zoonosis pada manusia	f. Peran swasta dan usaha peternakan rakyat belum optimal	f. Kesadaran global tentang keamanan pangan (<i>food safety</i>), <i>bio security</i> dan kesejahteraan hewan
7		g. Kapasitas Kelembagaan dan Keterampilan Peternak masih rendah	g. Tersedianya sarana pelatihan bagi SDM peternakan

B. Renstra Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI

Adapun Visi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian periode 2020-2024 adalah *“Prasarana dan Sarana Pertanian berkualitas dan berkesinambungan yang dimanfaatkan dalam meningkatkan indeks pertanaman (IP) dan luas panen”*

Untuk mencapai Visi tersebut Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian mengemban Misi sebagai berikut :

1. Optimasi pemanfaatan alsintan pra panen untuk pembangunan pertanian berbasis kewilayahan

Misi ini menekankan pada pemanfaatan alsintan untuk seluruh komoditas pertanian yang merata sesuai dengan kawasan pertanian nasional. Hal ini merujuk pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani. Optimasi pemanfaatan Alsintan merujuk pada pembangunan pertanian berbasis kewilayahan untuk komoditas prioritas nasional tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

2. Memberikan akses air berkualitas dari berbagai sumber untuk seluruh lahan pertanian

Misi ini menjelaskan terkait penyediaan akses jaringan irigasi pertanian untuk seluruh komoditas pertanian secara efektif dan efisien. Salah satu langkah konkret yang akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian misi ini adalah dengan melakukan modernisasi dan rehabilitasi jaringan irigasi pertanian untuk memastikan seluruh lahan pertanian mendapatkan akses irigasi pertanian. Dengan ini, diharapkan masalah terkait minimnya sumber air untuk lahan pertanian dapat teratasi.

3. Mengendalikan kualitas pupuk dan pestisida terstandar secara efektif dan efisien

Misi ini menitikberatkan kepada pengendalian pupuk dan pestisida dalam rangka peningkatan produktivitas pertanian. Pengendalian yang dimaksud meliputi penyediaan, pendaftaran serta pengawasan pupuk dan pestisida. Penyediaan yang dimaksud adalah memastikan ketersediaan pupuk dan pestisida. Pendaftaran yang dimaksud adalah pengelolaan pendaftaran formulasi pupuk dan pestisida yang beredar. Pengawasan dilakukan untuk menjamin mutu pupuk dan pestisida beredar.

4. Meningkatkan Akses Pembiayaan petani dan perlindungan usaha pertanian

Misi ini berfokus pada peningkatan akses serta pemanfaatan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian. Secara konkret, Direktorat Jenderal Prasarana dan

Sarana Pertanian akan melebarkan cakupan pembiayaan dan perlindungan petani untuk seluruh komoditas pertanian. Pembiayaan pertanian ke depan diharapkan tidak hanya bersumber dari APBN, namun juga dari sektor lainnya. Sementara perlindungan, akan mengalami pengembangan lebih lanjut dengan cakupan asuransi pertanian yang lebih luas, tidak hanya fokus pada komoditas padi. Dengan demikian, permasalahan finansial yang dihadapi oleh para petani dalam mencari modal usaha pertanian dapat diminimalisir.

5. Menyediakan dan melindungi lahan pertanian secara konsisten dan berkelanjutan

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian memastikan ketersediaan lahan pertanian secara berkelanjutan untuk semua komoditas pertanian yang menjadi prioritas. Penyediaan lahan mengacu pada kebutuhan lahan pertanian untuk mendukung target produksi nasional. Sedangkan perlindungan lahan pertanian, mengacu pada target perluasan lahan pertanian dalam rangka meminimalisir terjadinya alih fungsi lahan pertanian.

6. Implementasi reformasi birokrasi dalam mewujudkan birokrasi yang profesional dan berintegritas

Implementasi reformasi birokrasi merupakan amanah yang wajib dilaksanakan oleh setiap Kementerian/Lembaga. Reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dilaksanakan mengacu dengan road map Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian. Dengan demikian, target pencapaian road map Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dapat tercapai.

Pernyataan visi dan misi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI memberikan arahan bagi seluruh daerah (Provinsi/kabupaten/kota) di dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang prasarana dan sarana pertanian. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur, yaitu:

- a. Mendorong partisipasi para pemangku kepentingan dalam pengembangan dan pengelolaan lahan dan air secara efektif dan efisien untuk kegiatan peternakan.
- b. Mewujudkan dan mengembangkan sistem pembiayaan usaha peternakan yang mudah di akses peternak.
- c. Mewujudkan sistem manajemen dan administrasi pembangunan prasarana dan sarana peternakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Tabel 3.6. Indikator Sasaran dan Target Renstra Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024

*Tabel 8. Kerangka Kinerja Direktorat Jenderal P
2020-2024*

Sasaran Program		Indikator Kinerja Sasaran Program		Sat
1	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian yang Sesuai Kebutuhan	1	Indeks Ketersediaan Prasarana Pertanian yang Sesuai Peruntukkan	%
		2	Indeks Ketersediaan Sarana Pertanian yang Sesuai	%

Sasaran Program		Indikator Kinerja Sasaran Program		Sat
Efektif	dan	Tingkat		

Sumber : Renstra Ditjen PSP

Tabel 3.7. Telaahan Renstra Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024

No	Sasaran Jangka Menengah	Penghambat	Pendorong
1	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian yang Sesuai Kebutuhan	a. Tidak tersedianya sumber air	a. Berkembangnya usaha peternakan
		b. Tingginya biaya operasional pemanfaatan Pompa	b. Rencana pengembangan mini ranch
		c. Lokasi lahan sulit dijangkau, dengan kemiringan yang cukup tinggi	c. Pengembangan Hijauan Pakan Ternak

Sumber: Renstra Ditjen PSP

C. Keterkaitan RENSTRA Kabupaten/Kota

Dengan terbitnya UU 23 Tahun 2015 maka terjadi perubahan organisasi perangkat daerah Kabupaten/ Kota, sebagian besar perangkat daerah lingkup pertanian yang ada dimerger menjadi satu, bahkan ada yang digabung dengan kehutanan, lingkungan hidup dan ketahanan pangan.

Visi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2018 sudah menjadi acuan, namun RENSTRA 2018-2023 belum menjadi acuan karena pemilihan kepala daerah Kabupaten/ Kota lebih dahulu dilaksanakan, sehingga keterkaitan dengan renstra Kabupaten/Kota masih dengan Renstra dengan periode sebelumnya seperti :

1. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau memiliki tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan, untuk mencapai visi dan melaksanakan misi pemerintahan daerah Tahun 2016 – 2021 :“ Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pertanian ”
2. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki tujuan dan sasaran renstra, untuk mencapai visi dan melaksanakan misi pemerintahan daerah Tahun 2016 – 2021 : Meningkatkan Produktivitas, tata kelola dan pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas dan meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura

3. Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur dengan Visi Tahun 2016 – 2021 :
“Terwujudnya Pembangunan Agribisnis Pertanian Menuju Kutai Timur Mandiri”.
4. Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Visi Tahun 2019 – 2023
: “Mewujudkan Swasembada dan Ketahanan Pangan Yang Berkelanjutan Menuju Masyarakat Penajam Paser Utara Yang Sejahtera, Berkualitas dan Berdaya Saing”
5. **Dinas Pertanian Kota Samarinda dengan Visi Tahun 2016 – 2021 :
"Terwujudnya Pertanian Maju, Mandiri dan Berwawasan Lingkungan"**
6. **Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan dengan Visi Tahun 2016 – 2021 : “Terwujudnya Ketersediaan Pangan dan Kesejahteraan Petani dan Nelayan Melalui Pemanfaatan Sumber Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan yang Seinergis dan Berkelanjutan”.**
7. **Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Barat dengan Visi Tahun 2016 – 2021 :
“Terwujudnya Optimalisasi Potensi Pertanian dan Perikanan Meningkatkan Kesejahteraan Petani”.**
8. Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang memiliki tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan, untuk mencapai visi dan melaksanakan misi pemerintahan daerah Tahun 2016 – 2021 : 1) Meningkatkan pemenuh kebutuhan pangan masyarakat berbasis sumber daya lokal, 2) Meningkatkan kinerja perikanan tangkap dan budidaya serta nilai tambah industri perikanan, 3) Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dan peternakan.
9. Dinas Pertanian Kabupaten Paser Tahun 2017-2021 adalah “Terwujudnya Pertanian, Perkebunan Dan Peternakan Yang Tangguh Berwawasan Agribisnis”.
10. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2016-2021 adalah “Terwujudnya Pembangunan Pertanian yang terarah, berkesinambungan didasarkan pada keunggulan kompetitif wilayah dan kearifan lokal dalam pengembangan ekonomi kerakyatan.”

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (ASPEK kinerja dari SDGs)

Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau memiliki tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan, untuk mencapai visi dan melaksanakan misi pemerintahan daerah Tahun 2016 – 2021 :“ Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Pertanian ”.

A. Rencana Tata Ruang Wilayah

Belum adanya kawasan atau lahan khusus pengembangan peternakan dipandang sebagai salah satu faktor belum tercapainya swasembada daging sapi dan kerbau di Kaltim. Sebab, upaya percepatan mewujudkan swasembada daging dengan pengembangan peternakan skala besar bergantung pada lahan potensial sebagai lokasi pengembangan yang tentu berpengaruh terhadap ketersediaan pakan di lahan tersebut.

Pengembangan kawasan peternakan dan Kesehatan Hewan secara nasional terbagi menjadi 3 kawasan yaitu :

1. Kawasan khusus padang penggembalaan termasuk di dalamnya lahan eks tambang. Wilayah pengembangannya terdapat di NTT, NTB, Pulau Irian dan khusus lahan eks tambang di Kaltim
2. Kawasan daerah padat penduduk terbagi menjadi 2 yaitu :
 - a. Intensif umumnya di wilayah pengembangan peternakan dengan lokasi terbatas pada umumnya di wilayah Pulau Jawa dan Bali
 - b. Kawasan integrasi ternak-tanaman :
Pada umumnya pengembangan peternakan berada di wilayah pertanian tanaman pangan seperti padi, singkong, jagung dan lain-lain.
3. Kawasan Integrasi ternak-tanaman perkebunan
Pada umumnya di wilayah Kalimantan dan Sumatera yang terdiri atas :
 - a) Integrasi sapi-sawit :
Semua kawasan pengembangan sapi potong di Kalimantan Timur termasuk di dalam integrasi sapi-sawit.
 - b) Integrasi sapi dengan tanaman perkebunan lainnya
Pada umumnya tanaman perkebunan lainnya seperti kakao, karet, kelapa dan lain-lain.

Mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 830/Kpts/RC.040/12/2016, maka pola pengembangan peternakan diarahkan pada pengembangan kawasan baik kawasan yang sudah ada maupun kawasan baru yang potensial di Provinsi Kalimantan Timur. Kawasan pengembangan sapi potong dengan pola integrasi terdiri atas :

- a. Kabupaten Berau
- b. Kutai Kartanegara
- c. Kutai Timur
- d. Paser
- e. Penajam Paser Utara

Di samping komoditas strategis nasional yaitu sapi potong dikembangkan pula kawasan komoditas unggulan sebagai berikut :

- a. Kawasan pengembangan ternak kerbau di Kutai Kartanegara
- b. Kawasan pengembangan ternak babi di Kutai Barat
- c. Kawasan pengembangan ayam Buras di Kota Samarinda

Kawasan industri tanaman pangan berlokasi di PPU dan Paser yang terletak di bagian Selatan Kaltim sebagai *hinterland* Kota Balikpapan. Sementara itu, sektor peternakan juga baik dikembangkan di wilayah tersebut. Penajam Paser Utara (PPU) fokus pada pengembangan unggas di Kecamatan Penajam dan Babulu, Sapi Brahma dan Sapi Bali di Kecamatan Sepaku serta Rusa Api-api di Kecamatan Waru. PPU dan Paser diprediksi akan menjadi pusat industri penghasil produk pangan di Kaltim.

Program pengembangan ternak sapi melalui pemanfaatan lahan eks tambang dimaksudkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan mengambil nilai lebih dari lokasi eks tambang yang rata-rata tidak subur lagi. Dengan pembangunan kawasan integrasi ternak-tambang ini diharapkan tanah yang strukturnya telah rusak dapat kembali subur dengan penggunaan pupuk kandang hasil kotoran ternak. Selain itu, pemanfaatan lahan eks tambang telah dilakukan pemerintah dengan dukungan perusahaan, selaku pemilik lahan dengan memberdayakan masyarakat sekitar. Di antara daerah yang paling banyak lahan eks tambang batubara adalah di Kabupaten

Kutai Kartanegara. Selain itu, akan dikembangkan juga di Paser, Kutim, Berau dan Samarinda.

B. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Grand Strategi Pembangunan Ekonomi Kaltim adalah Menuju Pembangunan Berkeadilan dan Berkelanjutan dengan 2 (dua) Strategi Utama, yaitu: Mengembangkan Industri Eksisting (Minyak, Pupuk, Gas, CPO, Batubara), dan Membangun Industri Berbasis Pertanian dengan Pendekatan Skala Ekonomi dan Cluster. Kalimantan Timur telah menetapkan strategi pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan sebagai strategi holistik dimana pertumbuhan ekonomi dan penurunan emisi berjalan beriringan. Arah pembangunan ekonomi Kaltim saat ini masih dalam masa transisi dari ekonomi industri eksisting menuju industri berbasis pertanian.

Strategi Pembangunan Kaltim kedepan diarahkan pada pro-growth, pro job, pro poor dan pro environment, dimana pemerintah Prov. Kaltim akan mengawal keberlanjutan pembangunan melalui strategi pembangunan berwawasan lingkungan, untuk menuju Kaltim sebagai pusat agroindustri dengan energi ramah lingkungan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi emisi. Strategi Green Growth, sendiri adalah dengan: Mengembangkan sektor rendah karbon dan bernilai tambah tinggi, dan Mengurangi emisi karbon.

Indonesia sebagai negara agraris yang beriklim tropis memiliki sumber daya pertanian dan peternakan yang cukup besar. Sumber daya tersebut, selain digunakan untuk kebutuhan pangan juga dapat berpotensi sebagai sumber energi dengan cara pemanfaatan kotoran ternak menjadi biogas. Kalimantan Timur melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi telah memanfaatkan kotoran ternak sebagai sumber energi alternatif yang dapat mengurangi jumlah gas metana di udara. Hingga tahun 20120 sudah ada 572 unit biogas yang telah dibangun.

Selain itu, pemanfaatan kotoran ternak sebagai sumber pupuk organik sangat mendukung usaha pertanian tanaman sayuran, salak dan tanaman perkebunan (kelapa sawit). Dari sekian banyak kotoran ternak yang terdapat di daerah sentra produksi

ternak banyak yang belum dimanfaatkan secara optimal, sebagian di antaranya terbuang begitu saja, sehingga sering merusak lingkungan yang akibatnya akan menghasilkan bau yang tidak sedap.

Biogas memberikan solusi terhadap masalah penyediaan energi dengan murah dan tidak mencemari lingkungan. Cara ini efektif untuk mengurangi gas metana yang terdapat pada feses ternak. Pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan karbondioksida (CO₂) yang ikut memberikan kontribusi bagi efek rumah kaca (*Green House Effect*) yang bermuara pada pemanasan global (*Global Warming*). Pengembangan peternakan melalui pola miniranch yang terdiri dari 130 ekor sapi (50 ekor induk dan 80 ekor anak sapi) hanya menghasilkan 80 ton Carbon. Sedangkan dalam area miniranch (padang penggembalaan) 150 Ha dapat mengurangi gas Carbon sebesar 500 ton, sehingga miniranch tidak menghasilkan gas methane, namun bisa mengurangi polusi gas methane sebesar 420 ton.

Biogas memberikan perlawanan terhadap efek rumah kaca melalui 3 cara. *Pertama*, Biogas memberikan substitusi atau pengganti dari bahan bakar fosil untuk penerangan, kelistrikan, memasak dan pemanasan. *Kedua*, metana (CH₄) yang dihasilkan secara alami oleh kotoran yang menumpuk merupakan gas penyumbang terbesar pada efek rumah kaca, bahkan lebih besar dibandingkan CO₂. Pembakaran metana pada Biogas mengubahnya menjadi CO₂ sehingga mengurangi jumlah metana di udara. *Ketiga*, dengan lestarnya hutan, maka CO₂ yang ada di udara akan diserap oleh hutan yang menghasilkan oksigen yang melawan efek rumah kaca.

Pengelolaan sumber daya alam oleh pemerintah daerah di kawasan perdesaan, khususnya lahan dan air, menyokong ketahanan pangan untuk wilayah sekitarnya kemiskinan, dan karenanya membutuhkan berbagai tanggapan yang terkoordinasi. Pemerintah daerah dapat mendukung produksi pertanian dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan memperkuat pasar dan infrastruktur transportasi demi memajukan rantai pangan lokal. Di kawasan perkotaan, pemerintah daerah harus memastikan bahwa masyarakat mampu membeli dan memasak makanan yang aman, terjangkau dan bergizi. Perencanaan kota memiliki andil yang besar dalam pengurangan limbah

dan ketahanan pangan dengan memfasilitasi pengangkutan dan penyimpanan makanan yang efektif, akses terhadap air bersih dan sanitasi. Pemerintah daerah dapat menggunakan sekolah dan layanan kesehatan untuk mengidentifikasi dan mengatasi malnutrisi pada anak. Pemerintah daerah kawasan perdesaan dapat mengelola sumber daya kolektif dan memperbaiki kepemilikan tanah agar mampu melindungi hak-hak kelompok masyarakat miskin.

Dalam hal ini yang tercakup dalam hal tersebut yang berkaitan dengan pemerintah daerah dengan tujuan, target dan indikator yang terkait dengan upaya pencapaian Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) bidang pertanian dalam arti luas meliputi;

- Pada tahun 2030, MENGAKHIRI KELAPARAN dan menjamin akses terhadap kualitas pangan yang baik bagi seluruh rakyat, khususnya mereka yang miskin dan berada dalam situasi rentan, sepanjang tahun
- pada tahun 2030, MENGAKHIRI SEGALA BENTUK MALNUTRISI, termasuk mencapai target-target yang telah disepakati secara internasional mengenai pertumbuhan balita serta menguraikan kebutuhan gizi untuk remaja putri, ibu hamil dan menyusui, dan manula
- pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan PRODUSEN MAKANAN BERSKALA MIKRO, khususnya perempuan, masyarakat adat, pertanian keluarga, peternak dan nelayan, termasuk melalui AKSES YANG TERJAMIN DAN SETARA terhadap tanah, sumberdaya produksi lainnya, PENGETAHUAN, layanan finansial, PASAR dan kesempatan untuk mendapatkan nilai tambah serta lapangan pekerjaan non-pertanian.

Indikator TPB/SDGs yang relevan dengan pelayanan Disnak Keswan dalam rangka pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 3.8 Matriks TPB/SDGs yang Relevan dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Tujuan Global	Sasaran Global	Indikator
1. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta ,meningkatkan pertanian berkelanjutan.	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment).

Sumber: Lampiran Perpres Nomor 59 Tahun 2017

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Faktor - faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factors*) merupakan faktor yang sangat penting dalam penetapan keberhasilan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini disebabkan faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut akan membimbing dan mengarahkan organisasi dalam menetapkan tujuan, sasaran dan aktivitas kegiatan.

Dalam menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan ini akan terkait dengan Analisis Lingkungan Internal dan Analisis Lingkungan Eksternal. Untuk itu perlu mengenal kondisi internal organisasi yang sifatnya dapat dikuasai (*controllable*) yang berguna untuk mengetahui faktor kekuatan dan kelemahan serta kondisi eksternal yang sifatnya relatif kurang dikuasai (*uncontrollable*) yang berguna untuk mengetahui peluang dan ancaman, dengan menggunakan pendekatan analisis *Strength* (kekuatan), *Weakness* (kelemahan), *Opportunity* (peluang) dan *Threat* (ancaman) atau SWOT. Analisis SWOT ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritas.

Dengan pencermatan terhadap lingkungan internal dan eksternal dapat diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, yaitu:

1. Kekuatan (Strength)

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor internal, teridentifikasi beberapa kekuatan yang dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, antara lain:

- 1). Organisasi Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berdiri sendiri berdasarkan PERDA Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016.
- 2). Regulasi Pemerintah Provinsi tentang peternakan dan kesehatan hewan'
- 3). Tersedianya akses antara pusat dan provinsi
- 4). Dukungan kerjasama dan koordinasi antar instansi terkait yang baik

2. Kelemahan (Weakness)

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur masih dijumpai beberapa kelemahan internal baik di dalam kelembagaan dinas maupun secara teknis di lapangan. Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor internal, teridentifikasi beberapa kelemahan yang dapat ditekan seminimal mungkin, antara lain :

1. Populasi dan produktivitas ternak masih rendah
2. Produksi dan produktivitas Hijauan Pakan Ternak masih rendah
3. Pengembangan Kawasan Peternakan belum optimal
4. Pencegahan dan pemberantasan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) belum maksimal
5. Jaminan mutu dan keamanan pangan asal hewan belum optimal
6. Peran swasta dan usaha peternakan rakyat belum optimal

7. Peluang (Opportunity)

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor eksternal, teridentifikasi beberapa peluang yang perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam membuat strategi dan kebijakan pembangunan peternakan, antara lain :

- 1). Meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap produk peternakan (daging,telur) yang ASUH.
- 2). Tersedianya lahan eks tambang, perkebunan sawit, dan perhutanan sosial
- 3). Berkembangnya teknologi peternakan tepat guna.

- 4). Fasilitas Kredit Ternak Sejahtera (KTS) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS).

4. Ancaman (Threats)

Di samping peluang yang ada, faktor eksternal yang merupakan ancaman bagi pembangunan peternakan juga perlu diantisipasi dalam penyusunan strategi dan kebijakan lima tahun ke depan, diantaranya :

- 1). Lalu lintas hewan/ ternak dan produk peternakan.
- 2). Kejadian/ kasus penyakit hewan menular strategis (PHMS)
- 3). Kejadian/kasus pencemaran produk peternakan
- 4). Daya saing produk peternakan masih rendah
- 5). Kapasitas kelembagaan dan keterampilan peternak masih rendah

Adapun analisis SWOT Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada Tabel 3.6 berikut.

Tabel.3.9. Analisis SWOT Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

FAKTOR	Streight (Kelebihan)	Weakness (Kelemahan)
<p style="text-align: center;">Internal</p> <p style="text-align: center;">Exteranal</p>	1. Organisasi Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri sendiri	1. Populasi dan produktivitas ternak masih rendah
	2. Regulasi Pemerintah Provinsi tentang peternakan dan kesehatan hewan	2. Produksi dan produktivitas Hewan Pakan Ternak masih rendah
	3. Tersedianya akses antara pusat dan provinsi	3. Pengembangan Kawasan Peternakan belum optimal
	4. Dukungan kerjasama dan koordinasi antar instansi terkait yang baik	4. Pencegahan dan pemberantasan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) belum maksimal
		5. Jaminan mutu dan keamanan pangan asal hewan belum optimal
		6. Peran swasta dan usaha peternakan rakyat belum optimal
Opportunity (Peluang)	Strategi S - O	Strategi W - O
1. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk peternakan (daging dan telur) yang ASUH	- Peningkatan Produksi Pangan Asal Hewan yang Aman, Sehat Utuh dan Halal (ASUH) melalui peningkatan pengawasan dan pembinaan pelaku usaha	- Peningkatan populasi dan produktivitas ternak melalui penerapan teknologi peternakan dan penyebaran ternak indukan bibit
2. Tersedianya lahan eks tambang perkebunan sawit, dan pertumbuhan sosial	- Peningkatan akses perizinan usaha peternakan di lahan eks tambang, perkebunan sawit, dan pertanaman	- Peningkatan Produksi dan produktivitas Hewan Pakan Ternak melalui penerapan teknologi peternakan dan penyebaran bibit benih pakan ternak
3. Berkembangnya teknologi peternakan tepat guna		- Peningkatan Pengembangan Kawasan Peternakan khususnya miniranch dengan memanfaatkan lahan eks tambang, integrasi sapi sawit, dan pemanfaatan pertumbuhan sosial
4. Fasilitas Kredit Ternak Sajahtera (KTS) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi		- Peningkatan Peran swasta dan usaha peternakan rakyat dengan memanfaatkan fasilitas Kredit Ternak Sajahtera (KTS) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi
Threats (Ancaman)	Strategi S - T	Strategi W - T
1. Laju lintas Hewan Ternak dan Produk Peternakan	- Peningkatan Daya Saing produk peternakan melalui pengembangan usaha pengolahan hasil peternakan, promosi, dan pemasaran	- Peningkatan status kesewa melalui pengaturan lalu lintas ternak/hewan, pencegahan, pemberantasan penyakit hewan menular dan peningkatan pelayanan kawasan
2. Kejadian kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Keterampilan Peternak melalui pembinaan dan pelatihan teknis manajerial bidang peternakan	- Peningkatan Jaminan mutu dan keamanan pangan asal hewan melalui pengawasan produk peternakan
3. Kejadian kasus pencemaran Produk Peternakan		
4. Daya saing produk peternakan masih rendah		
5. Kapasitas Kelembagaan dan Keterampilan Peternak masih rendah		

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kaltim

Berdasarkan strategi-strategi di atas ditentukan strategi yang tepat untuk menjadi kunci keberhasilan dengan mempertimbangkan keterkaitan strategi dengan visi dan misi. Berdasarkan penilaian terhadap keterkaitan tersebut diperoleh strategi yang merupakan faktor kunci/penentu keberhasilan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur dalam membangun peternakan, yaitu :

1. Pengembangan Kawasan peternakan sapi potong (mini ranch)
2. Peningkatan populasi dan produktivitas ternak
3. Peningkatan produksi dan produktivitas pakan ternak
4. Peningkatan daya saing produk peternakan.
5. Peningkatan status kesehatan hewan dan pengawasan lalu lintas hewan/ternak
6. Penguatan pelayanan laboratorium keswan dan kesmavet
7. Peningkatan Jaminan mutu dan keamanan pangan asal hewan
8. Peningkatan peran swasta dan penguatan usaha peternakan rakyat
9. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Keterampilan Peternak
10. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

Dalam mengantisipasi tantangan ke depan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur sebagai organisasi yang berada dalam jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur perlu secara terus menerus mengembangkan kekuatan dan meminimalkan kelemahan dalam rangka memanfaatkan peluang dan menghadapi ancaman dengan membuat terobosan-terobosan baru, sesuai hasil analisis SWOT yang dijabarkan pada bab terdahulu.

Sehubungan dengan itu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur harus mempunyai Motto sebagai cara pandang jauh ke depan terhadap sasaran dan tujuan yang akan dicapai agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif.

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2019-2023

“Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat”

Visi tersebut mengandung makna bahwa pemerintahan Kalimantan Timur memiliki tekad, komitmen dan keberanian menjalankan kewenangan secara otonom dalam mengatur dan mengelola potensi sumber daya alamnya, untuk mewujudkan masyarakat Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing dan sejahtera.

Sejalan dengan Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, maka Motto Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur adalah :

“Mini Ranch Sapi Potong untuk kesejahteraan peternak yang berdaulat”

Motto tersebut mengandung 2 (dua) kata kunci yang merupakan pernyataan keinginan yang mencerminkan mimpi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur yakni: 1) pengembangan *mini ranch*; dan 2) kesejahteraan peternak

Mini ranch, berarti model pemeliharaan ternak sapi dengan melakukan inovasi padang penggembalaan skala kecil.

Kesejahteraan peternak, berarti kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan spiritual peternak dari usahanya beternak sapi agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Sebagaimana untuk mewujudkan Motto tersebut dan sejalan dengan Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2019 – 2023 terkait dengan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah :

Misi kedua, yaitu “**Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan**”

maka misi kedua Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sejalan dengan pengembangan peternakan sapi potong di lahan eks tambang dan integrasi dengan tanaman merupakan upaya dalam meningkatkan populasi sapi potong di Kalimantan Timur melalui pengembangan *mini ranch* untuk penyediaan daging yang berdaulat.

A. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam pelaksanaan misi. Dalam periode 2019 – 2023 yang akan datang akan diarahkan pada pencapaian tujuan yaitu “Meningkatkan kontribusi sektor peternakan terhadap ekonomi daerah”.

Tujuan : Meningkatkan kontribusi sektor peternakan terhadap ekonomi daerah

Indikator :

Kontribusi lapangan usaha sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)

Pembangunan subsektor peternakan di Provinsi Kalimantan Timur berperan sebagai penyedia protein hewani, penyedia bahan baku industri, penyerapan tenaga kerja dan investasi. Sehingga akan meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat menjadi lebih

sejahtera melalui peningkatan output dan pendapatan dengan memanfaatkan beberapa hasil dari produk-produk peternakan seperti biogas, pupuk, dan produk-produk hewani (daging, telur).

Secara umum subsektor peternakan mengalami perkembangan yang berfluktuatif setiap tahunnya baik jumlah populasi ternak, produksi daging, susu dan telur.

Tabel 4.1. Perkembangan Populasi Ternak di Kalimantan Timur Tahun 2016 - 2020

No.	Jenis Ternak	2016	2017	2018	2019	2020	r (%)
1	S a p i	118.712	119.123	117.504	119.485	119.974	0,26
2	Sapi Perah	97	107	110	91	87	-2,68
3	Kerbau	7.144	7.055	6.157	6.194	6.552	-2,14
4	Kambing	57.794	61.526	66.378	67.892	69.929	4,88
5	Domba	320	281	439	590	635	18,69
6	Babi	75.475	85.749	78.968	82.546	83.652	2,60
7	Kuda	101	91	97	102	95	-1,52
8	Ayam Buras	4.768.534	5.418.086	4.569.169	4.372.415	4.435.205	-1,80
9	Ayam Petelur	842.176	822.533	1.055.432	853.693	1.218.994	9,69
10	Ayam Pedaging	60.747.455	66.268.201	66.672.445	67.886.566	59.402.832	-0,56
11	Itik	192.505	219.149	248.978	254.683	254.749	7,26
12	Kelinci	13.063	15.005	14.189	8.859	10.830	-4,58
13	Puyuh	68.643	46.693	66.593	65.808	79.222	3,65
14	Merpati	4.182	4.163	4.027	4.776	5.015	4,65
15	Itik Manila	25.215	35.934	42.851	42.890	52.823	20,31

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov Kaltim, 2021

Berdasarkan jenisnya, ternak dikelompokkan menjadi ternak besar (sapi potong, sapi perah, kerbau dan kuda), ternak kecil (kambing, domba dan babi), ternak unggas

(ayam buras, ayam pedaging, ayam petelur, itik dan itik manila) serta aneka ternak (kelinci, puyuh dan merpati).

Dari tabel 4.1 terlihat bahwa rata-rata pertumbuhan populasi ternak besar sejak tahun 2016 - 2020 untuk sapi sebesar 0.261%, dan Kerbau -2.14%. Rata-rata pertumbuhan populasi ternak kecil tahun 2016-2020 untuk kambing sebesar 4,88%, domba 18,69%, dan babi 2,6%. Untuk ternak unggas rata-rata pertumbuhan populasi paling tinggi ada pada Itik Manila sebesar 20,31%.

Tabel 4.2. Pemotongan Ternak di Kalimantan Timur Tahun 2016-2020

No.	Jenis Ternak	2016	2017	2018	2019	2020*
1	S a p i	51.462	50.743	50.288	51.426	52.857
2	Sapi Perah	2	-	-	10	2
3	Kerbau	234	301	243	393	301
4	Kuda	6	10	-	-	2
5	Kambing	37.350	46.228	49.264	45.906	45.155
6	Domba	72	75	9	148	388
7	Babi	14.547	14.469	22.952	29.562	30.003
8	Ayam Buras	7.152.801	8.127.129	6.853.754	6.558.623	6.652.808
9	Ayam Petelur	421.088	411.267	527.716	426.847	609.497
10	Ayam Pedaging	54.672.710	59.641.381	60.005.201	61.097.909	53.462.549
11	Itik	96.253	109.575	124.489	127.342	127.377
12	Kelinci	9.797	11.254	10.642	9.149	8.123
13	Puyuh	61.779	42.024	59.934	59.227	71.300
14	Merpati	5.228	5.204	5.034	5.970	6.269
15	Itik Manila	15.129	21.560	25.711	25.734	31.694

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov Kaltim, 2021

Pada tabel 4.2, terlihat bahwa pemotongan terbanyak pada ayam pedaging dengan jumlah pemotongan mencapai 63.219.868 ekor pada tahun 2020. Bila dibandingkan tahun 2016, pemotongan ternak yang mengalami peningkatan terdapat pada, ayam petelur, ayam pedaging, itik, puyuh, merpati, dan itik manila. Sedangkan pemotongan ternak yang mengalami penurunan adalah sapi, kerbau, kuda, domba, dan babi.

Tabel 4.3. Perkembangan harga komoditas ternak dan produk ternak tahun 2016-2020

NO	KOMODITI	SATUAN	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Sapi	Kg/BH	41.320	42.150	41.926	44.203	41.520
2	Kambing	Kg/BH	94.500	51.250	50.579	49.200	44.268
3	Ayam Kampung	Ekor	88.241	88.241	80.000	85.463	85.463
4	Ayam Broiler	Ekor	36.505	36.504	20.954	45.375	44.222
5	Telur Ayam Ras	Butir	1.584	1.584	1.306	1.731	1.717
6	Telur Ayam Kampung	Butir	2.395	2.395	2.167	2.650	2.652
7	Telur Itik	Butir	2.747	2.747	2.500	3.111	3.111
8	Daging Sapi	Kg	127.824	128.241	119.769	131.435	131.528
9	Daging Kambing	Kg	142.500	142.500	131.111	152.500	152.500

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov Kaltim, 2020

Dari tabel 4.3, terlihat bahwa harga semua komoditas mengalami peningkatan sekaligus penurunan secara bersamaan hal ini karena bervariasinya permintaan akan komoditas ternak di Kalimantan timur setiap tahunnya. Begitupun dengan ayam kampung yang mengalami penurunan. Pertumbuhan perekonomian subsektor peternakan masih dijumpai beberapa permasalahan diantaranya pada industri unggas penyediaan pakan masih tergantung dari luar Kaltim. Pada industri ruminansia besar, masih mengandalkan usaha peternakan rakyat yang belum mampu memenuhi

permintaan yang terus meningkat dan pengelolaan pakan belum diusahakan dengan baik. Terbatasnya infrastruktur dan lalu lintas ternak kurang terkendali berpeluang menyebarkan penyakit hewan dan tidak terjamin kualitas serta keamanan produk.

Sedangkan dari sisi konsumsi, terjadi kesenjangan ketersediaan dan permintaan, khususnya pada daging sapi sehingga harus dipenuhi dari luar Kaltim. Kapasitas produksi ayam ras masih mampu ditingkatkan lagi untuk memenuhi pasar luar Kaltim dengan penambahan sarana Rumah Potong Unggas (RPU). Beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya PDRB subsektor peternakan diantaranya adalah populasi ternak, jumlah pemotongan ternak, pemasukkan dan pengeluaran ternak serta harga komoditas produk peternakan.

Tabel 4.4. PDRB Provinsi Kalimantan Timur atas dasar harga berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah)

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018*	2019*	2020*
1	Sektor Pertanian					
2	Tanaman Pangan	1.000,08	1.162,96	1.348,27	1.366,80	1.470,83
3	Tanaman Hortikultura	1.816,51	1.926,41	2.132,56	2.292,86	2.347,80
4	Tanaman Perkebunan	22.548,05	26.620,72	27.584,36	28.222,72	29.974,81
5	Peternakan	1.608,38	1.793,64	2.001,57	2.129,71	2.187,54
6	Jasa Pertanian dan Perburuan	232,87	251,51	265,48	284,28	296,84

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020 (angka sementara)*

Tabel 4.5. Distribusi Persentase PDRB Provinsi Kalimantan Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2016–2020

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018*	2019*	2020*
	Sektor Pertanian					
	Tanaman Pangan	0,20	0,20	0,21	0,21	0,24
	Tanaman Hortikultura	0,36	0,33	0,34	0,35	0,39
	Tanaman Perkebunan	4,43	4,50	4,34	4,33	4,94
	Peternakan	0,32	0,30	0,31	0,33	0,36
	Jasa Pertanian dan Perburuan	0,05	0,04	0,04	0,04	0,05

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020 (* angka sementara)

Tabel 4.6. Kontribusi PDRB Subsektor peternakan terhadap PDRB Sektor Pertanian atas dasar harga berlaku Tahun 2016-2020 (%)

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018*	2019*	2020*
1	Sektor Pertanian					
2	Tanaman Pangan	2,43	2,51	2,66	2,65	2,74
3	Tanaman Hortikultura	4,38	4,14	4,31	4,42	4,45
4	Tanaman Perkebunan	53,89	56,39	55,01	54,74	56,33
5	Peternakan	3,89	3,76	3,93	4,17	4,10
6	Jasa Pertanian dan Perburuan	0,61	0,50	0,51	0,51	0,57

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020 (* angka sementara)

Perkembangan subsektor peternakan pada tiap tahunnya hampir berada pada angka yang sama dimana rata-rata kontribusi yang diberikan pada peningkatan PDRB Provinsi Kalimantan Timur sebesar 0,32 persen tiap tahun. Untuk kontribusi sektor peternakan terbesarnya ada di tahun 2020 yaitu sebesar 0,36 persen sementara untuk

kontribusi terendah ada di tahun 2017 yang memberikan kontribusi sebesar 0,30 persen subsektor peternakan.

Sedangkan rata-rata kontribusi yang diberikan dari subsektor peternakan terhadap sektor pertanian sebesar 3,97% tiap tahun. Untuk kontribusi terbesar ada di tahun 2019 yaitu sebesar 4,17%, sementara untuk kontribusi terendah ada di tahun 2017 yang memberikan kontribusi sebesar 3,76%.

Adapun target PDRB subsektor peternakan dari tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.7. Target PDRB Subsektor Peternakan di Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (dalam persen)

No	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
	<u>Kontribusi lapangan usaha subsektor peternakan terhadap PDRB (%)</u>	0,33	0,34	0,36	0,37	0,37

B. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Sasaran bersifat spesifik, terukur baik kualitatif maupun kuantitatif, sehingga dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tertentu.

Sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018 – 2023 adalah (1) Meningkatnya produksi pangan asal hewan; dan (2) Meningkatnya kesejahteraan peternak

Masing-masing sasaran tersebut, dapat dijabarkan ke dalam beberapa indikator sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1. *Meningkatnya kesejahteraan peternak*

Indikator :

1. Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan

Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan merupakan perbandingan antara Indeks harga yg diterima petani (It) dengan Indeks harga yg dibayar petani (Ib). Sehingga merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan daya beli petani di pedesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, maka semakin kuat tingkat daya beli petani.

Pada bulan Desember 2020, NTP Peternakan dengan indeks 102,54. Sementara itu, untuk NTP subsektor lain indeksnya masih di atas 100 poin, terlihat dari nilai NTP Tahun 2020 mencapai 114,97. Kondisi ini menggambarkan bahwa daya beli petani masih lebih tinggi dari pada biaya produksi. NTP Peternakan dan NTP keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.8. NTP Peternakan dan NTP Pertanian di Kalimantan Timur Tahun 2018-2020

No	Bulan	2018		2019		2020	
		NTPT	NTP	NTPT	NTP	NTPT	NTP
1	Januari	108,20	108,39	113,59	94,18	100,69	112,86
2	Februari	107,24	108,66	112,36	94,47	101,51	114,73
3	Maret	106,39	108,26	110,66	94,95	100,42	112,50
4	April	107,16	107,88	110,12	94,98	98,58	109,68
5	Mei	108,82	108,09	110,79	94,58	100,70	108,42
6	Juni	109,59	108,89	109,79	94,27	102,65	107,02
7	Juli	110,31	108,69	110,25	94,34	102,67	108,25
8	Agustus	110,37	108,70	110,61	94,53	102,09	110,31
9	September	110,12	107,79	111,37	95,18	102,07	112,04
10	Oktober	109,28	107,01	110,13	94,88	102,48	112,08
11	November	110,01	106,22	110,54	94,52	103,34	113,53
12	Desember	112,22	106,34	111,18	94,68	102,54	114,97

Sumber : BPS

Keterangan : NTPT = NTP Peternakan
NTP = NTP Pertanian

Semakin tinggi Nilai Tukar Petani (NTP) peternakan, semakin baik daya jual peternak terhadap produk-produk peternakan dibanding daya beli peternak terhadap kebutuhan konsumsi rumah tangga. Artinya peternak masih untung karena nilai penjualannya lebih tinggi dibandingkan biaya rumah tangga dan secara relatif lebih sejahtera. Adapun Target NTP Peternakan dapat dilihat pada tabel berikut. Nilai NTP tahun 2020 perhitungannya berdasarkan tahun dasar 2018=100 sedangkan hingga tahun 2019 perhitungan NTP berdasarkan tahun 2010=100, oleh sebab itu target NTP tahun 2021-2023 menyesuaikan dasar perhitungan NTP tahun 2018=100.

Tabel 4.9. Target NTP Peternakan di Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	NTP Peternakan	104	104,5	102	103	104

Sasaran 2. “Meningkatnya produksi pangan asal hewan”

Indikator :

1. Produksi Daging

Sumber protein asal daging secara umum dapat dikelompokkan dalam tiga golongan, yaitu daging sapi dan kerbau, daging kambing dan domba, serta daging unggas. Produksi daging unggas memiliki pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan daging sapi/kerbau maupun kambing/domba. Seiring dengan semakin membaiknya pendapatan masyarakat, konsumsi produk peternakan cenderung turut meningkat. Tahun 2020 terdapat penurunan produksi daging dikarenakan permintaan akan daging menurun sebagai akibat dari menurunnya pendapatan masyarakat akibat covid-19.

Tabel 4.10. Target Produksi Daging di Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023 (dalam ton)

No	Uraian	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	<u>Produksi</u> <u>Daging</u>	82.811,60	85.479,70	73.274,74	74.740,23	76.235,08

2. Produksi Telur

Pemenuhan protein asal ternak dapat dipenuhi dari produk selain daging, yaitu telur dan susu. Telur merupakan salah satu produk ternak yang memiliki nilai nutrisi yang baik, mudah diperoleh dan harganya relatif murah. Tingkat konsumsi berbagai jenis telur secara nyata dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, harga, ukuran rumah tangga dan tingkat pendidikan keluarga.

Produksi telur merupakan jumlah telur yang dihasilkan oleh perusahaan tertentu dan usaha peternakan rakyat dalam waktu tertentu, sedangkan konsumsi telur merupakan jumlah telur yang dibutuhkan oleh masyarakat. Adapun target produksi telur selama 5 (lima) tahun dari tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 4.11. Target Produksi Telur di Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023 (dalam ton)

No	Uraian	Target				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	<u>Produksi</u> <u>Telur</u>	11.786,10	12.058,60	14.148,65	14.290,14	14.433,04

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur beserta indikatornya disajikan dalam tabel 4.7 berikut ini.

Tabel 4.12. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator tujuan/sasaran	Target Kinerja Tujuan		
				1	2	2
				2019	2020	
1	Meningkatkan kontribusi sektor peternakan terhadap ekonomi daerah	1. Meningkatnya kesejahteraan peternak	Kontribusi lapangan usaha subsektor peternakan terhadap PDRB (%)	0,33	0,34	
			Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan	104	104,5	

5.1. Strategi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

Strategi adalah cara dan teknik mencapai tujuan yang akan digunakan sebagai acuan dalam penetapan kebijakan, program dan kegiatan. Untuk meraih visi dan melaksanakan misi tersebut sebagaimana dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur, maka strategi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur dalam membangun peternakan adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Kawasan peternakan sapi potong (mini ranch)
2. Peningkatan populasi dan produktivitas ternak
3. Peningkatan produksi dan produktivitas pakan ternak
4. Peningkatan daya saing produk peternakan
5. Peningkatan status kesehatan hewan dan pengawasan lalu lintas hewan/ternak
6. Penguatan pelayanan laboratorium keswan dan kesmavet
7. Peningkatan Jaminan mutu dan keamanan pangan asal hewan
8. Peningkatan peran swasta dan penguatan usaha peternakan rakyat;
9. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Keterampilan Peternak
10. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran melalui penerapan budaya kerja;
11. Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset melalui penerapan pengawasan dan pengendalian.
12. Peningkatan implementasi akuntabilitas kinerja.

5.2. Arah Kebijakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur

Arah kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan. Untuk meraih visi dan melaksanakan misi tersebut sebagaimana dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur, maka arah kebijakan Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur dalam membangun peternakan adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Kawasan peternakan;
2. Pengembangan Sumber Daya Genetik Hayati (SDGH);
3. Penerapan teknologi peternakan;
4. Peningkatan Pelayanan Inseminasi buatan;
5. Peningkatan kapasitas petugas perbibitan/wasbitnak;
6. Peningkatan kualitas dan kuantitas benih /bibit sesuai dengan standar;
7. Penyebaran ternak indukan/ bibit
8. Peningkatan ketersediaan HPT, Bahan Pakan, Pakan;
9. Peningkatan mutu dan kualitas HPT, Bahan Pakan,
10. Pengembangan usaha olahan produk peternakan;
11. Peningkatan Promosi dan pemasaran hasil peternakan;
12. Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) dan Pembebasan Penyakit Jembrana berdasarkan kompartemen
13. Peningkatan pengawasan lalu lintas hewan melalui penguatan dan pemberdayaan Check Point
14. Peningkatan surveilans dan pengujian penyakit hewan
15. Peningkatan keamanan produk hewan
16. Peningkatan kapasitas petugas/auditor
17. Peningkatan unit usaha yang menerapkan kesrawan
18. Peningkatan akses pembiayaan usaha peternakan
19. Peningkatan regulasi peternakan dan kesehatan hewan
20. Penerapan teknologi dan sistem informasi peternakan dan kesehatan hewan
21. Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan peternakan
22. Peningkatan implementasi akuntabilitas kinerja
23. Peningkatan Pelayanan Administrasi Keuangan
24. Peningkatan Pelayanan Kebutuhan Perkantoran

Keterkaitan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel 5.1.

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan kontribusi sektor peternakan terhadap ekonomi daerah	Kontribusi Lapangan Usaha Subsektor Peternakan terhadap Ekonomi Daerah terhadap PDRB (%)	1. Meningkatnya kesejahteraan peternak	Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan	1. Pengembangan Kawasan peternakan sapi potong (mini ranch)	1 Pengembangan Kawasan peternakan
			2. Meningkatnya produksi pangan asal ternak	1. Produksi daging (ton) 2. Produksi telur (ton)	1. Peningkatan populasi dan produktivitas ternak	1 Pengembangan Sumber Daya Genetik Hayati (SDGH) 2 Penerapan teknologi peternakan 3 Peningkatan Pelayanan Inseminasi buatan 4 Peningkatan kapasitas petugas perbibitan/wasbitnak 5 Peningkatan kualitas dan kuantitas benih /bibit sesuai dengan standar 6 Penyebaran ternak indukan/ bibit
					2. Peningkatan produksi dan produktivitas pakan ternak	7 Peningkatan ketersediaan HPT, Bahan Pakan, Pakan 8 Peningkatan mutu dan kualitas HPT, Bahan Pakan, Pakan
				3. Peningkatan daya saing produk peternakan	9 Pengembangan usaha olahan produk peternakan 10 Peningkatan Promosi dan pemasaran hasil peternakan	

NO	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	ARAH
					4. Peningkatan status kesehatan hewan dan pengawasan lalu lintas hewan/ternak	11 Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) dan Pembebasan Penyakit Jembrana berdasarkan kompartemen 12 Peningkatan pengawasan lalu lintas hewan melalui penguatan dan pemberdayaan Check Point
					6. Penguatan pelayanan laboratorium keswan dan kesmavet	13 Peningkatan surveilans dan pengujian penyakit hewan 14 Peningkatan surveilans dan pengujian produk asal hewan
					7. Peningkatan Jaminan mutu dan keamanan pangan asal hewan	15 Peningkatan keamanan produk hewan 16 Peningkatan kapasitas petugas/auditor 17 Peningkatan unit usaha yang menerapkan kesrawan
					8. Peningkatan Peran swasta dan usaha peternakan rakyat	18 Peningkatan akses pembiayaan usaha peternakan 19 Peningkatan regulasi peternakan dan kesehatan hewan
					9. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Keterampilan Peternak	20 Penerapan teknologi dan sistem informasi peternakan dan kesehatan hewan 21 Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan peternakan
					10. Peningkatan implementasi akuntabilitas	22 Peningkatan implementasi akuntabilitas kinerja

NO	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	ARAH
					kinerja	
					11. Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset melalui penerapan pengawasan dan pengendalian	23 Peningkatan Pelayanan Administrasi Keuangan
					12. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran melalui penerapan budaya kerja;	24 Peningkatan Pelayanan Kebutuhan Perkantoran

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

A. Program

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kegiatan-kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan. Program disusun dalam kerangka strategis nasional dan merupakan salah satu elemen dalam pencapaian rencana pembangunan nasional serta dapat menggambarkan kontribusi dari pelaksanaan pemerintahan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional.

Program pembangunan peternakan dan Kesehatan Hewan adalah program strategis yang diharapkan dapat mewujudkan visi dan misi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur khususnya pembangunan peternakan selama 5 tahun ke depan yang disesuaikan dengan urusan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310), dan perubahan terakhir Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Nomor 90 tahun 2019.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur diimplementasikan ke dalam 6 (enam) kelompok program, yaitu program yang menunjang penyelenggaraan pembangunan peternakan dan Kesehatan Hewan dan program utama yang mendukung penyelenggaraan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
5. Program Perizinan Usaha Pertanian
6. Program Penyuluhan Pertanian

B. Kegiatan

Kegiatan merupakan sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya yang ditujukan untuk mencapai sasaran program. Berdasarkan pada misi, tujuan dan sasaran serta program yang akan dilaksanakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 – 2023.

Kegiatan merupakan sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya yang ditujukan untuk mencapai sasaran program. Sedangkan sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan pada misi, tujuan dan sasaran serta program yang akan dilaksanakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019–2023. Kegiatan-kegiatan penunjang dan pembangunan peternakan pada tahun 2021 yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, meliputi Sub Kegiatan :
 - Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, meliputi Sub Kegiatan :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, meliputi Sub Kegiatan:
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, meliputi Sub Kegiatan :
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, meliputi sub kegiatan:
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin
 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi sub kegiatan:
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi sub kegiatan:
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian :

- a. Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian meliputi sub kegiatan:
 - Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pertanian
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
- b. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi meliputi sub kegiatan:
 - Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan
 - Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme

- c. Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi, meliputi sub kegiatan:
 - Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
 - Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
 - Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
 - d. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi, meliputi sub kegiatan:
 - Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
 - Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, PakanPengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak
 - Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak
 - e. Kegiatan Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor meliputi sub kegiatan:
 - Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan
 - Penindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan
 - f. Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain, meliputi sub kegiatan :
 - Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
 - Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- a. Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian, meliputi sub kegiatan :
 - Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya
 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian

- Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan
 - Pembangunan dan Pemeliharaan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian lainnya
4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- a. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, meliputi sub kegiatan:
 - Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
 - Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
 - Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular
 - b. Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi, meliputi sub kegiatan:
 - Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan
 - Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan
 - Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi
 - c. Kegiatan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan, meliputi sub kegiatan:
 - Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit
 - Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan kesehatan Masyarakat Veteriner
 - Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan
 - d. Kegiatan Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner, meliputi sub kegiatan:
 - Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Keamanan Produk Hewan
 - Pengembangan Kompetensi Petugas Penilai Penerapan Persyaratan Teknis
 - e. Kegiatan Kesejahteraan Hewan, meliputi sub kegiatan:
 - Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya
 - Pengelolaan Penerbitan sertifikat kesejahteraan hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)

5. Program Perizinan Usaha Pertanian

- a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota, meliputi sub kegiatan:
 - Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian
- b. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan, meliputi sub kegiatan:
 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan
 - Pengawasan Pelaksanaan Izin usaha pengecer obat hewan
 - Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota

6. Program Penyuluhan Pertanian

- a. Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian, meliputi kegiatan:
 - Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian
- b. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan, meliputi sub kegiatan:
 - Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani
 - Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani

Adapun rencana program, kegiatan, sub kegiatan, kerangka pendanaan serta indikator kinerja tahun 2019– 2023 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel 6.1

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROG / KEG	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	LOKASI
								TAHUN - 1 (2019)		TAHUN - 2 (2020)		TAHUN - 3 (2021)		TAHUN - 4 (2022)		TAHUN - 5 (2023)		TARGET	Rp.		
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	Meningkatkan kontribusi sektor peternakan terhadap ekonomi daerah				1. Kontribusi Iapangan usaha sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	%	0,33	0,33	0,34								0,37		Kepala DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
	Meningkatnya kesejahteraan peternak				Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan	Nilai	109,28	104	104,5								105		Kepala Dinas		
		3.03.34		Program Pengembangan Usaha Peternakan	Nilai Tukar Usaha Peternakan (NTUP)	Nilai Konstanta	123,10	118	5.800.000.000	118,5	10.250.000.000						119	16.050.000.000	Kepala Bidang Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan		
					Jumlah Miniranch yang terregister (unit)	Miniranch	0	5		35							40				
		3.03.34.02		Pengembangan Kawasan Peternakan	Jumlah bibit hijauan Pakan Ternak (HPT)	Stek/Polis	0	100.000	5.180.000.000	100.000	9.000.000.000						200.000	14.180.000.000	Kepala Seksi Pengembangan Kawasan dan Pakan Ternak		
		3.03.34.03		Pengembangan Informasi Peternakan	Jumlah Database, Statistik, NBM dan Data fungsi peternakan	Dokumen	4	4	320.000.000	4	750.000.000						4	1.070.000.000	Kepala Seksi Data dan Informasi Peternakan		
		3.03.34.04		Pengembangan Agribisnis Peternakan	Jumlah peternak debitur sektor peternakan (KTS, KUR, KKPE,dll)	Orang	60	50	300.000.000	50	500.000.000						65	800.000.000	Kepala Seksi Pelayanan Usaha dan Pembiayaan Peternakan		
	Meningkatnya produksi pangan asal ternak				Produksi daging (ton)	Ton	80.248,29	82.811,60		85.479,70							94.144,50		Kepala Dinas		
					Produksi telur (ton)	Ton	11.519,95	11.786,10		12.058,60							12.916,30				
		3.03.23		Program Hilirisasi Produk Peternakan	Peningkatan usaha yang bersertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	%	10	10	1.112.468.000	11	2.200.000.000						14	3.312.468.000	Kepala Bidang Pasca Panen dan Kesmavet		
		3.03.23.02		Peningkatan Mutu Produk Olahan Peternakan	Jumlah usaha pengolahan hasil peternakan yang dilakukan pendampingan	Unit usaha	2	2	230.768.000	2	500.000.000						4	730.768.000	Kepala Seksi Pengolahan Hasil dan Pengawasan Mutu Produk		
		3.03.23.03		Peningkatan Pemasaran Hasil Peternakan	Jumlah omset pemasaran produk dalam pameran/bazar	Rp	100.000.000	125.000.000	609.700.000	150.000.000	750.000.000						275.000.000	1.359.700.000	Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran		
		3.03.23.04		Peningkatan Jaminan Keamanan Pangan Asal Ternak	Jumlah unit usaha yang dilakukan pengawasan dan pembinaan	Unit usaha	30	30	272.000.000	30	950.000.000						30	1.222.000.000	Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner		
		3.03.89		Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Hewan	Jumlah kompartemen yang berstatus bebas penyakit jembrana (unit)	%	0	5	1.115.150.000	35	2.600.000.000						40	3.715.150.000	Kepala Bidang Kesehatan Hewan		
		3.03.89.01		Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan	Jumlah hewan yang divaksinasi	Ekor	30000	10.000	491.700.000	10.000	750.000.000						20.000	1.241.700.000	Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan		

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROG / KEG	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	LOKASI
								TAHUN - 1 (2019)		TAHUN - 2 (2020)		TAHUN - 3 (2021)		TAHUN - 4 (2022)		TAHUN - 5 (2023)		TARGET	Rp.		
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			3.03.89.02	Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Hewan	Jumlah Kab/kota yang dilakukan pengawasan lalu lintas hewan	Kab/Kota	3	10	261.900.000	10	1.200.000.000							10	1.461.900.000	Kepala Seksi Perlindungan Hewan	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv
			3.03.89.03	Penguatan Pelayanan Kesehatan Hewan	Jumlah hewan/ternak yang dilakukan pelayanan kesehatan hewan	Ekor	1500	1400	361.550.000	1425	650.000.000							2.825	1.011.550.000	Kepala Seksi Pengawasan Obat Hewan dan Pelayanan Kesehatan Hewan	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv
			3.03.90	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan	Angka Kelahiran Sapi	%	19	20	7.000.000.000	20	24.100.000.000							22	31.100.000.000	Kepala Bidang Perbibitan dan Budidaya Peternakan	
					Calving Interval	Bulan	19	18		18									16		
			3.03.90.01	Pengembangan Perbibitan Ternak	Jumlah ternak sapi bibit yang memiliki SKLB (Surat Keterangan Layak Bibit)	Ekor	50	100	4.100.000.000	100	20.700.000.000							200	24.800.000.000	Kepala Seksi Perbibitan Ternak	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv
					Service per Conception (S/C)	Nilai	2,09	1,8		1,75								1,6			
			3.03.90.02	Pengembangan Teknologi Peternakan Tepat Guna	Jumlah kelompok Budidaya yang dilakukan pendampingan	Kelompok	1	1	1.000.000.000	1	1.500.000.000							2	2.500.000.000	Kepala Seksi Budidaya dan Alat Mesin Peternakan (Alsinmak)	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv
			3.03.90.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Peternak	Jumlah proposal permohonan bantuan yang diverifikasi	Proposal	24	12	1.900.000.000	14	1.900.000.000							26	3.800.000.000	Kepala Seksi Penataan Kelembagaan dan Penyebaran Ternak	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv
			3.03.91	Program Penyidikan dan Pengujian Keswan dan Kesmavet	Peningkatan pemeriksaan sampel penyidikan penyakit hewan dan produk asal hewan (%)	%	11	11	896.890.000	12	2.615.000.000							15	3.511.890.000	Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesmavet	
			3.03.91.01	Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hewan	Jumlah sampel penyakit hewan	Sampel	5450	4240	360.172.400	4722	1.100.000.000							8.962	1.460.172.400	Kepala Seksi Penyidikan dan Pengujian Penyakit Hewan	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv
			3.03.91.02	Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah sampel produk asal hewan	Sampel	460	660	336.717.600	733	1.415.000.000							1.393	1.751.717.600	Kepala Seksi Penyidikan dan Pengujian Kualitas Hasil Peternakan	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv
			3.03.92.03	Pembangunan/Perbaikan UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet dan Penyediaan Sarana Pendukungnya (DAK)	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung	Unit	0	1	200.000.000	1	100.000.000							1	300.000.000	Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD PTHPT api-api	bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr, luarPrv
			3.03.92	Program Peningkatan Mutu Genetik Ternak	Persentase produksi bibit ternak berkualitas	%	10,00	10	5.878.254.000	11	3.100.000.000							14	8.978.254.000	Kepala UPTD Perbibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak (HPT)	
			3.03.92.04	Peningkatan Produksi Bibit dan Benih Ternak	Jumlah Kelahiran sapi bibit dan rusa	Ekor	31	40	278.604.000	40	1.250.000.000							80	1.528.604.000	Kepala Seksi Produksi Bibit dan Benih Ternak	ppu, smd, luarPrv

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROG / KEG	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN															KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	LOKASI			
								TAHUN - 1 (2019)		TAHUN - 2 (2020)		TAHUN - 3 (2021)		TAHUN - 4 (2022)		TAHUN - 5 (2023)		TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET			Rp.	TARGET	Rp.
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET			Rp.	TARGET	Rp.
			3.03.92.05	Peningkatan Produksi dan Bibit Hijauan Pakan Ternak	Produksi HPT	Ton	700	700	641.600.000	750	850.000.000									1.450	1.491.600.000	Kepala Seksi Produksi dan Bibit Hijauan Pakan Ternak (HPT)	ppu, smd, luarPrv						
					Jumlah bibit HPT yang diproduksi	Stek/Pols	5.000	5.000		5.000										10.000									
			3.03.92.03	Pembangunan/Perbaikan UPTD PIB Api-Api dan Penyediaan Sarana Pendukungnya (DAK)	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung	Unit	0	7	4.958.050.000	1	1.000.000.000									7	5.958.050.000	Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD PTHPT api-api	ppu, smd, luarPrv						
					Tingkat pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	80,00	80,00		81,00										84,00		Kepala Dinas							
			3.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	%	80	80	4.446.671.740	81	4.770.000.000									84	9.216.671.740	Sekretaris Dinas, Kepala UPTD Lab Keswan dan Kesmavet dan Kepala UPTD PTHPT Api-api							
			3.03.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah surat yang diproses	Surat	2775	2960	4.446.671.740	3090	4.770.000.000									0	9.216.671.740	Kepala Subbagian Umum, Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Lab Keswan dan Kesmavet dan Kepala UPTD PTHPT Api-api	ppu, smd						
					A. Dinas	Surat	2.500	2.500		2.600										0									
					B. UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet	Surat	75	210		240										0									
					C. UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Api-Api	Surat	200	250		250										0									
			3.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	Unit	0	5	2.877.650.260	5	8.332.000.000									5	11.209.650.260	Sekretaris Dinas, Kepala UPTD Lab Keswan dan Kesmavet dan Kepala UPTD PIB Api							
			3.03.08.01	Penyediaan peralatan dan kelengkapan	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor yang disediakan	Unit	0	108	430.900.000	161	2.980.000.000									0	3.410.900.000	Kepala Subbagian Umum, Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Lab Keswan dan Kesmavet dan Kepala UPTD PTHPT Api-api	ppu, smd						
					A. Dinas	Unit	0	84		130										0									
					B. UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet	Unit	0	4		11										0									
					C. UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Api-Api	Unit	20	20		20										0									
			3.03.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan kerja yang dipelihara dan diperbaiki	Unit	94	124	2.446.750.260	128	5.352.000.000									0	7.798.750.260	Kepala Subbagian Umum, Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Lab Keswan dan Kesmavet dan Kepala UPTD PTHPT Api-api	ppu, smd						
					A. Dinas	Unit	64	74		74										0									
					B. UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet	Unit	25	45		49										0									
					C. UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Api-Api	Unit	5	5		5										0									
					Luas gedung dan taman yang disediakan jasa kebersihan	M2	6.113	6.113		6.113										0									

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROG / KEG	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN															KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	LOKASI			
								TAHUN - 1 (2019)		TAHUN - 2 (2020)		TAHUN - 3 (2021)		TAHUN - 4 (2022)		TAHUN - 5 (2023)		TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET			Rp.	TARGET	Rp.
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET			Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22								
					A. Dinas	M2	4.427	4.427		4.427								0											
					B. UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet	M2	686	686		686								0											
					C. UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Api-Api	M2	1000	1000		1000								0											
					Laporan Keuangan	Dokumen	1,00	1,00		1,00								5,00			Kepala Dinas								
					3.03.09 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah			10	11	1.965.816.000	12	2.755.000.000						15	4.720.816.000		Sekretaris Dinas, Kepala UPTD Lab Keswan dan Kesmavet dan Kepala UPTD PTHPT Api-api								
					3.03.09.01 Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi	Kegiatan	297	316	1.629.416.000	336	2.090.000.000						0	3.719.416.000		Kepala Subbagian Umum, Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Lab Keswan dan Kesmavet dan Kepala UPTD PTHPT Api-api								
					A. Dinas	Kegiatan	191	149		160								0			bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkr, ktm, bgt, kkr, luarPrv								
					B. UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet	Kegiatan	13	27		36								0											
					C. UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Api-Api	Kegiatan	93	140		140								0											
					3.03.09.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	Orang	0	18	336.400.000	25	665.000.000						43	1.001.400.000		Kepala Subbagian Umum, Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Lab Keswan dan Kesmavet dan Kepala UPTD PTHPT Api-api								
					A. Dinas	Orang	0	14		16								30			ppu, smd, luarPrv								
					B. UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet	Orang	0	1		6								7											
					C. UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Api-Api	Orang	0	3		3								6											
					Peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja	%	1,3	0,5		0,5								1			Sekretaris Dinas								
					3.03.10 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	77,86	78,36	1.075.000.000	78,86	1.700.000.000						80,36	2.775.000.000		Sekretaris Dinas								
					3.03.10.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	Dokumen	10	12	645.000.000	12	950.000.000						12	1.595.000.000		Kepala Subbagian Perencanaan Program								
					3.03.10.02 Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	Dokumen	16	17	430.000.000	17	750.000.000						17	1.180.000.000		Kepala Subbagian Perencanaan Program								
																					bru, psr, mah, kbr, smd, ppu, kkr, bpn, ktm, bgt, luarPrv								

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROG / KEG	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	LOKASI				
								TAHUN - 1 (2019)		TAHUN - 2 (2020)		TAHUN - 3 (2021)		TAHUN - 4 (2022)		TAHUN - 5 (2023)		TARGET	Rp.						
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
1	Meningkatkan kontribusi sektor peternakan terhadap ekonomi daerah				1. Kontribusi lapangan usaha sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	%						0,36			0,37			0,37		0,37			KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
	Meningkatnya kesejahteraan peternak				Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan	Nilai						102			103			104		104			Kepala Dinas		
		3.27.03		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Miniranch yang teregister	Unit						24	9.385.337.500		49	10.023.538.200		30	5.200.000.000		120	24.608.875.700	Kepala Dinas		
		3.27.03.1.01		Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah miniranch sapi potong	Unit						24	9.385.337.500		49	10.023.538.200		30	5.200.000.000		120	24.608.875.700	Kepala Bidang Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan		
		3.27.03.10		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Prasarana Pendukung Lab Keswan/kesmavet yang dibangun/dipelihara (unit)	Unit						1	1.100.000.000		0	-		0		-	1	1.100.000.000	Kepala Subbagian Tata Usaha Lab Keswan & Kesmavet	Smd	
					Jumlah Prasarana dan Sarana Pendukung UPTD PTHPT yang dibangun/dipelihara (unit)	Unit						2			0	-		0		-	2	-	Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD PTHPT	PPU	
		3.27.03.1.01.01		Perencanaan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah prasarana kawasan miniranch sapi potong	Unit						24	6.231.175.000		49	10.023.538.200		0		-	120	16.254.713.200	Kepala Seksi Pengembangan Kawasan dan Pakan Ternak	bru, psr,mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr	
					Jumlah Pedoman Umum Pengembangan Kawasan Peternakan	Dokumen						1			0	-		0		-	1	-	Kepala Seksi Pengembangan Kawasan dan Pakan Ternak	bru, psr,mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr	
					Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen											1	5.200.000.000			1	5.200.000.000	Kepala Seksi Pengembangan Kawasan dan Pakan Ternak	bru, psr,mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr	
		3.27.03.1.01.02		Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah peternak/pelaku usaha yang dilatih	Kelompok/ Unit Usaha						2	550.000.000		0	-		0		-	2	550.000.000	Kepala Seksi Pengolahan Hasil dan Pengawasan Mutu Produk	bru, psr,mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr	
		3.27.03.1.01.05		Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan	Jumlah klinik hewan yang difasilitasi dan dipelihara	Unit						1	226.112.500		0	-		0		-	1	226.112.500	Kepala Seksi Pengawasan Obat Hewan dan Pelayanan Keswan	bru, psr,mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr	
		3.27.03.1.01.06		Pembangunan dan Pemeliharaan Pas Pemeriksaan Kesehatan Hewan	Jumlah checkpoint yang dibangun dan dipelihara	Unit						1	1.207.050.000		0	-		0		-	1	1.207.050.000	Kepala Seksi Perlindungan Hewan	bru, psr,mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr	
		3.27.03.1.01.09		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan penataan prasarana pendukung pertanian lainnya	Laporan						1	71.000.000		0	-		0		-	1	71.000.000	Kepala Seksi Pengembangan Kawasan dan Pakan Ternak	bru, psr,mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr	
					1. Produksi daging	Ton						73274,74			74740,23			76235,08			76235,08		-	Kepala Dinas	
					2. Produksi telur	Ton						14148,65			14290,14			14433,04			14433,04		-	Kepala Dinas	
		3.27.02		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Angka Kelahiran Sapi	%						20,5	11.316.262.500		21	7.243.486.018		22	10.450.000.000		22	29.009.748.518	Kepala Dinas		

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROG / KEG	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME, DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	LOKASI
								TAHUN - 1 (2019)		TAHUN - 2 (2020)		TAHUN - 3 (2021)		TAHUN - 4 (2022)		TAHUN - 5 (2023)		TARGET	Rp.				
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
			3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah unit usaha yang memasarkan produk hasil peternakan	Unit Usaha						0	-	75	846.000.000		76	1.650.000.000	151	2.496.000.000	Kepala Bidang Pasca Panen dan Kesmavet		
			3.27.02.1.01.01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pertanian	Jumlah unit usaha yang dilakukan pendampingan pengolahan hasil peternakan	Unit Usaha						0	-	2	366.600.000				2	366.600.000	Kepala Seksi Pengolahan Hasil dan Pengawasan Mutu Produk	bru, psr,mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr	
				Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana	Laporan												2	700.000.000	2	700.000.000	Kepala Seksi Pengolahan Hasil dan Pengawasan Mutu	bru, psr,mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr	
			3.27.02.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah omset pemasaran produk peternakan dalam	Rp						0	-	150000000	479.400.000				150000000	479.400.000	Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran	bru, psr,mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr	
				Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Dokumen												1	950.000.000	1	950.000.000	Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran	bru, psr,mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr	
			3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Populasi ternak sapi bibit	Ekor						10	950.000.000	65	812.106.264		80	1.700.000.000	155	3.462.106.264	UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	PPU	
				Produksi HPT (Segar)	Ton / Tahun							750		800			825		2375	-	UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	PPU	
			3.27.02.1.03.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Jumlah kelahiran sapi bibit	Ekor						10	950.000.000	15	305.706.264				25	1.255.706.264	Kepala Seksi Produksi Bibit dan Benih Ternak	PPU	
				Jumlah kelahiran rusa bibit	Ekor							10		0	-		0	-	10	-	Kepala Seksi Produksi Bibit dan Benih Ternak	PPU	
				Jumlah ayam nunukan yang menetas	Ekor							100		0	-		0	-	100	-	Kepala Seksi Produksi Bibit dan Benih Ternak	PPU	
				Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Laporan												12	700.000.000	12	700.000.000	Kepala Seksi Produksi Bibit dan Benih Ternak	PPU	
			3.27.02.1.03.04	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah bibit HPT yang diproduksi	Stek/Polis						0	-	6000	506.400.000				6000	506.400.000	Kepala Seksi Produksi dan Bibit Hijauan Pakan Ternak (HPT)	PPU	
				Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Laporan												12	1.000.000.000	12	1.000.000.000	Kepala Seksi Produksi dan Bibit Hijauan Pakan Ternak (HPT)	PPU	
			3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Calving Interval	Bulan						17	2.675.830.000	17	1.276.800.000		16,5	2.500.000.000	16,5	6.452.630.000	Kepala Bidang Perbibitan dan Budidaya Peternakan		
			3.27.02.1.04.01	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah kelompok Budidaya yang dilakukan pendampingan	Kelompok						2	1.000.000.000	3	530.400.000				5	1.530.400.000	Kepala Seksi Budidaya Ternak dan Alat Mesin Ternak	bru, psr,mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr	
				Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Dokumen												1	1.200.000.000	1	1.200.000.000	Kepala Seksi Budidaya Ternak dan Alat Mesin Ternak	bru, psr,mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr	
			3.27.02.1.04.02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak	Service per Conception	Indeks						1,73	1.251.580.000	1,71	536.400.000				1,7	1.787.980.000	Kepala Seksi Perbibitan Ternak	bru, psr,mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr	

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROG / KEG	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	LOKASI			
								TAHUN - 1 (2019)		TAHUN - 2 (2020)		TAHUN - 3 (2021)		TAHUN - 4 (2022)		TAHUN - 5 (2023)		TARGET	Rp.					
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
					Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Luas penambahan lahan HPT	Ha					5			0				5			Kepala Seksi Pengembangan Kawasan dan Pakan Ternak	bru, psr,mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr	
					Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak. Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Laporan										2	950.000.000		2	950.000.000		Kepala Seksi Pengembangan Kawasan dan Pakan Ternak	bru, psr,mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr	
					3.27.02.1.04.03 Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah petugas perbibitan/wasbitmak yang mendapatkan pelatihan/bimtek	Orang					5	424.250.000		25	210.000.000			30	634.250.000		Kepala Seksi Perbibitan Ternak	bru, psr,mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr	
					Jumlah petugas/wastukan Ternak, Bahan Pakan serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah petugas/wastukan yang mendapatkan pelatihan/bimtek	Orang					25			0		0		25			Kepala Seksi Pengembangan Kawasan dan Pakan Ternak	bru, psr,mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr	
					Jumlah Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak. Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Orang										20	350.000.000		20	350.000.000		Kepala Seksi Pengembangan Kawasan dan Pakan Ternak	bru, psr,mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr	
					3.27.02.1.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah sampel HPT, bahan baku dan pakan yang memenuhi standar mutu	Sampel					40	1.562.937.500		40	1.279.368.000		40	800.000.000	120	3.642.305.500		Kepala Bidang Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan	
					3.27.02.1.05.01 Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah bibit HPT yang disediakan	Stek/pots					5000	950.000.000		0		0		5000	950.000.000		Kepala Seksi Produksi dan Bibit Hijauan Pakan Ternak (HPT)	bru, psr,mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr	
					Jumlah bibit HPT yang disediakan	Stek/pots						0			200000	694.325.000			200000	694.325.000		Kepala Seksi Pengembangan Kawasan dan Pakan Ternak	bru, psr,mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr	
					Jumlah ketersediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia dan yang Diproduksi	Laporan											1	400.000.000		1	400.000.000		Kepala Seksi Pengembangan Kawasan dan Pakan Ternak	bru, psr,mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr
					3.27.02.1.05.02 Penjaminan Peredaran Baku dan pakan yang dilakukan pengujian	Jumlah sampel HPT, Bahan Baku dan pakan yang dilakukan pengujian	Sampel					0	151.587.500		50	585.043.000			50	736.630.500		Kepala Seksi Pengembangan Kawasan dan Pakan Ternak	bru, psr,mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr	
					Jumlah penangkar benih/bibit yang di bina	Peternak						20			0		0		20			Kepala Seksi Perbibitan Ternak	bru, psr,mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr	
					Luas lahan/kebun bibit HPT	Ha						500			0		0		500			Kepala Seksi Pengembangan Kawasan dan Pakan Ternak	bru, psr,mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr	
					Jumlah Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan yang Beredar	Ton										100.000	400.000.000		100.000	400.000.000		Kepala Seksi Pengembangan Kawasan dan Pakan Ternak	bru, psr,mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr	
					3.27.02.1.05.03 Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah ternak sapi yang diidentifikasi untuk sertifikasi	Ekor					150	461.350.000		0		0		150	461.350.000		Kepala Seksi Perbibitan Ternak	bru, psr,mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr	

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROG / KEG	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN															KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	LOKASI	
								TAHUN - 1 (2019)		TAHUN - 2 (2020)		TAHUN - 3 (2021)		TAHUN - 4 (2022)		TAHUN - 5 (2023)		TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET			Rp.
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET			Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22						
					Jumlah sampel HPT, bahan baku dan pakan ternak	Sampel						50			0		0		50		Kepala Seksi Pengembangan Kawasan dan Pakan Ternak	bru, psr,mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr					
			3.27.02.1.06	Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	Jumlah sampel obat hewan yang memenuhi persyaratan mutu	sampel						8	383.587.500		11	883.500.000		13	600.000.000		32	1.867.087.500	Kepala Bidang Kesehatan Hewan				
			3.27.02.1.06.01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah sampel obat hewan yang dilakukan pengujian mutu obat hewan	sampel						10	312.860.000		13	683.500.000				23	996.360.000	Kepala Seksi Pengawasan Obat Hewan dan Pelayanan Keswan	bru, psr,mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr				
					Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	Laporan												2	450.000.000		2	450.000.000	Kepala Seksi Pengawasan Obat Hewan dan Pelayanan Keswan	bru, psr,mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr			
			3.27.02.1.06.02	Penindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Jumlah distributor obat hewan yang dilakukan pengawasan penyediaan dan peredaran obat hewan	unit usaha						1	70.727.500		4	200.000.000					5	270.727.500	Kepala Seksi Pengawasan Obat Hewan dan Pelayanan Keswan	bru, psr,mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr			
					Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Dilakukan Penindakan	Kasus												165	150.000.000		165	150.000.000	Kepala Seksi Pengawasan Obat Hewan dan Pelayanan Keswan	bru, psr,mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr			
			3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah kelompok penerima ternak	Kelompok						10	5.743.907.500		10	2.145.711.754		10	3.200.000.000		30	11.089.619.254	Kepala Bidang Perbibitan dan Budidaya Peternakan				
			3.27.02.1.07.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah ternak yang disediakan	Ekor						200	5.523.307.500		115	2.145.711.754					315	7.669.019.254	Kepala Seksi Perbibitan Ternak	bru, psr,mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr			
					Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Ekor												200	3.200.000.000		200	3.200.000.000	Kepala Seksi Perbibitan Ternak	bru, psr,mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr			
			3.27.02.1.07.02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah bibit hijauan Pakan Ternak (HPT)	Stek/Pals						100000	220.600.000		0			0		100000		220.600.000	Kepala Seksi Pengembangan Kawasan dan Pakan Ternak	bru, psr,mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr			
			3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesmavet	Rasio wilayah yang tidak ada kasus penyakit hewan menular strategis (penyakit jembrana) terhadap total wilayah bersisiko tertular	%						50	1.642.950.000		60	1.820.000.000		70	3.050.000.000		70	6.512.950.000	Kepala Dinas				
					Peningkatan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk asal hewan (sertifikasi NKV)	%						12	2.052.730.000		13	1.135.460.000		14	1.800.000.000		14	4.988.190.000					
			3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah pengendalian penyakit jembrana, rabies, dan AI	Kab/kota						10	517.900.000		10	663.200.000		10	900.000.000		10	2.081.100.000	Kepala Bidang Kesehatan hewan				

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROG / KEG	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	LOKASI				
								TAHUN - 1 (2019)		TAHUN - 2 (2020)		TAHUN - 3 (2021)		TAHUN - 4 (2022)		TAHUN - 5 (2023)		TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22						
3.27.04.1.01.01	Pengendalian Resiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah hewan yang divaksinasi	Ekor					10000	259.899.000	0	-	0	-	10000	259.899.000	Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan	bru, psr,mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr										
								Jumlah wilayah yang dilakukan vaksinasi	Kab/Kota			0	-	5	184.890.000	5	184.890.000	Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan	bru, psr,mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr								
								Jumlah Wilayah Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Laporan					2	400.000.000	2	400.000.000	Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan	bru, psr,mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr								
3.27.04.1.01.02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah kompartemen tidak ada kasus penyakit jembrana	Kopartemen					25	21.150.000	25	261.510.000			50	282.660.000	Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan	bru, psr,mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr										
								Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Laporan					2	300.000.000	2	300.000.000	Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan	bru, psr,mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr								
3.27.04.1.01.03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah lokasi edukasi penanganan wabah penyakit hewan menular strategis	Lokasi					0	-	10	216.800.000			10	216.800.000	Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan	bru, psr,mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr										
								Jumlah kejadian penyakit AI	Ekor			1500	236.851.000	0	-	0	-	1500	236.851.000	Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan	bru, psr,mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr						
								Jumlah kejadian penyakit Rabies	Ekor			75	10														
3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Jumlah Check point yang dilakukan pengawasan lalu lintas hewan	Checkpoint					1	292.950.000	2	750.000.000			3	1.350.000.000	3	2.392.950.000	Kepala Bidang Kesehatan hewan									
								Jumlah Kab/kota yang dilakukan pengawasan produk asal hewan	Kab/Kota			3	230.390.000	0	-	0	-	3	230.390.000	Kepala Bidang Kesehatan hewan							
								Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Laporan					15	200.000.000	15	200.000.000	Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan	bru, psr,mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr								
3.27.04.1.02.01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah analisa resiko penyakit hewan	Laporan					1	180.050.000	1	60.000.000			2	240.050.000	Kepala Seksi Perindungan Hewan	bru, psr,mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr										
								Jumlah analisa resiko produk asal hewan	Laporan			1	129.300.000	0	-	0	-	1	129.300.000	Kepala Seksi Kesmasvet	bru, psr,mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr						
								Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Laporan					1	150.000.000	1	150.000.000	Kepala Seksi Perindungan Hewan	bru, psr,mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr								
3.27.04.1.02.02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah kab/kota yang dilakukan pengawasan lalu lintas hewan	Kab/kota					10	22.700.000	2	90.000.000			10	112.700.000	Kepala Seksi Perindungan Hewan	bru, psr,mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr										
								Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan					2	200.000.000	2	200.000.000	Kepala Seksi Perindungan Hewan	bru, psr,mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr								
3.27.04.1.02.03	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan	Jumlah hewan yang dilakukan pengawasan dan pemeriksaan kesehatan hewan	Ekor					800	90.200.000	900	600.000.000			1700	690.200.000	Kepala Seksi Perindungan Hewan	bru, psr,mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr										

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROG / KEG	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	LOKASI			
								TAHUN - 1 (2019)		TAHUN - 2 (2020)		TAHUN - 3 (2021)		TAHUN - 4 (2022)		TAHUN - 5 (2023)		TARGET	Rp.					
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
					di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	Ton						500	101.090.000		0	-			500	101.090.000	Kepala Seksi Kesmavet	bru, psr,mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr		
					Jumlah pertimbangan teknis pemasukan dan pengeluaran produk asal hewan																			
					Jumlah Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	Laporan													2	1.000.000.000	Kepala Seksi Perlindungan Hewan	bru, psr,mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr		
				3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	%						13	1.981.050.000		14	813.600.000		15	1.600.000.000	15	4.394.650.000	Kepala UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet		
				3.27.04.1.03.01	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Sertifikat Hasil Uji						0	-		228	406.800.000		262	800.000.000	490	1.206.800.000	Kepala Seksi Penyidikan dan pengujian penyakit hewan	bru, psr,mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr	
					Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi	Unit													4	-	4	-	Kepala Seksi Penyidikan dan pengujian penyakit hewan	bru, psr,mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr
					Jumlah kompartemen yang dilakukan sertifikasi	Kompartemen						4	32.100.000		0	-		0	-	4	32.100.000	Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan	bru, psr,mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr	
				3.27.04.1.03.03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan kesehatan Masyarakat Veteriner	Analisis						0	-		91	406.800.000			91	406.800.000	Kepala Seksi Penyidikan dan pengujian kualitas hasil peternakan	bru, psr,mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr		
					Jumlah sertifikat hasil uji	Analisis						200	800.000.000		0	-		0	-	200	800.000.000	Kepala Seksi Penyidikan dan pengujian penyakit hewan	bru, psr,mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr	
					Jumlah analisis produk asal hewan	Analisis						80	1.100.000.000		0	-		0	-	80	1.100.000.000	Kepala Seksi Penyidikan dan pengujian kualitas hasil peternakan	bru, psr,mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr	
					Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dokumen												105	800.000.000	105	800.000.000	Kepala Seksi Penyidikan dan pengujian kualitas hasil peternakan	bru, psr,mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr	
				3.27.04.1.03.02	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Unit usaha						30	48.950.000		0	-		0	-	30	48.950.000	Kepala Seksi Kesmavet	bru, psr,mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr	
				3.27.04.1.04	Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Unit usaha						2	183.150.000		2	309.000.000		2	600.000.000	6	1.092.150.000	Kepala Bidang Pasca Panen dan Kesmavet		
				3.27.04.1.04.01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Keamanan Produk Hewan	Unit usaha						2	173.150.000		0	-		0	-	2	173.150.000	Kepala Seksi Kesmavet	bru, psr,mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr	
					Jumlah unit usaha yang dilakukan pengawasan dan pembinaan	Unit usaha						0	-		40	309.000.000				40	309.000.000	Kepala Seksi Kesmavet	bru, psr,mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr	
					Jumlah Sertifikasi Keamanan Produk Hewan	Sertifikat													5	600.000.000	5	600.000.000	Kepala Seksi Kesmavet	bru, psr,mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROG / KEG	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	LOKASI		
								TAHUN - 1 (2019)		TAHUN - 2 (2020)		TAHUN - 3 (2021)		TAHUN - 4 (2022)		TAHUN - 5 (2023)		TARGET	Rp.				
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
			3.27.04.1.04.02	Pengembangan Kompetensi Petugas Penilai Penerapan Persyaratan Teknis	Jumlah auditor NKV yang memperoleh pelatihan/ bimtek	Orang						6	10.000.000		0			6	10.000.000	Kepala Seksi Kesmavet	bru, psr,mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr		
			3.27.04.1.05	Kesejahteraan Hewan	Jumlah unit usaha yang menerapkan kesrawan	Unit usaha						2	490.240.000		10	419.660.000		11	400.000.000	23	1.309.900.000	Kepala Bidang Pasca Panen dan Kesmavet	
			3.27.04.1.05.01	Pengelolaan Penerbitan sertifikat kesejahteraan hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Jumlah sertifikat NKV yang diterbitkan	Sertifikat						2	263.030.000		0			0		2	263.030.000	Kepala Seksi Kesmavet	bru, psr,mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr
			3.27.04.1.05.02	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya	Jumlah unit usaha yang dilakukan pembinaan dan pendampingan penerapan kesrawan	Unit						10	227.210.000		15	419.660.000				25	646.870.000	Kepala Seksi Kesmavet	bru, psr,mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr
			3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Jumlah Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani	Kasus											750	400.000.000	750	400.000.000	Kepala Seksi Kesmavet	bru, psr,mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr	
			3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase usaha peternakan dan kesehatan hewan yang mempunyai izin usaha	%						25	475.300.000		50	714.500.000		75	1.200.000.000	75	2.389.800.000	Kepala Dinas	bru, psr,mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr
			3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit usaha peternakan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan penerapan perizinan	Unit usaha						25	435.000.000		30	364.500.000		35	800.000.000	90	1.599.500.000	Kepala Bidang Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan	
			3.27.06.1.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha peternakan	kegiatan						1	135.000.000		5	364.500.000				6	499.500.000	Kepala Seksi Pelayanan usaha dan pembiayaan peternakan	bru, psr,mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr
			3.27.06.1.01.02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah izin usaha peternakan dan kesehatan hewan yang dilakukan penilaian dan pertimbangan teknis	Unit usaha						2	300.000.000		0			0		2	300.000.000	Kepala Seksi Pelayanan usaha dan pembiayaan peternakan	bru, psr,mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr
			3.27.06.1.03	Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Jumlah rekomendasi izin usaha pengecer obat hewan	Rekomendasi						1	40.300.000		1	350.000.000		2	400.000.000	4	790.300.000	Kepala Bidang Kesehatan hewan	
			3.27.06.1.03.01	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah peserta edukasi izin usaha pengecer obat hewan	orang						0			10	250.000.000				2	250.000.000	Kepala Seksi Pengawasan Obat Hewan dan Pelayanan Keswan	bru, psr,mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr
			3.27.06.1.03.02	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah izin Usaha Distributor Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen	Laporan											2	300.000.000			300.000.000	Kepala Seksi Pengawasan Obat Hewan dan Pelayanan Keswan	bru, psr,mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr
			3.27.06.1.03.02	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah distributor/pengecer obat hewan yang mendapatkan izin usaha obat hewan	unit usaha						1	40.300.000		1	100.000.000				2	140.300.000	Kepala Seksi Pengawasan Obat Hewan dan Pelayanan Keswan	bru, psr,mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr
			3.27.06.1.03.02	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah izin Usaha Distributor Obat Hewan yang diawasi	Laporan											2	100.000.000			100.000.000	Kepala Seksi Pengawasan Obat Hewan dan Pelayanan Keswan	bru, psr,mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROG / KEG	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN															KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	LOKASI	
								TAHUN - 1 (2019)		TAHUN - 2 (2020)		TAHUN - 3 (2021)		TAHUN - 4 (2022)		TAHUN - 5 (2023)		TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET			Rp.
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET			Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22						
			3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan Binaan Kelompok Ternak	%						43	1.915.000.000	44	664.200.000	45	1.400.000.000	45	3.979.200.000	Kepala Dinas	bru, psr,mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr						
			3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah penyebaran informasi peternakan	Kali						12	600.000.000	12	360.000.000	12	800.000.000	12	1.760.000.000	Kepala Bidang Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan							
			3.27.07.1.02.01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah dokumen data dan informasi peternakan	Dokumen						4	600.000.000	4	360.000.000				8	960.000.000	Kepala Seksi Data dan Informasi Peternakan	bru, psr,mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr					
				Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen											4	800.000.000	4	800.000.000	Kepala Seksi Data dan Informasi Peternakan	bru, psr,mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr						
			3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah kelompok ternak yang teregistrasi	Kelompok						20	1.315.000.000	20	304.200.000	25	600.000.000	65	2.219.200.000	Kepala Bidang Perbibitan dan Budidaya Peternakan							
			3.27.07.1.03.01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Kooparasi Petani	Jumlah kelompok ternak yang dibina	Kelompok						0	-	30	304.200.000				30	304.200.000	Kepala Seksi Penataan, Kelembagaan dan Penyebaran Ternak	bru, psr,mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr					
				Jumlah proposal permohonan bantuan yang diverifikasi	Kelompok							16	500.000.000	0	-	0			16	500.000.000	Kepala Seksi Penataan, Kelembagaan dan Penyebaran Ternak	bru, psr,mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr					
				Jumlah Kooparasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	Unit											1	600.000.000	1	600.000.000	Kepala Seksi Penataan, Kelembagaan dan Penyebaran Ternak	bru, psr,mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr						
			3.27.07.1.03.02	Pendampingan Manajemen Kooparasi Petani	Jumlah peternak debitur sektor peternakan (KTS, KUR, KKPE,dll)	Orang						55	815.000.000	0	-	0			55	815.000.000	Kepala Seksi Pelayanan usaha dan pembiayaan peternakan	bru, psr,mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr					
				Jumlah pameran/bazaar yang diikuti	kali							5		0	-	0			5	-	Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran	bru, psr,mah, kbr, smd, ppu, bpn, ktm, btg, kkr					
			3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang peternakan	%						80	32.696.365.000	81	33.078.362.782	82	38.900.000.000	82	104.674.727.782	Kepala Dinas							
			3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai						79,1	1.208.100.000	79,2	1.515.000.000	79,3	1.950.000.000	79,3	4.673.100.000	Sekretaris							
			3.27.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja	Dokumen						4	700.000.000	0	-	0			4	700.000.000	Kepala Sub Bagian Perencanaan Program	SMD					
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen							0	-	12	790.000.000				12	790.000.000	Kepala Sub Bagian Perencanaan Program	SMD					
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen											12	1.000.000.000	12	1.000.000.000	Kepala Sub Bagian Perencanaan Program	SMD						
			3.27.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	Dokumen						17	508.100.000	10	725.000.000				0	1.233.100.000	Kepala Sub Bagian Perencanaan Program	SMD					
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan											10	950.000.000	10	950.000.000	Kepala Sub Bagian Perencanaan Program	SMD						
			3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	%						80	17.587.144.613	80	18.888.030.800	80	20.648.739.880	80	57.123.915.293	Sekretaris							
			3.27.01.1.02.01	Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen dan Daftar Gaji dan Tunjangan	Dokumen						26	16.613.945.000	26	17.844.190.800				0	34.458.135.800	Kepala Sub Bagian Keuangan	SMD					

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROG / KEG	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	LOKASI	
								TAHUN - 1 (2019)		TAHUN - 2 (2020)		TAHUN - 3 (2021)		TAHUN - 4 (2022)		TAHUN - 5 (2023)		TARGET	Rp.			
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan											83	19.628.609.880	83	19.628.609.880	Kepala Sub Bagian Keuangan	SMD
			3.27.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dinas	Jumlah Dokumen Pengelola Kegiatan ASN	Bulan Dokumen					12	666.380.000	12	678.720.000						1.345.100.000	Kepala Sub Bagian Keuangan	SMD
					Jumlah Tim Penataan Arsip Dinas	Tim					1		1	-						-	Kepala Sub Bagian Keuangan	SMD
					Jumlah Tim Pengamanan Aset	Tim					1		1	-						-	Kepala Sub Bagian Keuangan	SMD
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen											12	715.970.000	12	715.970.000	Kepala Sub Bagian Keuangan	SMD
			3.27.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD UPTD Lab Keswan dan Kesmavet	Jumlah Dokumen Pengelola Kegiatan ASN	Bulan Dokumen					12	112.899.613	12	148.920.000					12	261.819.613	Kepala Subbagian Tata Usaha Lab Keswan & Kesmavet	SMD
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen											12	110.000.000		110.000.000	Kepala Subbagian Tata Usaha Lab Keswan & Kesmavet	SMD
			3.27.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD UPTD PTHPT	Jumlah Dokumen Pengelola Kegiatan ASN	Bulan Dokumen					12	133.920.000	12	132.600.000					12	266.520.000	Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD PTHPT	PPU
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen											12	125.760.000		125.760.000	Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD PTHPT	PPU
			3.27.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Dinas	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Laporan					1	60.000.000	1	83.600.000					1	143.600.000	Kepala Sub Bagian Keuangan	SMD
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan											1	68.400.000	1	68.400.000	Kepala Sub Bagian Keuangan	SMD
			3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%					80	665.078.000	80	765.701.000	80	834.431.000	80	834.431.000	80	2.265.210.000	Sekretaris	
			3.27.01.1.05.02	Pengadaan Pakaiannya Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Dinas	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	Stel					191	136.573.000	324	269.801.000					5	406.374.000	Kepala Sub Bagian Umum	SMD
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket											5	269.801.000		269.801.000	Kepala Sub Bagian Umum	SMD
					Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	Stel					45	30.975.000	46	34.120.000					2	65.095.000	Kepala Subbagian Tata Usaha Lab Keswan & Kesmavet	SMD
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket											2	20.000.000		20.000.000	Kepala Subbagian Tata Usaha Lab Keswan & Kesmavet	SMD

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROG / KEG	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN															KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	LOKASI			
								TAHUN - 1 (2019)		TAHUN - 2 (2020)		TAHUN - 3 (2021)		TAHUN - 4 (2022)		TAHUN - 5 (2023)		TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET			Rp.	TARGET	Rp.
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET			Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22								
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya UPTD PTHPT	Stel								110	97.750.000			5	97.750.000	Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD PTHPT	PPU								
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket									-	5	77.000.000		77.000.000	Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD PTHPT	PPU								
			3.27.01.1.05	.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas	Orang						18	254.780.000	39	218.780.000			75	473.560.000	Kepala Sub Bagian Umum	SMD								
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang									-	18	218.780.000		218.780.000	Kepala Sub Bagian Umum	SMD								
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi UPTD Lab Kewan dan Kesmavet	Orang						3	44.000.000	14	88.000.000			27	132.000.000	Kepala Subbagian Tata Usaha Lab Kewan & Kesmavet	SMD								
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang									-	10	66.000.000		66.000.000	Kepala Subbagian Tata Usaha Lab Kewan & Kesmavet	SMD								
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi UPTD PTHPT	Orang						9	198.750.000	9	57.250.000			41	256.000.000	Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD PTHPT	PPU								
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang									-	23	182.850.000		182.850.000	Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD PTHPT	PPU								
			3.27.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	%						80	2.894.154.494	80	2.626.354.482	80	3.361.454.342	80	8.881.963.318	Sekretaris									
			3.27.01.1.06	.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Dinas	Bulan						12	19.800.000	12	19.799.634			12	39.599.634	Kepala Sub Bagian Umum	SMD								
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket										12	19.799.634		19.799.634	Kepala Sub Bagian Umum	SMD								
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UPTD Lab Kewan dan Kesmavet	Bulan						12	5.042.573	12	5.042.573			12	10.085.146	Kepala Subbagian Tata Usaha Lab Kewan & Kesmavet	SMD								
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket										12	7.000.000		7.000.000	Kepala Subbagian Tata Usaha Lab Kewan & Kesmavet	SMD								
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor UPTD PTHPT	Bulan						12	8.520.768	12	10.903.002			12	19.423.770	Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD PTHPT	PPU								
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket										12	12.861.488		12.861.488	Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD PTHPT	PPU								
			3.27.01.1.06	.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas	Unit						10	424.031.600	41	392.823.000			10	816.854.600	Kepala Sub Bagian Umum	SMD								
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket										10	514.599.000		514.599.000	Kepala Sub Bagian Umum	SMD								
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPTD Lab Kewan dan Kesmavet	Unit						12	58.651.000	11	65.300.000			12	123.951.000	Kepala Subbagian Tata Usaha Lab Kewan & Kesmavet	SMD								
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket										12	40.000.000		40.000.000	Kepala Subbagian Tata Usaha Lab Kewan & Kesmavet	SMD								
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor UPTD PTHPT	Unit						12	508.735.000	41	72.250.000			12	580.985.000	Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD PTHPT	PPU								
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket										12	508.735.000		508.735.000	Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD PTHPT	PPU								

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROG / KEG	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN															KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	LOKASI			
								TAHUN - 1 (2019)		TAHUN - 2 (2020)		TAHUN - 3 (2021)		TAHUN - 4 (2022)		TAHUN - 5 (2023)		TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET			Rp.	TARGET	Rp.
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET			Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22								
			3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%						80	1.643.961.600		80	2.210.222.000		80	4.965.238.120		80	8.819.421.720	Sekretaris						
			3.27.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Dinas	Jumlah pengadaan mobil jabatan dinas	Unit						2	836.090.000		4	1.060.800.000				1	1.368.800.000		1.368.800.000	Kepala Sub Bagian Umum	SMD				
			3.27.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Dinas	Jumlah pengadaan roda-2 operasional	Unit						1	32.642.000		1	31.962.000				4	127.048.000		127.048.000	Kepala Sub Bagian Umum	SMD				
			3.27.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Dinas	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit						0	-		1	492.610.000				1	400.000.000		400.000.000	Kepala Subbagian Tata Usaha Lab Keswan & Kesmavet	SMD				
			3.27.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan UPTD Lab Keswan dan Kesmavet	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional	Unit						0	-		1	492.610.000				1	400.000.000		400.000.000	Kepala Subbagian Tata Usaha Lab Keswan & Kesmavet	SMD				
			3.27.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan UPTD PTHPT	Jumlah Pengadaan Operasional Lapangan Roda Tiga UPTD, PTHPT	Unit						1	677.510.000		0	-		0	-	1	677.510.000		677.510.000	Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD PTHPT	PPU				
			3.27.01.1.07.05	Pengadaan Mebel Dinas	Jumlah mebel yang tersedia	Unit						2	40.600.000		7	37.250.000				7	60.100.000		60.100.000	Kepala Sub Bagian Umum	SMD				
			3.27.01.1.07.05	Pengadaan Mebel UPTD Lab Keswan dan Kesmavet	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket														7	60.100.000		60.100.000	Kepala Sub Bagian Umum	SMD				
			3.27.01.1.07.05	Pengadaan Mebel UPTD Lab Keswan dan Kesmavet	Jumlah mebel yang tersedia	Unit						6	47.350.000		20	-				20	47.350.000		47.350.000	Kepala Subbagian Tata Usaha Lab Keswan & Kesmavet	SMD				
			3.27.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin UPTD PTHPT	Jumlah Pengadaan alat elektronik kantor	Unit									1	87.600.000				2	67.900.000		87.600.000	Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD PTHPT	PPU				
			3.27.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin UPTD PTHPT	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit													2	67.900.000		67.900.000	Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD PTHPT	PPU					
			3.27.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UPTD Lab Keswan dan Kesmavet	Jumlah sarana dan prasarana pendukung kantor	unit						1	9.769.600			-				1	9.769.600		9.769.600	Kepala Subbagian Tata Usaha Lab Keswan & Kesmavet	SMD				
			3.27.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UPTD Lab Keswan dan Kesmavet	Jumlah perencanaan pembangunan gedung kantor dinas	dokumen									1	500.000.000				1	500.000.000		500.000.000	Kepala Subbagian Tata Usaha Lab Keswan & Kesmavet	SMD				
			3.27.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UPTD Lab Keswan dan Kesmavet	Jumlah perencanaan pembangunan gedung kantor UPTD LKK	dokumen									1	2.941.390.120				1	2.941.390.120		2.941.390.120	Kepala Subbagian Tata Usaha Lab Keswan & Kesmavet	SMD				
			3.27.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UPTD Lab Keswan dan Kesmavet	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit													1					Kepala Subbagian Tata Usaha Lab Keswan & Kesmavet	SMD				
			3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%						80	4.680.020.753		80	4.802.214.666		80	4.791.580.458		80	14.273.815.877		14.273.815.877	Sekretaris				
			3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dinas	Jumlah surat yang diadministrasikan	surat						2700	102.253.200		2800	106.423.745				4	103.458.219		103.458.219	Kepala Sub Bagian Umum	SMD				
			3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dinas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan													4	103.458.219		103.458.219	Kepala Sub Bagian Umum	SMD					
			3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat UPTD Lab Keswan dan Kesmavet	Jumlah surat yang diadministrasikan	surat						270	17.600.290		300	23.133.219				6	25.000.000		40.733.509	Kepala Subbagian Tata Usaha Lab Keswan & Kesmavet	SMD				
			3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat UPTD Lab Keswan dan Kesmavet	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan													6	25.000.000		25.000.000	Kepala Subbagian Tata Usaha Lab Keswan & Kesmavet	SMD					
			3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat UPTD PTHPT	Jumlah surat yang diadministrasikan	surat						250	18.267.788		250	20.795.308				12	39.063.096		39.063.096	Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD PTHPT	PPU				
			3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan						12	252.710.035		12	299.436.562				12	18.267.788		18.267.788	Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD PTHPT	PPU				
			3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan						12	252.710.035		12	299.436.562				12	552.146.597		552.146.597	Kepala Sub Bagian Umum	SMD				

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROG / KEG	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN															KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Penanggungjawab	LOKASI
								TAHUN - 1 (2019)		TAHUN - 2 (2020)		TAHUN - 3 (2021)		TAHUN - 4 (2022)		TAHUN - 5 (2023)		TARGET		Rp.						
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
				Daya Air dan Listrik Dinas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan										12	252.710.035		252.710.035	Kepala Sub Bagian Umum	SMD					
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD Lab Keswan dan Kesmavet	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan					12	115.724.184			12	161.924.184			12	277.648.368	Kepala Subbagian Tata Usaha Lab Keswan & Kesmavet	SMD				
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD PTHPT	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					12	126.338.000			12	126.338.000			12	180.000.000	Kepala Subbagian Tata Usaha Lab Keswan & Kesmavet	SMD				
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD PTHPT	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan					12	126.338.000			12	126.338.000			12	252.676.000	Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD PTHPT	PPU				
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD PTHPT	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan					12	126.338.000			12	126.338.000			12	126.338.000	Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD PTHPT	PPU				
			3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Dinas	Jumlah laporan bulanan penyediaan gaji non PNS	Laporan					12	1.945.427.472			12	2.120.128.632			12	4.065.556.104	Kepala Sub Bagian Umum	SMD				
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD Lab Keswan dan Kesmavet	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan										12	1.945.427.472			12	1.945.427.472	Kepala Sub Bagian Umum	SMD			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD PTHPT	Jumlah laporan bulanan penyediaan gaji non PNS	Laporan					12	711.320.840			12	632.428.840			12	1.343.749.680	Kepala Subbagian Tata Usaha Lab Keswan & Kesmavet	SMD				
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD PTHPT	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan										12	750.000.000			12	750.000.000	Kepala Subbagian Tata Usaha Lab Keswan & Kesmavet	SMD			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD PTHPT	Jumlah laporan bulanan penyediaan gaji non PNS	Laporan					12	1.390.378.944			12	1.311.606.176			12	2.701.985.120	Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD PTHPT	PPU				
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor UPTD PTHPT	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan										12	1.390.378.944			12	1.390.378.944	Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD PTHPT	PPU			
			3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%					80	4.017.905.540			80	2.270.839.834			80	2.348.556.200	80	8.637.301.574	Sekretaris			
			3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Dinas	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Unit					63	34.212.000			27	34.212.000			63	68.424.000	Kepala Sub Bagian Umum	SMD				
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit										63	34.212.000				34.212.000	Kepala Sub Bagian Umum	SMD			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan UPTD Lab Keswan dan Kesmavet	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Unit					5	6.380.900			4	6.380.900			9	12.761.800	Kepala Subbagian Tata Usaha Lab Keswan & Kesmavet	SMD				
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan UPTD Lab Keswan dan Kesmavet	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit										9	7.000.000				7.000.000	Kepala Subbagian Tata Usaha Lab Keswan & Kesmavet	SMD			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan UPTD PTHPT	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Unit					14	7.350.000			12	9.150.000			16	16.500.000	Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD PTHPT	PPU				
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan UPTD PTHPT	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit										16	12.000.000				12.000.000	Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD PTHPT	PPU			
			3.27.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Dinas	Jumlah tersedianya pemeliharaan peralatan dan mesin	tahun					1	274.208.400			1	242.937.500			88	517.145.900	Kepala Sub Bagian Umum	SMD				

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROG / KEG	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN (2018)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN															KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	LOKASI			
								TAHUN - 1 (2019)		TAHUN - 2 (2020)		TAHUN - 3 (2021)		TAHUN - 4 (2022)		TAHUN - 5 (2023)		TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET			Rp.	TARGET	Rp.
								TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET			Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22								
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit										88	274.145.000		274.145.000	Kepala Sub Bagian Umum	SMD								
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya UPTD Lab Keswan dan Kesmatet	tahun					1	123.150.000		1	103.980.000			62	227.130.000	Kepala Subbagian Tata Usaha Lab Keswan & Kesmatet	SMD								
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit										62	130.000.000		130.000.000	Kepala Subbagian Tata Usaha Lab Keswan & Kesmatet	SMD								
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya UPTD PTHPT	tahun					1	113.022.000		1	134.102.000			50	247.124.000	Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD PTHPT	PPU								
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit										50	139.798.780		139.798.780										
				3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung/Kantor dan Bangunan Lainnya Dinas	Unit					1	3.095.052.240		1	910.743.434		1.101.947.920	1	5.107.743.594	Kepala Sub Bagian Umum	SMD								
					Jumlah Rehab Gedung/Kantor dan Lainnya	Unit									1	98.892.000			1	98.892.000	Kepala Sub Bagian Umum	SMD							
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung/Kantor dan Bangunan Lainnya UPTD PTHPT	Unit					2	225.367.500		2	647.712.000	0	-	2	873.079.500	Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD PTHPT	PPU								
				3.27.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Dinas	bulan unit					12	139.162.500		113	82.730.000			10	221.892.500	Kepala Sub Bagian Umum	SMD								
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit										10	86.182.500		86.182.500										
				3.27.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya UPTD PTHPT	Bulan Unit					0	-		0				5	-	Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD PTHPT	PPU								
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit										5	563.270.000		563.270.000										

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PERTANIAN BIDANG PETERNAKAN

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Indikator kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2019-2023

Program prioritas yang mendukung RPJMD pada DPKH Prov Kaltim yaitu:

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kondisi Awal	Capaian		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN			Kondisi Akhir
			2018	2019	2020	TARGET 2021	TARGET 2022	TARGET 2023	2023
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Miniranch yang teregister	Unit	-	5,00	12,00	24,00	49,00	30,00	120,00
<i>Penataan Prasarana Pertanian</i>	<i>Jumlah miniranch sapi potong</i>	<i>Unit</i>	-	5,00	12,00	24	49,00	30,00	120
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Angka Kelahiran Sapi	%	19,00	17,49	20,10	20,50	21,00	22,00	22

PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kondisi Awal	Capaian		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN			Kondisi Akhir
<i>Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian</i>	<i>Jumlah unit usaha yang memasarkan produk hasil peternakan</i>	<i>Unit Usaha</i>	-	-	-	0,00	75,00	76,00	151
<i>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi</i>	<i>Populasi ternak sapi bibit</i>	<i>Ekor</i>		-	-	10,00	65,00	80,00	155
	<i>Produksi HPT (Segar)</i>	<i>Ton / Tahun</i>	5000,00	935,00	1005,00	750,00	800,00	825,00	4.315
<i>Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi</i>	<i>Calving Interval</i>	<i>Bulan</i>	19,00	19,00	18,18	17	17	16,50	16,50

PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kondisi Awal	Capaian			TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN			Kondisi Akhir
<i>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi</i>	<i>Jumlah sampel HPT, bahan baku dan pakan yang memenuhi standar mutu</i>	<i>Sampel</i>	-	-	-	40	40,00	40,00	120	
<i>Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor</i>	<i>Jumlah sampel obat hewan yang memenuhi persyaratan mutu</i>	<i>sampel</i>	-	-	-	8,00	11,00	13,00	32	
<i>Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain</i>	<i>Jumlah kelompok penerima ternak</i>	<i>Kelompok</i>	-	-	-	10,00	10,00	10,00	30	

Indikator yang mendukung program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian diantaranya yaitu Jumlah unit usaha yang memasarkan produk hasil peternakan; Populasi ternak sapi bibit; Produksi HPT (Segar); Calving Interval ;Jumlah sampel HPT, bahan baku dan pakan yang memenuhi standar mutu; Jumlah sampel obat hewan yang memenuhi persyaratan mutu, dan Jumlah kelompok penerima ternak. Indikator diatas bertujuan untuk meningkatkan populasi ternak dengan cara meningkatkan jumlah kelahiran. Jumlah kelahiran dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya : Calving interval dan jumlah induk. Calving interval sendiri dipengaruhi oleh pejantan baik dari segi kualitas maupun kuantitas; sumber daya manusia (peternak/petugas pakan/petugas Kesehatan hewan); dan pakan (kuantitas/kualitas). Meningkatkan jumlah induk dengan cara pengadaan ternak maupun menarik investor/perusahaan swasta untuk melakukan usaha pengembangbiakan sapi potong.

Indikator yang mendukung program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian yaitu Jumlah miniranch sapi potong. Mini Ranch adalah inovasi dari padang penggembalaan terbatas. Pola pemeliharaan dengan sistem Mini Ranch ini sesuai dengan potensi lahan yang ada yaitu lahan eks tambang dan kebun sawit, dengan sistem pemeliharaan secara ekstensif atau semi intensif dengan memanfaatkan potensi pakan setempat. Dengan Mini Ranch ini diharapkan dapat meningkatkan rata-rata kepemilikan ternak sapi 20 – 30 ekor per peternak.

A. Kesimpulan

Rancangan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur periode 2019 – 2023 merupakan dokumen resmi perencanaan pembangunan peternakan untuk lima (5) tahun yang memuat visi, misi, strategi atau kebijakan umum, serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kalimantan Timur, yang disusun sesuai kebutuhan masyarakat.

B. Kaidah Pelaksanaan

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 – 2023 akan menjadi pedoman dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Penyusunan Rencana Strategis juga bertujuan sebagai pedoman dalam pengukuran keberhasilan atau kegagalan yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). RENSTRA ini juga diharapkan dapat memberikan layanan publik yang baik serta acuan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan perannya sebagai fasilitator, stimulator, motivator, dan regulator.

Pada setiap tahun akan disusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang mengacu pada RENSTRA, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan RPJMD, sehingga tertuang dalam program dan kegiatan. Pendanaan setiap kegiatan akan dihitung secara rinci dan mengacu pada peraturan penganggaran yang dihimpun secara berjenjang melalui Musrenbang.

Semoga RENSTRA Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur dapat dilaksanakan dengan baik melalui kerja ikhlas, cerdas dan tuntas, sehingga dapat memberikan kontribusi yang nyata terhadap pencapaian **Kalimantan Timur yang Berdaulat**.